



Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah Februari 2026

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Sulawesi Tengah

Visi Bank Indonesia

“Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola yang kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju”

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kritik, saran, masukan dan komentar dapat disampaikan kepada :

Contact Center BICARA : (62 21) 131, Email : bicara@bi.go.id

Jam operasional Senin s.d. Jumat Pkl. 08.00 s.d 16.00 WIB

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.23 Palu

Telp : 0451 – 421181

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan YME, karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah edisi Februari 2025 telah dapat kami selesaikan. Laporan Perekonomian ini kami susun dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang perkembangan ekonomi dan keuangan di Sulawesi Tengah. Adapun ruang lingkup dari Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah ini meliputi asesmen mengenai pertumbuhan ekonomi; keuangan pemerintah; inflasi; stabilitas keuangan daerah; pengembangan akses keuangan dan UMKM; penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; ketenagakerjaan dan kesejahteraan; serta prospek perekonomian dan inflasi ke depan.

Kami berharap informasi yang terangkum dalam laporan Perekonomian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pembuat kebijakan, kalangan akademisi, investor dan pelaku dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, pada kesempatan ini perkenalkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu kami terutama dalam penyediaan data dan informasi untuk penyusunan laporan perekonomian. Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kualitas kajian ke depan, kami mengharapkan saran, masukan dan tentunya *update* data dan informasi terkini dari seluruh *stakeholder*. Laporan perekonomian ini kami cetak dalam jumlah terbatas, dan untuk mendapatkan *soft file* dapat diunduh di <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>.

Semoga Tuhan YME selalu meridhoi setiap upaya kita dalam berkontribusi untuk memajukan perekonomian di wilayah yang kita cintai ini. Terima kasih.

Palu, Februari 2026

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ttd

Muhamad Irfan Sukarna



RINGKASAN EKSEKUTIF

Ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 9,43% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,79% (yoy). Peningkatan tersebut mencerminkan akselerasi pada sejumlah Lapangan Usaha (LU), khususnya LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalian yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor barang dan jasa yang meningkat dari triwulan sebelumnya.

Ekonomi Sulawesi Tengah secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh sebesar 8,47% (yoy), melambat dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 9,89% (yoy). Perlambatan pertumbuhan tersebut mencerminkan normalisasi pertumbuhan pada sejumlah LU setelah ekspansi yang tinggi pada tahun sebelumnya. LU Industri Pengolahan tetap menjadi penopang utama perekonomian meskipun tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2024, seiring melandainya kapasitas produksi dan normalisasi kinerja hilirisasi nikel. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2025 terutama ditopang oleh kinerja ekspor serta konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh positif. Namun demikian, pertumbuhan tertahan oleh kontraksi konsumsi Pemerintah akibat kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran, serta melambatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) seiring berkurangnya penambahan kapasitas industri logam dasar sepanjang tahun 2025.

Secara keseluruhan, kinerja fiskal Sulawesi Tengah hingga Triwulan IV 2025 menunjukkan tantangan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi pendapatan, realisasi APBN di Sulawesi Tengah tercatat dengan capaian 109,56%, dilanjutkan realisasi APBD Provinsi dan APBD 13 kabupaten/kota tertahan pada level 79,25% dan 75,31%, mencerminkan terbatasnya ruang fiskal daerah. Sementara itu, dari sisi belanja, realisasi APBN tercatat sebesar 94,06%, belanja APBD Provinsi dan 13 Kab/kota yang masing-masing baru mencapai 63,68% dan 70,70%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kehati-hatian pemerintah daerah dalam

merealisasikan belanja, khususnya belanja non-rutin, seiring dengan upaya menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan pendapatan daerah.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 3,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan Triwulan III 2025 yang sebesar 3,88% (yoy), terkendali pada kisaran sasarannya yang sebesar 2,5±1%. Penurunan inflasi pada triwulan IV 2025 tersebut terutama bersumber dari penurunan harga tomat, cabai rawit, dan bawang putih. Dari sisi permintaan, inflasi masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,74%, melandai jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,54%. Tekanan pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh komoditas pangan strategis seperti beras dan aneka ikan yang masih mengalami kenaikan harga secara tahunan. Lebih lanjut, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kontributor terbesar kedua dengan andil 0,88%, didorong oleh lonjakan harga emas perhiasan seiring tren kenaikan harga emas global.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tetap terjaga, meskipun pertumbuhan kredit melambat. Total kredit hanya tumbuh sekitar 0,61% (yoy), namun kondisi perbankan masih sehat dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 1,77% atau masih jauh di bawah batas aman 5%. Dana pihak ketiga (DPK) juga tetap tumbuh dan semakin didominasi tabungan, sehingga likuiditas bank tetap kuat. Secara sektoral, kredit konsumsi dan industri masih menopang pertumbuhan, sementara sektor pertambangan dan konstruksi menunjukkan tekanan. Dari sisi wilayah, kontraksi kredit di Kota Palu cukup memengaruhi kinerja agregat, meskipun beberapa daerah seperti Banggai masih tumbuh baik.

Sektor UMKM dan rumah tangga masih cukup tahan, namun perlu perhatian. Kredit UMKM berkontraksi -9,44% (yoy), walaupun secara umum NPL UMKM masih terkendali di 1,70%. Beberapa daerah seperti Donggala, Banggai Kepulauan, dan Morowali Utara masih memiliki tingkat kredit bermasalah yang tinggi sehingga perlu pengawasan lebih ketat. Di sisi lain, optimisme masyarakat kembali meningkat, terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik ke level 135,19 dan berada di zona optimis. Perbankan syariah juga mencatat pertumbuhan yang kuat, baik dari sisi aset maupun pembiayaan. Secara keseluruhan, kondisi sistem keuangan Sulawesi Tengah tetap stabil, namun kewaspadaan tetap diperlukan terutama pada sektor dan wilayah dengan risiko kredit yang lebih tinggi.

Sistem Pembayaran di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami net outflow di triwulan laporan sesuai dengan siklus tahunannya. Total uang kartal yang diedarkan mencapai Rp 2,59 triliun, seiring dengan tetap tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 secara *year-on-year*. Di sisi QRIS, jumlah merchant yang mengadopsi QRIS juga mengalami peningkatan signifikan hingga 37,38% (yoy). Dari sisi jumlah pengguna QRIS, juga memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 367.697 pengguna atau

meningkat sebesar 10,05% (yoy). Total volume transaksi QRIS di akhir 2025 mencapai 37,8 juta transaksi, meningkat sebesar 133% (yoy). Di sisi pembayaran non-tunai, terjadi peningkatan yang pesat pada pembayaran menggunakan APMK baik dari sisi volume maupun transaksi, khususnya yang terjadi pada kartu kredit. Volume transaksi kartu kredit pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan sebesar 35,22% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah pada November 2025 tercatat sebesar 2,89%, menurun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 2,92%. Penurunan sebesar 0,03 poin persentase ini menunjukkan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja pada akhir tahun. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 10,52% atau sekitar 345,38 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,04% atau 358,33 ribu jiwa. Secara tahunan, terjadi penurunan 0,52 poin persentase yang mencerminkan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Rasio Gini Sulawesi Tengah pada September 2025 sebesar 0,277, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,309. Penurunan ini mengindikasikan distribusi pengeluaran yang semakin merata secara tahunan. Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2025 berada pada level 101,6, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 109,8. Meskipun mengalami penurunan, NTP masih berada di atas 100 yang menunjukkan daya beli petani secara agregat tetap

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah diperkirakan berada pada kisaran 7,45–9,05% (yoy). Kinerja tersebut masih ditopang oleh dominannya peran LU Industri Pengolahan berbasis nikel dan LU Pertambangan dan Penggalan dalam struktur ekonomi daerah. Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, terutama perlambatan ekonomi Tiongkok sesuai proyeksi IMF yang berpotensi memengaruhi permintaan global terhadap produk berbasis nikel.

Inflasi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2026 diperkirakan tetap terjaga pada batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,50%–3,50% (yoy). Secara triwulanan, tekanan harga meningkat dibandingkan akhir 2025 seiring faktor musiman dan peningkatan aktivitas ekonomi awal tahun. Pada komponen *Volatile Food* (VF), tekanan inflasi diperkirakan meningkat terutama pada bulan Maret 2026 sejalan dengan kenaikan permintaan menjelang Ramadhan dan HBKN Idulfitri. *Administered Prices* (AP), inflasi Triwulan I 2026 diperkirakan meningkat secara tahunan terutama akibat faktor *low base effect* kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025 Sementara itu, *Core Inflation* (CI) diperkirakan meningkat secara moderat dan relatif stabil.

TABEL INDIKATOR MAKRO

Tabel Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Indikator	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PDRB (% , yoy)	13.18	11.86	13.06	9.73	10,49	9,75	9,08	10,29	8,69	7,95	7,79	9,43
Sisi Lapangan Usaha												
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.84	2.66	0.65	1.58	1,44	3,51	2,26	0,57	5,47	4,02	4,41	3,93
Pertambangan dan Penggalian	17.35	7.28	13.32	8.67	7,37	6,35	6,63	4,57	5,13	6,34	6,6	7,08
Industri Pengolahan	29.41	25.64	27.99	21.26	21,27	18,71	14,77	22,35	15,11	12,14	12,56	16,67
Pengadaan Listrik dan Gas	7.64	7.33	2.98	8.64	8,23	8,62	10,47	2,44	4,33	3,71	6,38	4,61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.19	5.90	0.95	(0.40)	0,1	4,53	5,43	6,18	4,68	4,88	4,92	4,41
Konstruksi	(2.75)	3.46	(1.37)	0.60	7,17	-0,28	5,84	2,82	-0,59	10,89	2,76	-4,15
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.15	8.09	5.23	0.43	5,81	5,53	7,07	3,91	4,9	4,57	5,52	5,45
Transportasi dan Pergudangan	6.20	7.01	5.65	5.64	5,4	5,04	4,85	3,42	5,97	4,65	4,5	5,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.70	8.44	10.05	10.12	10,2	7,59	6,59	6,1	4,85	5,45	5,78	6,25
Informasi dan Komunikasi	4.06	6.39	9.79	7.08	5,24	4,93	4,33	4,98	5,86	5,4	5,23	5,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	(2.53)	(0.51)	3.26	4.91	12,6	16,01	8,28	9,36	4,25	2,04	5,96	19,11
Real Estate	8.05	7.83	8.23	6.12	5,2	5,15	4,27	4,1	4,53	5,51	5,49	5,23
Jasa Perusahaan	5.74	5.89	4.88	5.98	5,34	5,23	5,25	4,83	5,52	5,61	6,07	5,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.33	3.66	(4.52)	4.08	1,06	6,19	11,33	2,69	13,79	-2,45	-8,82	2,46
Jasa Pendidikan	3.72	8.41	5.36	0.80	4,18	3,46	3,71	4,06	5,5	5,04	5,68	5,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.47	7.18	2.35	1.15	3,84	3,97	3,99	3,96	4,34	5,06	5,35	5,72
Jasa lainnya	9.11	9.18	9.74	2.19	1,63	3,22	6	5,85	5,87	6,39	6,08	6,40
Sisi Pengeluaran												
Konsumsi Rumah Tangga	5.23	5.62	5.69	5.16	5,31	5,03	5,15	4,85	5,07	4,7	5,03	5,54
Konsumsi Pemerintah	3.41	4.81	1.94	2.34	5,59	6,69	13,08	12,38	-2,39	-3,74	-7,46	-12,40
Investasi	(4.82)	5.16	(3.94)	8.02	9,83	-1,41	4,15	0,82	0,67	7,18	3,75	-5,13
Ekspor Luar Negeri	18,62	20,75	23,23	13,56	22,07	23,69	11,24	19,58	11,97	8,34	9,37	12,77
Impor Luar Negeri	5,48	16,12	13,07	11,65	24,20	19,95	8,75	14,87	7,98	6,69	5,84	5,01
Inflasi												
Indeks Harga Konsumen (IHK) Sulawesi Tengah	117.27	117.85	118.47	118.83	106,94	107,26	106,82	107,16	108,95	107,97	110,96	110,71
Laju Inflasi Tahunan (%) Sulawesi Tengah	5.28	3.88	2.44	2,35	3,38	2,82	2,15	1,29	1,88	2,47	3,88	3,31



Bab I Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 9,43% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,79% (yoy). Peningkatan tersebut mencerminkan akselerasi pada sejumlah Lapangan Usaha (LU), khususnya LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalian yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Industri Pengolahan didorong oleh peningkatan aktivitas produksi pada akhir tahun, sementara LU Pertambangan dan Penggalian menguat seiring optimalisasi realisasi kuota bijih nikel. Di sisi lain, pertumbuhan pada beberapa LU seperti LU Konstruksi masih tertahan, meski dampaknya terkompensasi oleh penguatan pada LU lainnya. **Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor barang dan jasa yang meningkat dari triwulan sebelumnya.** konsumsi rumah tangga sejalan dengan meningkatnya optimisme konsumen, sementara ekspor didorong oleh penguatan kinerja pada sektor industri pengolahan. Namun demikian, pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh kontraksi pada konsumsi Pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 belum sepenuhnya merata di seluruh komponen pengeluaran.

Ekonomi Sulawesi Tengah secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh sebesar 8,47% (yoy), melambat dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 9,89% (yoy). Perlambatan pertumbuhan tersebut mencerminkan normalisasi pertumbuhan pada sejumlah LU setelah ekspansi yang tinggi pada tahun sebelumnya. LU Industri Pengolahan tetap menjadi penopang utama perekonomian meskipun tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2024, seiring melandainya kapasitas produksi dan normalisasi kinerja hilirisasi nikel. LU Pertambangan dan Penggalan tetap tumbuh positif didukung peningkatan kuota bijih nikel, sementara LU Pertanian mencatat pertumbuhan lebih tinggi didorong peningkatan produksi padi. Di sisi lain, LU Konstruksi dan LU Perdagangan mengalami perlambatan sejalan dengan penurunan realisasi belanja modal dan normalisasi aktivitas ritel.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2025 terutama ditopang oleh kinerja ekspor serta konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh positif. Ekspor mencatat pertumbuhan yang tetap kuat meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya, seiring normalisasi kinerja pada sektor industri pengolahan. Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil didukung perbaikan kinerja pertanian sebagai sumber penghasilan utama masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan tertahan oleh kontraksi konsumsi Pemerintah akibat kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran, serta melambatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) seiring berkurangnya penambahan kapasitas industri logam dasar sepanjang tahun 2025.



1.1 Kinerja Perekonomian Triwulan IV 2025

Perekonomian Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 9,43% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,79% (yoy). Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 relatif tinggi dan berada di atas pertumbuhan nasional yang sebesar 5,39% (yoy). Secara spasial, ekonomi Sulawesi Tengah termasuk merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, setelah Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat yang masing-masing tumbuh sebesar 29,81% (yoy) dan 12,49% (yoy). Namun demikian, pangsa perekonomian Sulawesi Tengah terhadap nasional masih relatif terbatas.

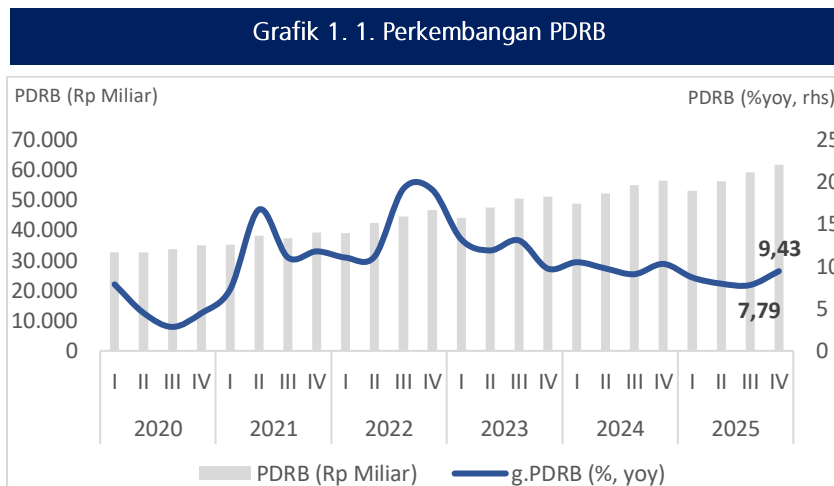
Dari sisi lapangan usaha, akselerasi pertumbuhan terutama bersumber dari kinerja pada LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalan yang tumbuh lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Industri pengolahan pada triwulan IV 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 16,67% (yoy), meningkat dari 12,56% (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring dengan peningkatan aktivitas produksi pada akhir tahun. LU Pertambangan dan Penggalian juga tumbuh lebih tinggi menjadi 7,08% (yoy) pada triwulan IV 2025 dari 6,60% (yoy) pada triwulan sebelumnya, didorong oleh optimalisasi realisasi kuota bijih nikel oleh pelaku usaha. Sementara itu, LU Perdagangan Besar dan Eceran tetap tumbuh positif sebesar 5,45% (yoy) pada triwulan IV 2025, melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,52% (yoy), disebabkan oleh *high base affect* dampak penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada triwulan IV tahun sebelumnya.

Di sisi lain, beberapa LU masih mengalami tekanan antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh melambat menjadi 3,93% (yoy) dari 4,41% (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring pergeseran pola panen yang menyebabkan basis perbandingan lebih tinggi pada triwulan sebelumnya. LU Konstruksi juga mengalami kontraksi sebesar 4,15% (yoy) pada triwulan IV 2025, berbalik arah dari pertumbuhan 2,76% (yoy) pada triwulan sebelumnya, dikarenakan oleh masih terbatasnya realisasi belanja modal Pemerintah daerah.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 terutama ditopang oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi Rumah Tangga tercatat tumbuh sebesar 5,54% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dari 5,03% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya optimisme konsumen yang tercermin dari kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Sementara itu, kinerja Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 12,77% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,37% (yoy), sejalan dengan penguatan kinerja pada sektor Industri Pengolahan sebagai sektor utama penopang ekspor daerah.

Di sisi lain, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh beberapa komponen yang mengalami kontraksi yaitu Konsumsi Pemerintah yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 12,40% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 7,46% (yoy), seiring masih berlanjutnya kebijakan efisiensi dan realokasi belanja. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga berkontraksi 5,13% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif sebesar 4,15% (yoy), sehingga menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

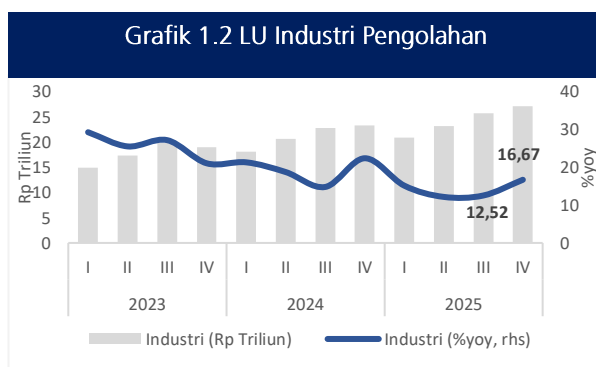


Sumber : BPS, diolah

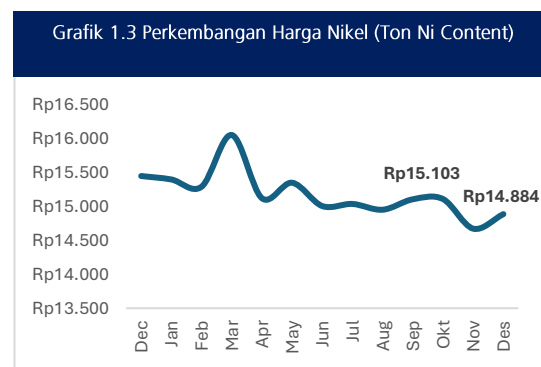
1.2. Analisis PDRB dari Sisi Lapangan Usaha

1.2.1. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 16,67% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,52% (yoy). Peningkatan pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh *ramp up* produksi dari beberapa smelter yang telah menyelesaikan tahap *commissioning* pada 2025. Sementara itu, pada akhir tahun perusahaan cenderung melakukan optimalisasi kapasitas produksi guna mengejar target tahunan sehingga turut mendorong penguatan kinerja industri pengolahan di Sulawesi Tengah.



Sumber : BPS, diolah



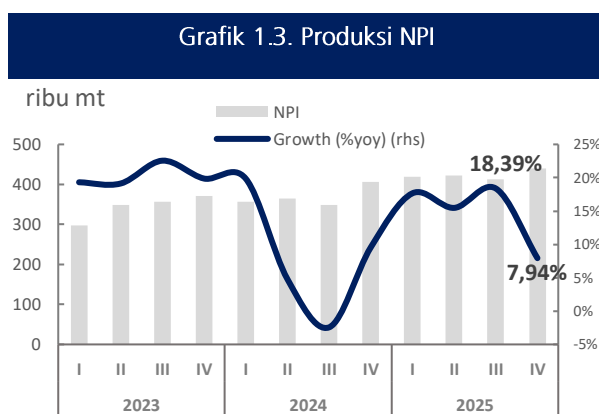
Sumber : Bloomberg, diolah

Pertumbuhan yang lebih tinggi pada industri pengolahan logam dasar tertahan oleh moderasi produksi dan permintaan NPI pada triwulan IV 2025. Berdasarkan data *Shanghai Metals Market* (SMM), produksi NPI Indonesia pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 439,3 ribu ton Ni content, tumbuh 7,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 18,39% (yoy).

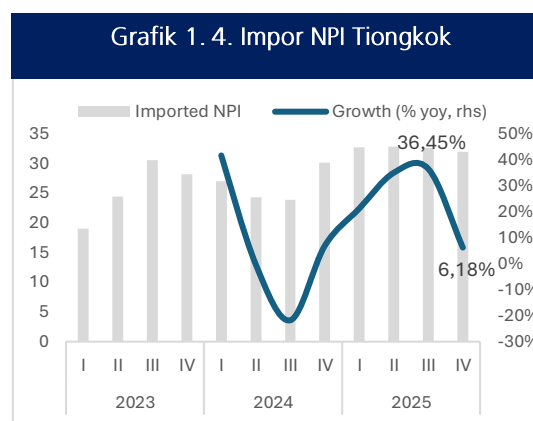
Perlambatan ini menunjukkan bahwa akselerasi produksi pada periode *peak season* sebelumnya mulai mengalami normalisasi pada akhir tahun.

Dari sisi permintaan eksternal, impor NPI Tiongkok dari Indonesia pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 319,6 ribu ton Ni content, tumbuh 6,18% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 36,45% (yoy). Meskipun secara level masih relatif tinggi, pertumbuhan yang lebih moderat tersebut mencerminkan penyesuaian permintaan *stainless steel* Tiongkok pasca periode puncak produksi pada triwulan sebelumnya.

Sepanjang tahun 2025, LU Industri Pengolahan tumbuh 14,12% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2024 sebesar 19,12% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi pertumbuhan setelah capaian tinggi pada tahun sebelumnya, serta melandainya kapasitas olahan nikel sepanjang 2025. Selain itu, kendala finansial pada salah satu pelaku usaha dan penurunan harga nikel yang dalam turut memengaruhi produksi NPI dan *stainless steel* di Sulawesi Tengah.



Sumber : SMM

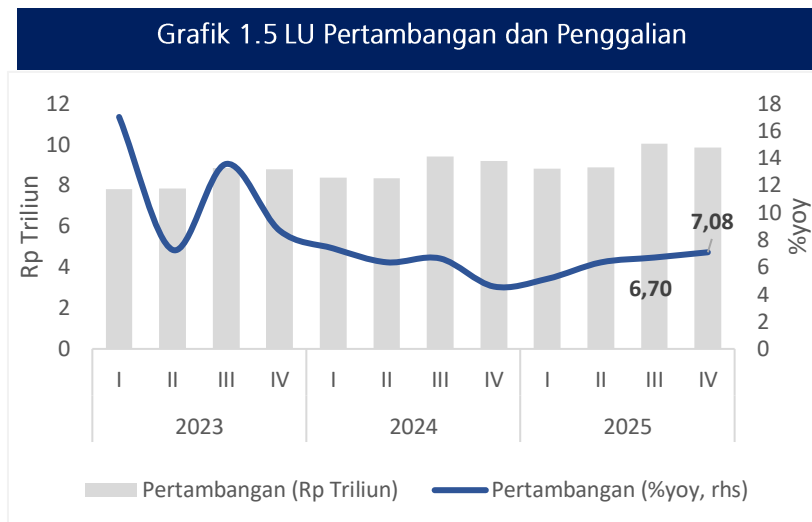


Sumber : SMM

1.2.2. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalan pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, LU Pertambangan dan Penggalan tumbuh sebesar 7,08% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 6,70% (yoy). Penguatan kinerja tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas produksi bijih nikel, seiring upaya pelaku penambangan untuk mengoptimalkan realisasi kuota bijih nikel Sulawesi Tengah tahun 2025 yang tercatat sebesar 105,5 juta ton. Akselerasi produksi pada akhir tahun juga dipengaruhi oleh adanya risiko penurunan kuota Rencana Kinerja, Anggaran, dan Biaya (RKAB) bijih nikel Sulawesi Tengah pada tahun 2026, sehingga pelaku penambangan cenderung mempercepat produksi guna menghabiskan kuota yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2025 tumbuh 6,34% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,19% (yoy). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kuota RKAB bijih nikel pada tahun 2025 yang mencapai 366 juta ton, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 282 juta ton.



Sumber : BPS, diolah

1.2.3. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan IV 2025 tercatat melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, LU tersebut tumbuh sebesar 3,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2025 yang sebesar 4,41% (yoy). Secara pangsa, lapangan usaha ini tetap menjadi yang terbesar kedua di Sulawesi Tengah dengan pangsa 16,07%, setelah LU Industri Pengolahan. Struktur LU ini didominasi oleh subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian (77,25%), khususnya tanaman perkebunan (45,94%), disusul oleh perikanan (18,11%) dan tanaman pangan (13,04%).

Perkembangan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan IV 2025 dipengaruhi oleh pergeseran pola tanam dan panen padi di Sulawesi Tengah. Secara historis, panen raya padi umumnya terjadi pada triwulan II dan triwulan IV. Namun demikian, pada tahun 2025 sebagian panen telah bergeser ke triwulan III (September), sehingga mendorong peningkatan produksi pada triwulan sebelumnya dan menyebabkan kinerja triwulan IV tidak setinggi pola musiman tradisionalnya. Informasi anekdot dari liaison Bank Indonesia kepada beberapa kelompok tani juga mengindikasikan bahwa sebagian sentra produksi telah melakukan panen lebih awal, sehingga mengurangi intensitas panen pada triwulan IV dibandingkan dengan pola normal tahunan.

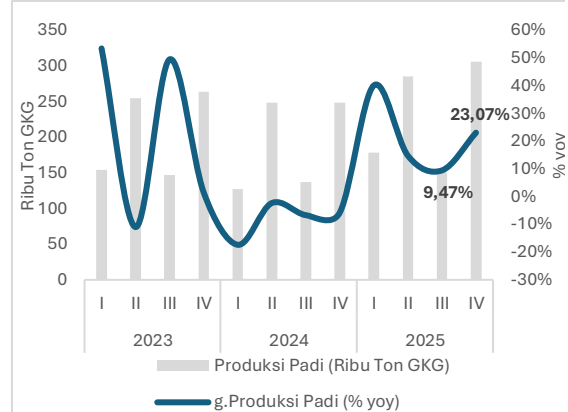
Secara tahunan, LU Pertanian mencatat pertumbuhan 4,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,93% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan produksi padi yang tercermin dari hasil perhitungan Kerangka Sampel Area BPS, dengan produksi beras mencapai 533,30 ribu ton atau tumbuh 18,61% (yoy), berbalik dari kontraksi pada tahun sebelumnya.

Grafik 1. 6. Perkembangan PDRB LU Pertanian



Sumber : BPS, diolah

Grafik 1. 7. Produksi Padi (Ribu Ton GKG)



Sumber : BPS, diolah

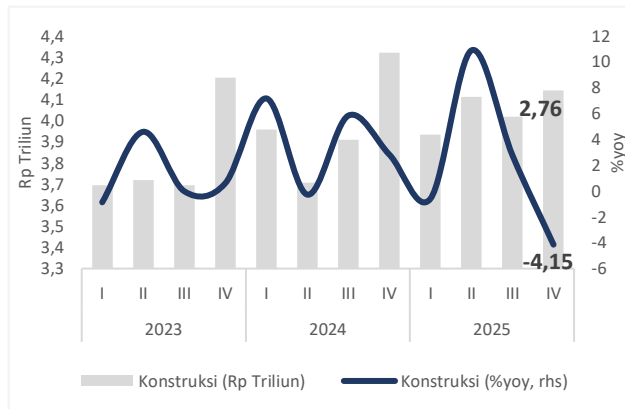
1.2.4. Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi dan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, lapangan usaha konstruksi mengalami kontraksi sebesar 4,15% (yoy), berbalik arah dari triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 2,76% (yoy). Penurunan kinerja pada LU tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya realisasi belanja modal Pemerintah daerah hingga akhir tahun. Realisasi belanja modal APBD tercatat sebesar Rp2.086,45 miliar atau 51,65% dari pagu, serta mengalami kontraksi 49,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menahan akselerasi pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah dan membatasi kontribusi lapangan usaha konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, pelemahan LU Konstruksi juga tercermin dari menurunnya realisasi pengadaan semen di Sulawesi Tengah. Pada triwulan IV 2025, realisasi semen terkontraksi sebesar 36,19% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 22,87% (yoy). Kondisi tersebut juga sejalan dengan perkembangan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sulawesi Tengah yang terkontraksi sebagaimana tercatat dalam data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

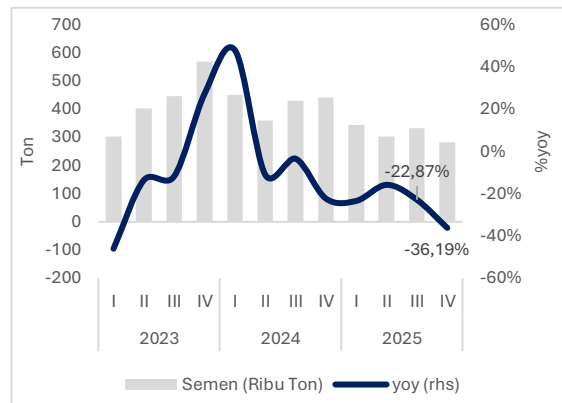
Pada tahun 2025, LU Konstruksi tumbuh 1,94% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,85% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan penurunan realisasi belanja modal Pemerintah yang juga tercermin dari turunnya pengadaan semen sepanjang tahun 2025.

Grafik 1. 7. Perkembangan PDRB LU Konstruksi



Sumber : BPS, diolah

Grafik 1. 8. Konsumsi Semen Sulteng

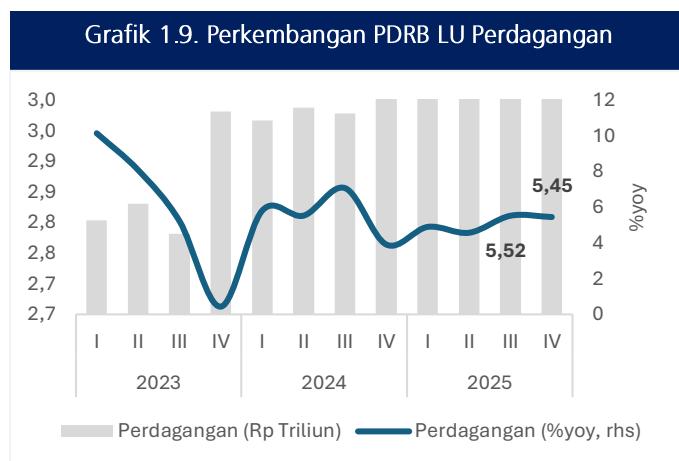


Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah

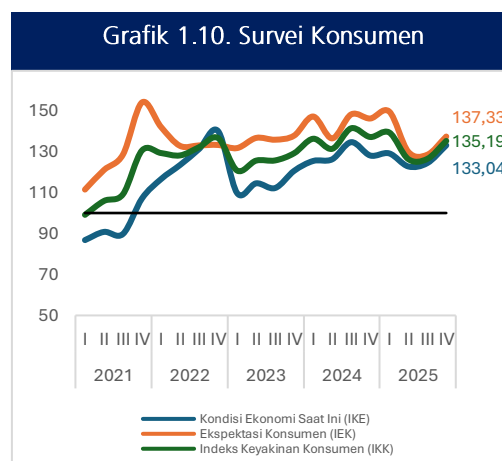
1.2.5. LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan IV 2025 tumbuh melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, LU Perdagangan tumbuh sebesar 5,45% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2025 yang sebesar 5,52% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh *high base effect* pada triwulan IV 2024 yang terdampak penyelenggaraan Pilkada November 2024, sehingga aktivitas perdagangan pada periode tersebut relatif tinggi. Namun demikian, sejumlah indikator perdagangan lainnya menunjukkan kecenderungan meningkat, yang mengindikasikan permintaan domestik tetap terjaga pada triwulan IV 2025.

Perkembangan tersebut turut tercermin pada hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Pada triwulan IV 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 135,19, meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 126,41. Peningkatan juga terjadi pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang meningkat dari 124,37 menjadi 133,04, serta Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK) yang meningkat dari 128,44 menjadi 137,33. Lebih lanjut, Survei Penjualan Eceran (SPE) menunjukkan kinerja yang membaik, dengan pertumbuhan penjualan eceran meningkat dari 7,78% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 9,26% (yoy) pada triwulan IV 2025. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat tetap terjaga meskipun pertumbuhan LU Perdagangan secara tahunan sedikit melambat akibat *high base effect* pada periode sebelumnya.

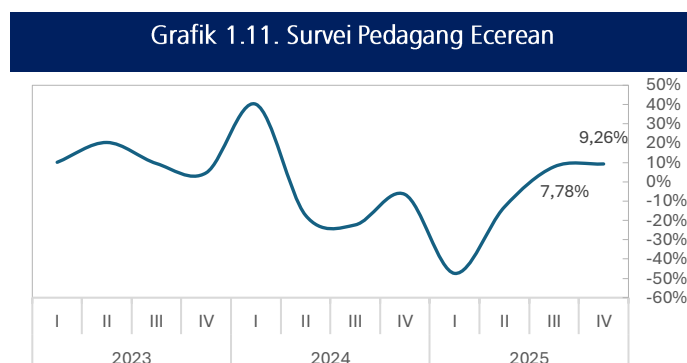
Secara keseluruhan tahun 2025, LU Perdagangan tumbuh 5,12% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,55% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas ritel setelah peningkatan yang cukup tinggi pada tahun sebelumnya.



Sumber : BPS, diolah



Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

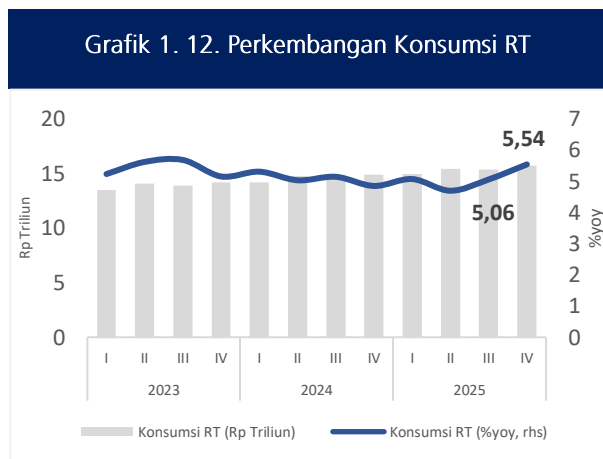


Sumber : Survei Pedagang Eceran Bank Indonesia

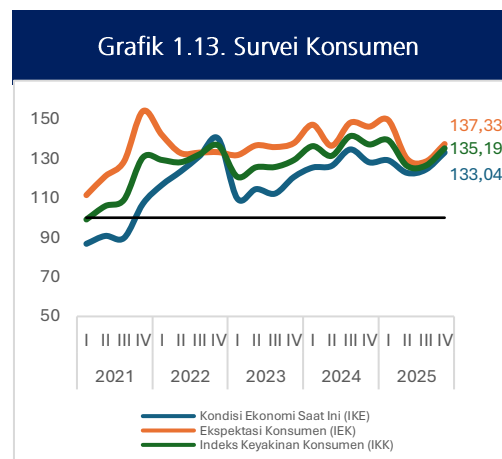
1.3. Analisis PDRB dari Sisi Pengeluaran

1.3.1. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 5,54% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,06% (yoy). Penguatan konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan meningkatnya optimisme konsumen, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik dari 126,41 pada triwulan III menjadi 135,19 pada triwulan IV 2025. Peningkatan juga terjadi pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dari 124,37 menjadi 133,04 serta Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK) dari 128,44 menjadi 137,33, yang mengindikasikan persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang semakin membaik pada triwulan IV 2025.

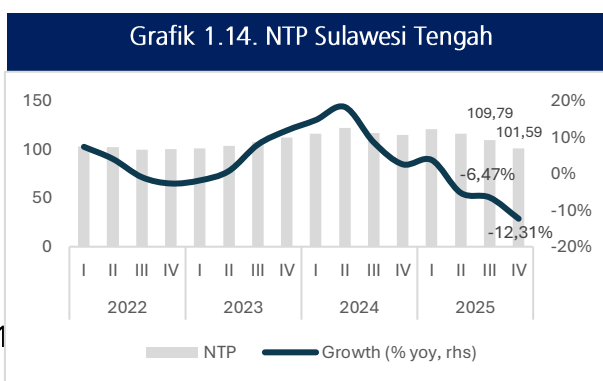
Sepanjang tahun 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,10% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,08% (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh perbaikan kinerja pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Sulawesi Tengah.



Sumber : BPS, diolah



Sumber : Bank Indonesia

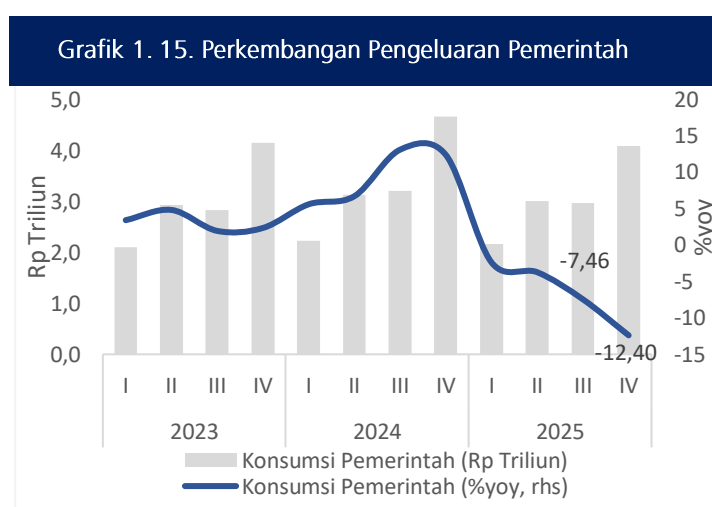


Sumber : BPS, diolah

1.3.2 Kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2025 terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 12,40% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,46% (yoy). Kontraksi tersebut masih dipengaruhi oleh berlanjutnya kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran yang menahan percepatan belanja hingga akhir tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, realisasi Belanja Negara hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp24,49 triliun atau 94,06% dari pagu, dengan pertumbuhan terkontraksi 10,84% (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp7,10 triliun (89,43% dari pagu) yang terkontraksi 18,25% (yoy) serta Transfer ke Daerah sebesar Rp17,39 triliun (96,09% dari pagu) yang terkontraksi 7,42% (yoy), sehingga turut menahan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2025.

Di sisi lain, realisasi belanja APBD hingga akhir tahun 2025 masih menunjukkan kontraksi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp18,46 triliun atau 69,25% dari pagu, terkontraksi 22,48% (yoy). Kontraksi terdalam terjadi pada belanja modal yang terealisasi sebesar Rp2,09 triliun atau 51,65% dari pagu dan terkontraksi 49,29% (yoy). Selain itu, belanja operasi juga tercatat mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga turut menahan akselerasi belanja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan tahun 2025, konsumsi pemerintah terkontraksi 7,47% (yoy), berbalik dari pertumbuhan 9,97% (yoy) pada tahun 2024. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran yang tercermin dari penurunan realisasi belanja APBN dan APBD sepanjang tahun 2025.



Sumber : BPS, diolah

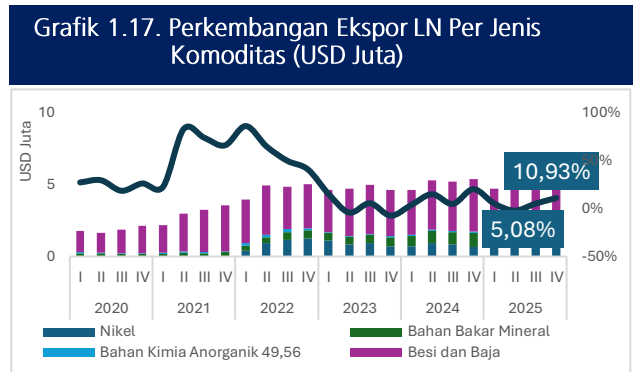
1.3.3. Kinerja Ekspor Barang dan Jasa Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 12,77% (yoy), meningkat dibandingkan capaian triwulan III 2025 sebesar 9,37% (yoy). Penguatan kinerja ekspor tersebut sejalan dengan akselerasi lapangan usaha industri pengolahan, yang menjadi sektor utama penopang ekspor Sulawesi Tengah.

Ekspor luar negeri Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 masih didominasi oleh komoditas besi baja dan nikel. Secara umum, ekspor produk logam tersebut berasal dari dua jenis proses pengolahan, yakni pirometalurgi dengan produk akhir *stainless steel* serta hidrometalurgi dengan produk akhir bahan baku baterai listrik. Komoditas utama yang mendominasi ekspor antara lain *Hot Rolled Coil* (HRC), *Cold Rolled Coil* (CRC), dan Nickel Pig Iron (NPI). Selain itu, terdapat pula komoditas lain seperti *Stainless Steel Slab*, *Nickel Matte*, *Nickel Suplhate*, *Carbon Steel*, serta Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang turut berkontribusi terhadap kinerja ekspor daerah.

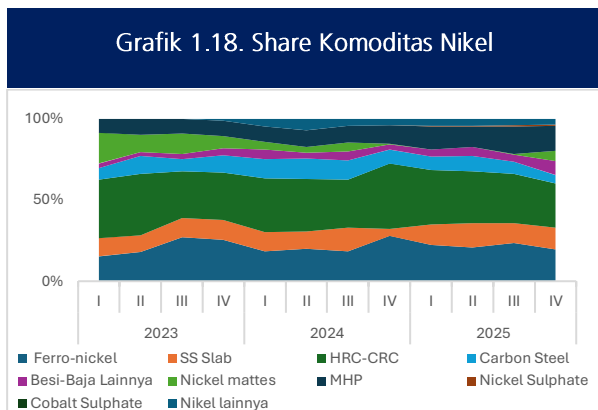
Secara tahunan, ekspor tumbuh 10,61% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2024 sebesar 18,87% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi pertumbuhan ekspor yang sebelumnya tinggi serta penurunan ekspor komoditas migas yang lebih diprioritaskan untuk kebutuhan domestik.



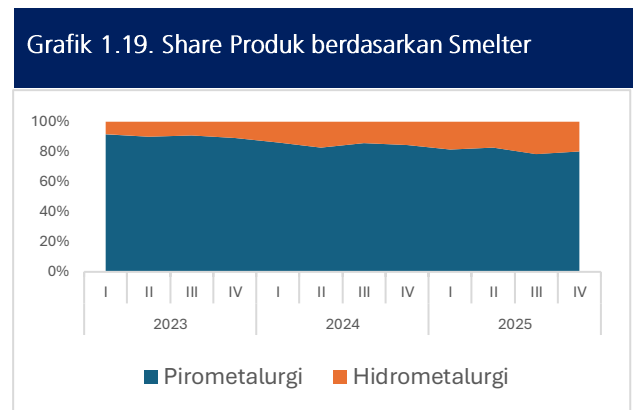
Sumber : BPS, diolah



Sumber : BPS, diolah



Sumber : DJBC, diolah

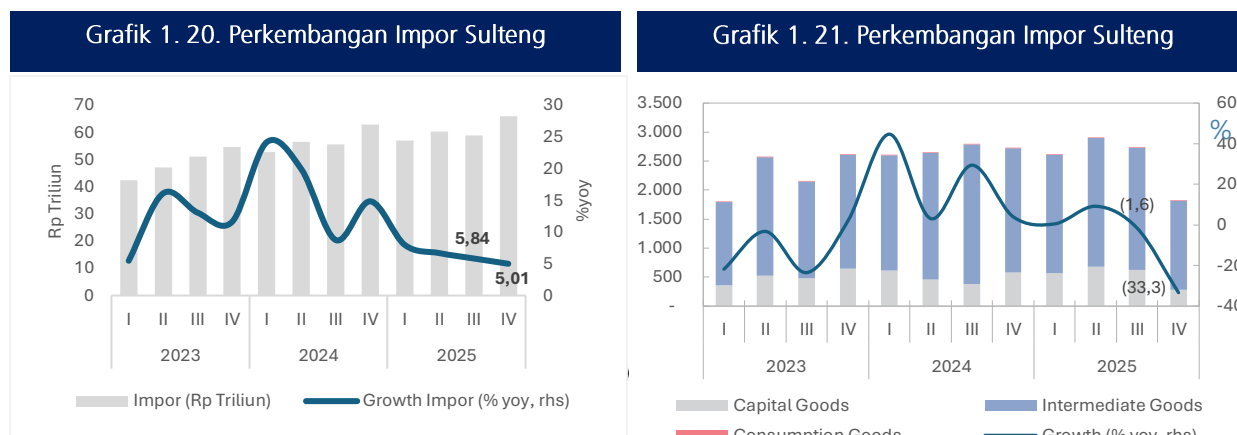


Sumber : DJBC, diolah

1.3.4. Kinerja impor Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,01% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 5,84% (yoy). Secara komposisi, total impor tercatat sebesar USD1,82 miliar, yang didominasi oleh bahan baku antara sebesar USD1,54 miliar atau sekitar 84,43% dari total impor, diikuti oleh barang modal sebesar USD281,31 juta atau 15,46%, serta barang konsumsi sebesar USD2,10 juta atau 0,12%. Dari sisi pertumbuhan, impor bahan baku antara berkontraksi 28,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 12,1% (yoy). Impor barang modal juga berkontraksi 51,5% (yoy), berbalik arah dari triwulan III 2025 yang tumbuh 64,8% (yoy). Sementara itu, impor barang konsumsi berkontraksi 68,9% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 192,7% (yoy).

Berdasarkan negara asal, impor Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan IV 2025 masih didominasi oleh Tiongkok, Afrika Selatan, dan Federasi Rusia. Secara kumulatif Januari–Desember 2025, impor dari Tiongkok tercatat sebesar USD5.363,86 juta atau sekitar 76,48% dari total impor ketiga negara utama tersebut. Impor dari Afrika Selatan sebesar USD879,59 juta atau

12,55%, sementara Impor dari Federasi Rusia mencapai USD734,21 juta atau 10,47%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama dalam pemenuhan kebutuhan impor Sulawesi Tengah, khususnya untuk menunjang aktivitas industri pengolahan dan hilirisasi di daerah, seperti bijih nikel, bijih kromium, dan lainnya



Sumber : BPS, diolah

Sumber : DJBC, diolah

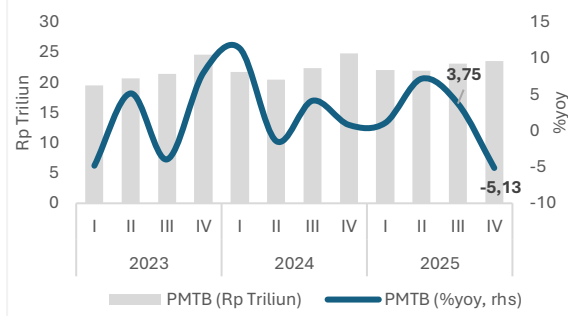
Kinerja impor pada tahun 2025 tumbuh 6,32% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2024 sebesar 16,52% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan melandainya investasi, khususnya pada industri pengolahan logam dasar di Sulawesi Tengah.

1.3.5. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tertahan oleh kontraksi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada triwulan IV 2025, PMTB terkontraksi sebesar 5,13% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan III 2025 yang masih tumbuh sebesar 4,15% (yoy). Pelemahan tersebut sejalan dengan masih terbatasnya aktivitas proyek fisik, baik pemerintah maupun swasta. Indikasinya tercermin dari realisasi pengadaan semen di Sulawesi Tengah yang terkontraksi lebih dalam, yaitu sebesar 36,19% (yoy) pada triwulan IV 2025, dibandingkan kontraksi 22,87% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut juga konsisten dengan realisasi belanja modal yang masih tertahan hingga akhir tahun.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp29,6 triliun, menurun dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar Rp33,4 triliun. Secara tahunan, realisasi investasi pada triwulan IV 2025 terkontraksi 28,50% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 13,70% (yoy). Meskipun demikian, struktur investasi Sulawesi Tengah masih didominasi oleh sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan peralatannya yang mendukung aktivitas hulu-hilir industri pengolahan nikel. Realisasi PMA dan PMDN di bidang hilirisasi pada triwulan IV 2025 mencapai Rp25,8 triliun atau sekitar 87,16% dari total investasi Sulawesi Tengah pada periode tersebut, yang menunjukkan bahwa investasi pada sektor pengolahan dan hilirisasi tetap menjadi penopang utama kinerja industri di daerah.

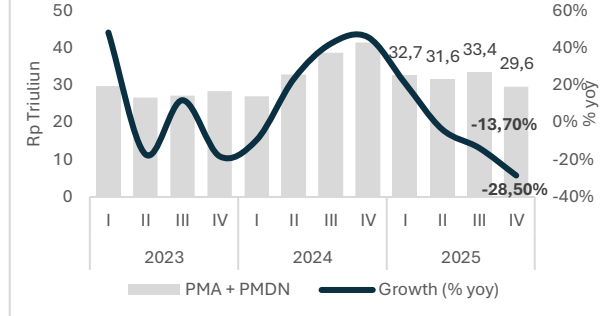
Pada tahun 2025, PMTB tumbuh 1,52% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,40% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh melandainya penambahan kapasitas industri pengolahan nikel sepanjang tahun 2025.

Grafik 1. 22. Perkembangan PMTB Sulteng



Sumber : BPS, diolah

Grafik 1. 23. Perkembangan Investasi BKPM



Sumber : BKPM, diolah



Bab II Keuangan Pemerintah

Secara keseluruhan, kinerja fiskal Sulawesi Tengah hingga Triwulan IV 2025 menunjukkan tantangan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi pendapatan, realisasi APBN di Sulawesi Tengah tercatat dengan capaian 109,56%, dilanjutkan realisasi APBD Provinsi dan APBD 13 kabupaten/kota tertahan pada level 79,25% dan 75,31%, mencerminkan terbatasnya ruang fiskal daerah. Sementara itu, dari sisi belanja, realisasi APBN tercatat sebesar 94,06%, belanja APBD Provinsi dan 13 Kab/kota yang masing-masing baru mencapai 63,68% dan 70,70%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kehati-hatian pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja, khususnya belanja non-rutin, seiring dengan upaya menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan pendapatan daerah.

Realisasi Pendapatan APBN di Sulawesi Tengah	Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Realisasi Pendapatan APBD Kab/Kota di Sulawesi Tengah
109,56%	79,25%	75,31%
Realisasi Belanja APBN di Sulawesi Tengah	Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Realisasi Belanja APBD Kab/Kota di Sulawesi Tengah
94,06%	63,68%	70,70%

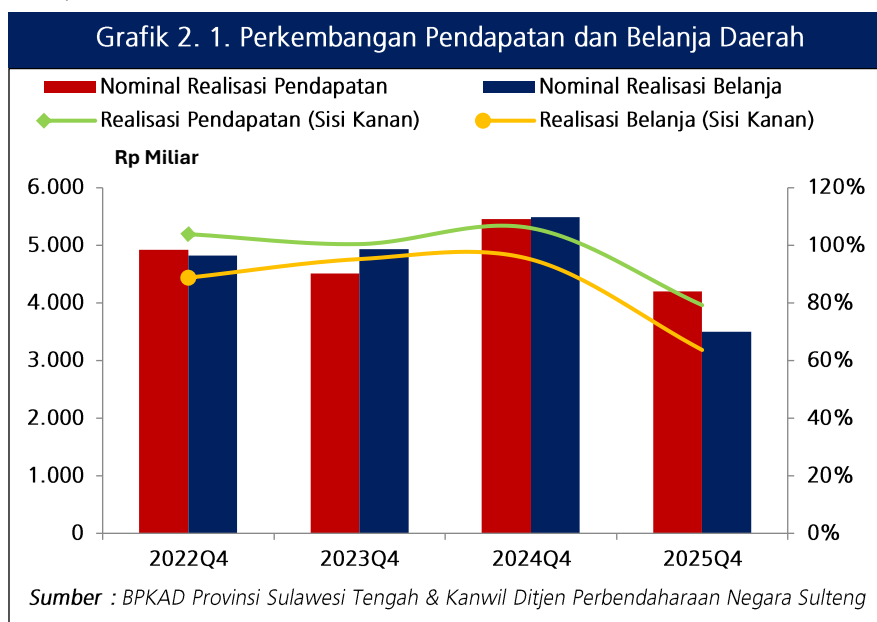
2.1. Perkembangan Realisasi APBD Pemprov Sulawesi Tengah

Realisasi pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulteng, penurunan tersebut terjadi pada hampir seluruh komponen pendapatan, utamanya disebabkan oleh realisasi Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4.202,41 miliar, setara dengan 79,25% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Secara tahunan, capaian tersebut mengalami kontraksi sebesar 23,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Jika ditinjau per komponen, capaian realisasi Pendapatan Transfer juga tercatat terkontraksi sebesar 26,18% (yoy), dengan realisasi Rp2.527,55 miliar, atau 79,64% dari pagu anggaran. Sementara itu, realisasi PAD mengalami kontraksi sedalam 19,55% (yoy), dengan capaian Rp1.635,28 miliar, atau 76,86% dari pagu anggaran PAD. Perkembangan realisasi tersebut dapat berimplikasi pada kecepatan pelaksanaan program pembangunan dan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Di sisi lain, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 1.323,32% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp39,58 miliar, meningkat signifikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,78 miliar. Namun demikian, peningkatan ini bersifat terbatas secara nominal dan cenderung dipengaruhi oleh faktor non-reguler, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penguatan struktur pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 juga tercatat mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya. Kontraksi belanja APBD tersebut terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada tiga pos belanja dengan pangsa terbesar terhadap total Belanja Daerah, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Bagi Hasil, dengan kontribusi masing-masing sebesar 41,8%, 28,7%, dan 17,4%. Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah pada periode pelaporan tercatat sebesar Rp3.504,28 miliar (-36,18%, yoy), atau setara dengan 63,68% dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.502,98 miliar. Kondisi ini mencerminkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran daerah masih belum optimal, khususnya pada komponen belanja utama yang berperan langsung dalam mendorong aktivitas ekonomi. Dari sisi struktur belanja, peningkatan Belanja Pegawai diduga berkaitan erat dengan penambahan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di sisi lain, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan, mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Sementara itu, pertumbuhan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan

mengindikasikan adanya upaya penguatan hubungan fiskal antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.



Tabel 2. 1. Kinerja APBD Provinsi Sulawesi Tengah hingga Triwulan IV 2025 (Rp Miliar)

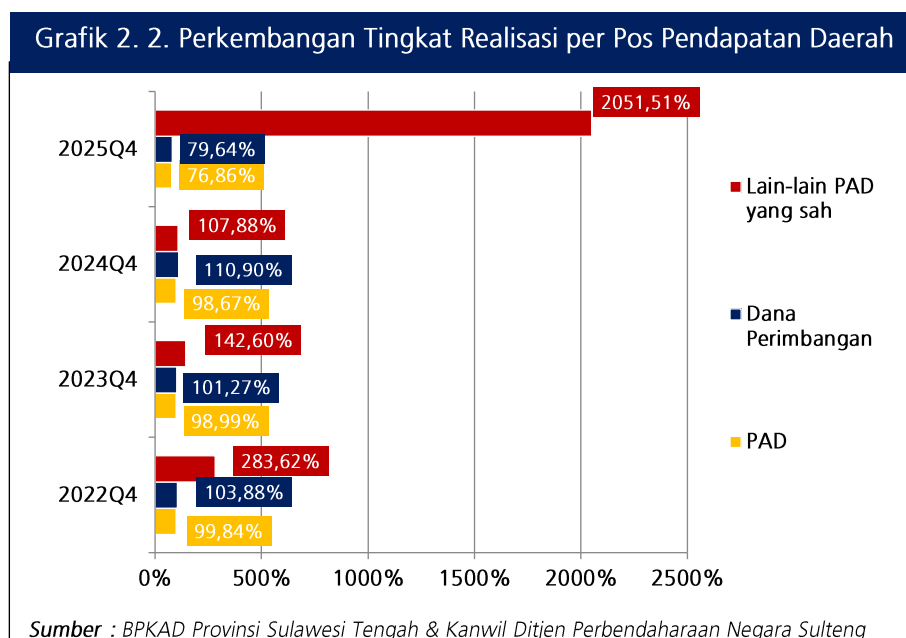
	Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	1. Pendapatan	5.302,98	4.202,41	79,25
	- Pendapatan Asli Daerah	2.127,48	1.635,28	76,86
	- Dana Perimbangan	3.173,58	2.527,55	79,64
	- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1,93	39,58	2051,51
2	2. Belanja	5.502,98	3.504,28	63,68
	- Belanja Operasional + Transfer	4.892,43	3.169,18	64,78
	- Belanja Modal	594,05	335,09	56,41
	- Belanja Tidak Terduga	16,50	-	0,00
	Surplus/Defisit	-200,00	698,13	
3	3. Pembiayaan Daerah	389,70	698,74	179,30
	- Penerimaan	389,70	698,74	179,30
	- Pengeluaran	-	-	-
	SILPA Tahun Berkenan		1.396,87	

Sumber : BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah & Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulteng

2.1.1 Pendapatan APBD Pemprov Sulawesi Tengah

Realisasi pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 tercatat mengalami kontraksi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun ada perbedaan capaian antar komponen pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp1.635,28 miliar (76,86% dari target yang sebesar Rp5.302,98 miliar), sedangkan Pendapatan Transfer mencapai Rp2.527,55 miliar (79,64% dari target sebesar Rp3.173,58 miliar). Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pemerintah Pusat tumbuh positif, dengan capaian realisasi sebesar Rp39,58 miliar (2.051,51% dari target Rp1,93 miliar), meningkat

sebesar 1.323,32% (yoy) dibanding capaian periode sama tahun sebelumnya. Dari sisi komposisi, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi kontributor utama dengan porsi 60,15% terhadap total pendapatan daerah, diikuti Pajak Daerah sebesar 38,91%, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 0,94%.



Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan IV 2025 mengalami kontraksi dan tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode laporan, realisasi PAD mencapai 76,86% dari pagu anggaran, menurun dibandingkan capaian Triwulan IV 2024 yang sebesar 98,67%. Pelemahan kinerja PAD tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dengan porsi terhadap PAD sebesar 32,36%, yang terealisasi sebesar 80,92% dari pagu anggaran, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 119,19% dari pagu anggaran. Selain itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah juga mencatatkan perlambatan dengan realisasi sebesar 53,04% dari pagu anggaran, yang secara nominal terkontraksi sebesar 15,15% (yoy) atau senilai Rp376,96 miliar. Di sisi lain, kinerja retribusi daerah menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi melampaui target sebesar 114,33% atau Rp22,73 miliar, meningkat sebesar 30,51% (yoy).

Pada pos Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat periode Triwulan IV 2025 juga menunjukkan kontraksi dengan realisasi sebesar 26,18% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode pelaporan, realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tercatat senilai Rp2.527,55 miliar atau 79,64% dari pagu anggaran. Kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi belanja negara maupun perubahan formula

perhitungan transfer ke daerah. Perlu dicermati bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat masih relatif tinggi, tercermin dari kontribusinya yang mencapai 60,15% terhadap porsi total pendapatan daerah.

Tabel 2. 2. Realisasi Pendapatan APBD Prov. Sulteng (Rp Miliar)

URAIAN	2024-Q4			2025-Q4			% Growth
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	
PENDAPATAN DAERAH	5.150,06	5.459,29	106,00	5.302,98	4.202,41	79,25	-23,02
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.059,94	2.032,56	98,67	2.127,48	1.635,28	76,86	-19,55
Pajak Daerah	1.450,00	1.728,27	119,19	1.680,54	1.359,83	80,92	-21,32
Retribusi Daerah	25,78	17,42	67,56	19,88	22,73	114,33	30,51
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	230,10	51,24	22,27	50,10	-	-	-100,00
Lain-lain PAD yang Sah	354,06	235,62	66,55	376,96	199,93	53,04	-15,15
PENDAPATAN TRANSFER	3.087,54	3.423,95	110,90	3.173,58	2.527,55	79,64	-26,18
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.087,54	3.423,95	110,90	3.173,58	2.527,55	79,64	-26,18
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,58	2,78	107,88	1,93	39,58	2.051,51	1.323,32
Pendapatan Hibah	2,58	2,78	107,88	1,93	0,91	47,22	-67,24
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-	-	38,67	-	-

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulteng

Selain meninjau realisasi dan pertumbuhan per pos pendapatan, analisis keuangan daerah juga dapat dilakukan melalui penghitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Pada Triwulan IV 2025, IKF Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 0,47 (menuju kemandirian), meningkat dibandingkan rata-rata IKF dalam tujuh tahun terakhir yang berada pada level 0,33 (menuju kemandirian). Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja belanja daerah mulai menunjukkan perbaikan, meskipun struktur pembiayaan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, dengan kontribusi PAD yang relatif terbatas.

Tabel 2. 3. Indeks Kemandirian Fiskal dan Derajat Desentralisasi Fiskal (Rp Miliar)

Tahun	PAD	Pendapatan Lain	Belanja	Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
2018	1.008,10	2.844,40	3.627,24	0,28	26,17
2019	1.090,77	3.037,30	4.096,76	0,27	26,42
2020	1.122,67	3.070,66	3.810,42	0,29	26,77
2021	1.494,01	3.196,74	4.319,60	0,35	31,85
2022	1.559,44	3.359,94	4.822,63	0,32	31,70
2023	1.684,52	2.828,95	4.936,22	0,34	37,32
2024	2.032,56	3.426,73	5.490,81	0,37	37,23
2025	1.635,28	2.567,13	3.504,28	0,47	38,91
Rata-rata 2018 s.d. 2024	1.205,31	2.915,10	4.109,56	0,33	31,17

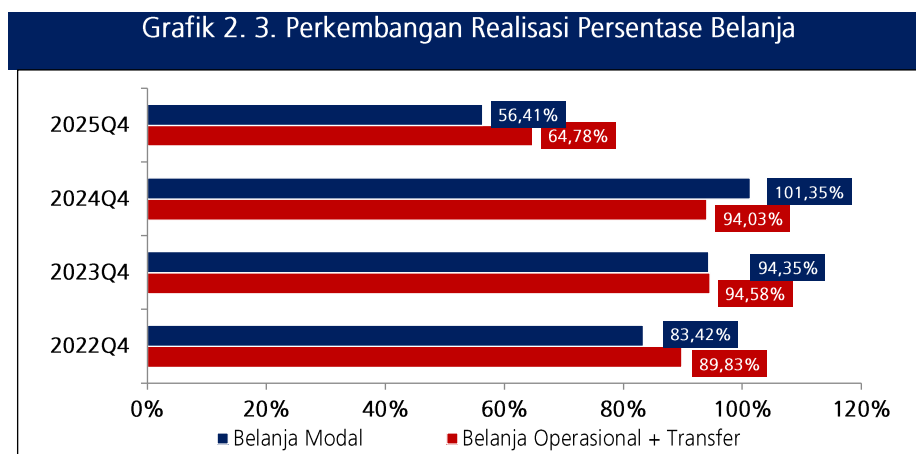
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulteng (diolah)

Analisis lanjutan terhadap kondisi keuangan daerah dilakukan melalui pengukuran Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari sumber pendapatan sendiri. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, DDF Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 38,91% dan berada pada kategori

(sedang), meningkat dibandingkan rata-rata capaian dalam tujuh tahun terakhir yang sebesar 31,17%. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kapasitas fiskal daerah, khususnya dari sisi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Meskipun demikian, struktur penerimaan daerah masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penguatan kemandirian fiskal ke depan perlu diarahkan pada optimalisasi dan diversifikasi sumber PAD yang berkelanjutan. Di sisi lain, efektivitas pemanfaatan dana transfer juga menjadi faktor kunci, terutama dalam mendorong belanja yang lebih produktif dan berdaya ungkit tinggi, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas wilayah, guna memperkuat aktivitas ekonomi serta mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang.

2.1.2 Belanja APBD Pemprov Sulawesi Tengah

Sejalan dengan perkembangan penerimaan daerah, realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 juga mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya, seiring dengan belum optimalnya realisasi Belanja Operasional dan Belanja Transfer. Pada periode pelaporan, realisasi belanja tercatat sebesar Rp3.504,28 miliar atau 63,68% dari pagu anggaran, mengindikasikan masih terbatasnya penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Komponen belanja dengan realisasi tertinggi adalah Belanja Barang dan Jasa yang mencapai 65,11% dari pagu anggaran dengan kontribusi sebesar 28,70% terhadap total Belanja Daerah, mencerminkan dominasi belanja yang bersifat rutin untuk mendukung operasional pemerintahan. Dari sisi struktur, belanja daerah masih didominasi oleh Belanja Operasional dan Transfer dengan porsi sebesar 90,44%, sementara Belanja Modal hanya berkontribusi sebesar 9,56%, relatif rendah untuk mendorong pembentukan aset dan peningkatan kapasitas produksi daerah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk belanja pembangunan masih terbatas.



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulteng

Akumulasi realisasi Belanja Operasional dan Transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2025 melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Operasional dan Transfer pada periode pelaporan tercatat sebesar Rp3.169,18 miliar atau 64,78% dari pagu anggaran, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 94,03%. Adapun keseluruhan pos pada Belanja Operasional dan Transfer mengalami penurunan, namun penurunan lebih lanjut tertahan oleh pos Belanja Pegawai yang mencatatkan realisasi sebesar Rp1.466,10 miliar atau 61,39% dari pagu anggaran Belanja Pegawai. Selain itu, komponen Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bagi Hasil juga turut mendorong realisasi, yang mana masing-masing sebesar Rp1.007,28 miliar dan Rp611,42 miliar.

Hingga Triwulan IV 2025, realisasi Belanja Modal tercatat sebesar Rp335,09 miliar atau 56,41% dari pagu anggaran, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.020,90 miliar atau 101,35% dari pagu. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan pada seluruh komponen utama belanja modal, khususnya Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang masing-masing memiliki porsi besar terhadap total belanja modal, yaitu sebesar 41,57% dan 31,56%. Dari sisi perencanaan, pagu Belanja Modal juga mengalami penurunan signifikan menjadi Rp594,05 miliar, dari sebelumnya Rp1.007,28 miliar pada tahun lalu, yang mencerminkan kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran seiring dengan keterbatasan fiskal daerah. Penurunan terdalam terjadi pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berkontraksi sebesar 74,10% (yoy) dengan realisasi Rp134,88 miliar, diikuti oleh Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang mengalami kontraksi 62,95% (yoy) dengan realisasi Rp59,84 miliar atau 40,29% dari pagu. Sementara itu, Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga mencatat kontraksi signifikan sebesar 58,88% (yoy) dengan realisasi Rp135,83 miliar. Kondisi ini sejalan dengan tren efisiensi anggaran yang juga terjadi di sejumlah pemerintah daerah lain, di mana belanja modal kerap menjadi komponen yang ditekan untuk mengendalikan belanja secara keseluruhan ketika pendapatan daerah melemah, sementara belanja yang bersifat rutin tetap diprioritaskan guna menjaga keberlangsungan layanan publik.

Tabel 2. 4. Realisasi Belanja APBD Prov. Sulteng (Rp Miliar)

URAIAN	2024-Q4			2025-Q4			% Growth
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	
BELANJA DAERAH	5.771,09	5.490,81	95,14	5.502,98	3.504,28	63,68	-36,18
BELANJA OPERASIONAL + TRANSFER	4.753,82	4.469,81	94,03	4.892,43	3.169,18	64,78	-29,10
Belanja Pegawai	2.076,59	1.584,20	76,29	2.388,35	1.466,10	61,39	-7,45
Belanja Barang dan Jasa	1.660,63	1.730,03	104,18	1.547,08	1.007,28	65,11	-41,78
Belanja Hibah	272,35	307,33	112,84	109,88	64,32	58,54	-79,07
Belanja Bantuan Sosial	17,00	17,65	103,83	38,38	4,21	10,98	-76,13
Belanja Bagi Hasil	708,14	813,05	114,81	806,50	611,42	75,81	-24,80
Belanja Bantuan Keuangan	19,10	17,55	91,88	2,25	15,85	704,44	-9,68
BELANJA MODAL	1.007,28	1.020,90	101,35	594,05	335,09	56,41	-67,18
Belanja Modal Tanah	147,27	1,70	1,16	-	-	-	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426,12	161,53	37,91	148,52	59,84	40,29	-62,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422,57	330,31	78,17	187,48	135,83	72,45	-58,88
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11,21	520,80	4643,82	246,95	134,88	54,62	-74,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,10	6,55	6898,18	11,11	4,53	40,80	-30,84
BELANJA TIDAK TERDUGA	10,00	0,11	1,09	16,50	-	-	-100,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulawesi Tengah & Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulteng

2.2. Perkembangan Realisasi APBN di Sulawesi Tengah

2.2.1 Pendapatan APBN di Sulawesi Tengah

Kinerja pendapatan APBN di Sulawesi Tengah tercatat mengalami kontraksi pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara sampai dengan periode pelaporan tercatat sebesar Rp8.256,50 miliar atau sekitar 109,56% dari pagu APBN, tercatat mengalami kontraksi sebesar 73,71% (yoy), jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp31.410,05 miliar atau 238,18% dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan negara di Sulawesi Tengah, tumbuh ditopang oleh Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional yang masing-masing sebesar 99,51% dan 117,93% dari total pendapatan APBN. Jika ditinjau berdasarkan jenis penerimaan pajak, komponen Penerimaan Pajak pajak dalam negeri pada tahun 2025, mencatatkan capaian sebesar 58,81% dari target penerimaan, namun pertumbuhan tercatat mengalami kontraksi sebesar 82,86% (yoy). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp3.013,46 miliar (36,50% total pendapatan APBN) disusul oleh Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp2.262,30 miliar (27,40% total pendapatan APBN).

Walaupun terdapat kontraksi pada penerimaan perpajakan, kinerja pendapatan secara keseluruhan tetap terdorong oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang didominasi oleh PPh Pasal 25/29 Badan. Hal ini merupakan imbas dari meningkatnya penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, khususnya yang berasal dari kegiatan usaha pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi. Selain itu, terdapat pertumbuhan signifikan pada penerimaan pajak lainnya khususnya pada jenis penerimaan Deposit Pajak yang tercatat tumbuh sebesar 278,03% (yoy). Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai Provinsi Sulawesi Tengah pada Desember 2025 didominasi oleh Bea Masuk sebesar 99,82%, diikuti oleh Cukai MMEA sebesar 0,01%, serta Denda Administrasi sebesar 0,17%.

Kinerja realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kondisi yang optimis, tercermin dari capaian realisasi yang melampaui target sebesar 154,15%, meski mengalami kontraksi sebesar 3,90% (yoy). Pada periode pelaporan, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp1.138,52 miliar, atau setara dengan 154,15% dari target yang ditetapkan. Secara tahunan, realisasi PNBP tersebut tercatat terkontraksi 3,90% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun mengalami kontraksi secara tahunan, kinerja PNBP tetap solid karena realisasinya telah melampaui target secara signifikan. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pendidikan, jasa kenavigasian, serta penerimaan izin masuk kembali (*re-entry permit*).

Tabel 2.5. Realisasi Pendapatan APBN Provinsi Sulawesi Tengah (Rp Miliar)

APBN di Wilayah Sulteng	2024-Q4			2025-Q4			% Growth
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	
A. PENDAPATAN	13.187,31	31.410,05	238,18	7.536,19	8.256,50	109,56	-73,71
I. Penerimaan Pajak	12.521,06	30.225,31	241,40	6.797,63	7.117,99	104,71	-76,45
Pajak Dalam Negeri	10.670,78	28.330,90	265,50	4.879,36	4.855,68	99,51	-82,86
Pajak Perdagangan Internasional	1.850,27	1.894,41	102,39	1.918,27	2.262,30	117,93	19,42
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	666,25	1.184,73	177,82	738,56	1.138,52	154,15	-3,90
Pendapatan BLU	332,96	804,92	241,75	390,22	734,95	188,34	-8,69
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	333,29	379,81	113,96	348,34	403,56	115,85	6,25

Sumber : Fiskal Regional Triwulan IV 2025 Kanwil DJPb Sulteng

2.2.2 Belanja APBN di Sulawesi Tengah

Realisasi belanja APBN di Provinsi Sulawesi Tengah hingga Triwulan IV Tahun 2025 juga tercatat mengalami kontraksi sebesar 10,84% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja Pemerintah pusat pada periode pelaporan mencapai Rp24.494,96 miliar atau 94,06% dari pagu APBN, lebih rendah 10,84 (yoy) jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV 2024 yang sebesar Rp27.473,75 miliar. Kontraksi pada realisasi belanja negara pada Triwulan IV 2025 terjadi pada kedua komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 18,25% (yoy) dan 7,42% (yoy).

Pada Triwulan IV 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat mengalami kontraksi, terutama pada pos Belanja Modal dan Belanja Barang yang belum terealisasi secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan implementasi kebijakan efisiensi anggaran, yang mendorong penyesuaian pola dan waktu penyerapan belanja pemerintah. Realisasi BPP tercatat sebesar Rp7.102,15 miliar, atau setara dengan 89,43% dari pagu APBN. Secara tahunan, kinerja realisasi BPP mengalami kontraksi sebesar 18,25% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan upaya Pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, di

tengah kebutuhan untuk tetap memastikan efektivitas belanja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kontraksi BPP utamanya didorong oleh Belanja Modal yang tercatat berkontraksi sebesar 37,66% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp952,90 miliar, serta Belanja Barang yang juga mengalami kontraksi sebesar 28,49% (yoy) dengan realisasi Rp3.072,93 miliar. Penurunan pada kedua jenis belanja ini menjadi krusial mengingat Belanja Modal berperan penting dalam pembentukan infrastruktur dan aset produktif, sementara Belanja Barang mendukung operasional pemerintahan dan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Meskipun demikian, kebijakan belanja pemerintah tetap diarahkan secara selektif untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dari fokus belanja pada program padat karya, bantuan sosial, serta dukungan terhadap infrastruktur dasar, yang secara anekdotal diharapkan mampu menjaga aktivitas ekonomi di daerah tetap berjalan, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, realisasi belanja Pemerintah pada periode pelaporan ini masih ditopang oleh tingginya serapan Belanja Pegawai, yang mencapai Rp3.062,72 miliar atau tumbuh 7,48% (yoy). Kinerja tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji, tunjangan, serta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri. Secara sektoral, realisasi Belanja Pegawai tertinggi tercatat pada Kementerian Agama sebesar 26,52%, diikuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar 24,75%, serta Kementerian Pertahanan sebesar 12,90%. Tingginya serapan pada kementerian/lembaga tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan belanja rutin yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan publik, stabilitas keamanan, serta fungsi pertahanan negara.

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) juga mencatat pertumbuhan sebesar 8,12% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp13,61 miliar atau setara dengan 97,75% dari pagu anggaran. Peningkatan realisasi bansos tersebut terutama didorong oleh penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk MTs/MIN/MAN, serta bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Optimalisasi belanja pegawai dan bansos ini diharapkan mampu menjaga daya beli rumah tangga, khususnya menjelang dan setelah periode hari besar keagamaan, serta mendukung keberlanjutan akses pendidikan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan demikian, meskipun ruang fiskal relatif terbatas akibat kebijakan efisiensi, belanja pemerintah tetap berperan sebagai penyangga stabilitas ekonomi daerah.

Sejalan dengan BPP, kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) pada Triwulan IV 2025 juga terkonsentrasi sebesar 7,42% (yoy), Pada periode pelaporan, realisasi belanja TKD mencapai Rp17.392,81 miliar atau sekitar 96,09% dari pagu APBN, lebih rendah dibandingkan realiasi periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp18.785,80 miliar atau 98,64% dari pagu APBN. Sementara itu, hanya terdapat dua komponen belanja yang mendorong peningkatan, antara lain DAK Non Fisik sebesar 17.47% (yoy), Dana Insentif Daerah yang naik sebesar 805,85% (yoy). Di sisi lain, penyaluran Dana Desa juga menunjukkan kontraksi sebesar 93,29% (yoy) dengan capaian realisasi sebesar Rp105,19 miliar atau 100% dari pagu anggaran. Dana ini dialokasikan untuk berbagai program, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penduduk miskin ekstrem, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 2. 6. Realisasi Belanja APBN Provinsi Sulawesi Tengah (Rp Miliar)

APBN di Wilayah Sulteng	2024-Q4			2025-Q4			% Growth
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	
B. BELANJA	27.956,46	27.473,75	98,27	26.042,17	24.494,96	94,06	-10,84
I. Belanja Pemerintah Pusat	8.911,36	8.687,95	97,49	7.941,92	7.102,15	89,43	-18,25
1. Belanja Pegawai	2.773,08	2.849,50	102,76	3.099,06	3.062,72	98,83	7,48
2. Belanja Barang	4.455,15	4.297,43	96,46	3.637,28	3.072,93	84,48	-28,49
3. Belanja Modal	1.670,44	1.528,43	91,50	1.191,66	952,90	79,96	-37,66
4. Belanja Bantuan Sosial	12,69	12,59	99,24	13,93	13,61	97,75	8,12
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	19.045,10	18.785,80	98,64	18.100,24	17.392,81	96,09	-7,42
1. Transfer Dana Perimbangan	17.325,15	17.068,98	98,52	16.499,86	15.946,83	96,65	-6,57
a. Dana Bagi Hasil	3.328,27	3.327,83	99,99	3.494,54	3.323,32	95,10	-0,14
b. Dana Alokasi Umum	10243,27	10.090,69	98,51	10.065,38	9.757,64	96,94	-3,30
c. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.655,37	1.589,75	96,04	485,48	445,26	91,71	-71,99
d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2.098,23	2.060,71	98,21	2.454,46	2.420,61	98,62	17,47
e. Dana Insentif Daerah	150,90	148,01	98,09	1.495,19	1.340,78	89,67	805,85
2. Dana Desa	1.569,05	1.568,81	99,98	105,19	105,19	100,00	-93,29
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)	-14.894,17	-12.987,53	87,20	-18.505,98	-16.238,46	87,75	25,03

Sumber : Kajian Fiskal Regional Triwulan IV 2025 Kanwil DJPb Sulteng

2.3. Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

2.3.1. Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

Berdasarkan data Triwulan IV 2025, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tercatat mengalami kontraksi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mencapai Rp15.366,13 miliar atau 75,31% dari total pagu anggaran yang ditetapkan. Realisasi ini tercatat mengalami kontraksi dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai Rp18.726,43 miliar (97,09% dari pagu anggaran). Perlu dicatat bahwa pagu anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah pada periode laporan ini adalah Rp 20.402,99 miliar, angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp19.287,77 miliar 2024 (5,78%, yoy).

Kinerja realisasi pendapatan pada mayoritas daerah yang terkonsentrasi tersebut didorong terutama oleh rendahnya realisasi pada pos pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang masih menjadi

sumber utama pendapatan daerah. Namun demikian, tidak semua daerah mencatatkan kontraksi. Terdapat dua Kabupaten yang tumbuh positif dalam realisasi pendapatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Kota Palu dan Banggai Laut yang masing-masing sebesar Rp1.689,03 miliar dan Rp616,69 miliar.

Berdasarkan capaian persentase realisasi, terdapat tiga Kabupaten/Kota dengan capaian persentase tertinggi yaitu: (i) Kabupaten Tojo Una-una menempati posisi tertinggi dengan realisasi pendapatan sebesar 93,38% dari pagu anggaran; (ii) Kota Palu dengan capaian realisasi sebesar 93,34% dari pagu anggaran; dan (iii) Kabupaten Tolitoli dengan capaian sebesar 91,52%. Mengingat masih terdapat Kabupaten/Kota yang capaian dan nilai realisasinya masih perlu di optimalkan lagi, diperlukan evaluasi lebih lanjut secara komprehensif. Evaluasi tersebut hendaknya mencakup analisis terhadap tingkat kemandirian fiskal masing-masing daerah, termasuk mengukur sejauh mana ketergantungan pada transfer dari Pemerintah Pusat serta mengidentifikasi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi penguatan dapat diarahkan pada diversifikasi sumber pendapatan, perbaikan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta eksplorasi peluang investasi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan capaian persentase realisasi pendapatan, terdapat tiga kabupaten/kota dengan kinerja tertinggi yaitu: Kabupaten Tojo Una-Una menempati posisi pertama dengan realisasi pendapatan sebesar 93,38% dari pagu anggaran, diikuti oleh Kota Palu dengan capaian 93,34%, serta Kabupaten Tolitoli dengan realisasi sebesar 91,52% dari pagu anggaran. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten/kota dengan capaian persentase dan nilai realisasi yang relatif lebih rendah, sehingga kinerjanya perlu terus dioptimalkan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas dan struktur pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, strategi penguatan fiskal daerah dapat diarahkan pada diversifikasi sumber pendapatan, perbaikan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta eksplorasi peluang investasi baru yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Tabel 2.7. Kinerja Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Rp Miliar)

Wilayah	2024-Q4			2025-Q4			Growth (%)	Rank
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi		
Poso	1.467,07	1.228,68	83,75	1.478,63	1.018,41	68,88	-17,11%	7
Donggala	1.395,88	1.476,58	105,78	1.527,02	1.148,00	75,18	-22,25%	8
Toli-Toli	1.176,33	1.245,14	105,85	1.209,56	1.106,96	91,52	-11,10%	4
Banggai	3.166,68	3.170,74	100,13	3.071,24	2.338,51	76,14	-26,25%	10
Buol	954,30	771,30	80,82	966,79	740,83	76,63	-3,95%	3
Morowali	2.028,97	1.942,14	95,72	2.622,06	1.419,33	54,13	-26,92%	12
Banggai Kepulauan	954,22	887,07	92,96	998,29	670,14	67,13	-24,45%	9
Parigi Moutong	1.712,04	1.664,22	97,21	1.846,35	1.387,26	75,14	-16,64%	6
Tojo Una-Una	1.262,51	1.355,99	107,40	1.252,91	1.170,01	93,38	-13,72%	5
Sigi	1.360,93	1.447,37	106,35	1.307,61	1.063,15	81,30	-26,55%	11
Banggai Laut	727,28	521,33	71,68	774,31	616,69	79,64	18,29%	1
Morowali Utara	1.429,85	1.554,78	108,74	1.538,64	997,81	64,85	-35,82%	13
Palu	1.651,72	1.461,09	88,46	1.809,57	1.689,03	93,34	15,60%	2
Total	19.287,77	18.726,43	97,09	20.402,99	15.366,13	75,31	-17,94%	

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulteng

2.3.2. Belanja APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

Kinerja belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan IV Tahun 2025 tercatat mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari realisasi belanja, baik secara nominal maupun persentase, yang mengalami penurunan sebesar 18,37% (yoy). Secara kumulatif, total realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp14.953,58 miliar atau setara dengan 70,70% dari total pagu anggaran. Meskipun secara persentase menunjukkan tingkat serapan yang relatif moderat, capaian tersebut mengindikasikan bahwa laju realisasi belanja masih tertahan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kontribusinya terhadap dorongan aktivitas ekonomi daerah belum optimal. Kontraksi belanja ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja modal, disertai perlambatan pada belanja operasional dan belanja transfer. Keterlambatan pelaksanaan proyek fisik dan penyesuaian alokasi anggaran yang menahan akselerasi belanja.

Meskipun demikian, secara akumulatif masih terdapat tantangan signifikan dalam optimalisasi penyerapan anggaran di sejumlah daerah. Rendahnya realisasi belanja berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi lokal serta berdampak pada kualitas dan cakupan layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi yang lebih mendalam terhadap hambatan struktural dan administratif dalam proses belanja, baik pada tahap perencanaan, pengadaan, maupun implementasi kegiatan.

Secara umum, kinerja realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan IV 2025 masih ditandai oleh rendahnya penyerapan pada komponen Belanja Operasional dan Belanja Modal. Kondisi ini menjadi faktor utama yang menahan capaian kinerja realisasi belanja daerah secara agregat pada periode tersebut. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya

perlambatan penyerapan anggaran di sebagian besar kabupaten yang berpotensi menunda pelaksanaan program pembangunan serta mengurangi efektivitas peran belanja pemerintah daerah sebagai instrumen stimulus fiskal bagi perekonomian lokal. Perlambatan ini juga mencerminkan masih terbatasnya akselerasi belanja produktif yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, di tengah kecenderungan kontraksi belanja yang terjadi pada hampir seluruh kabupaten/kota, terdapat beberapa daerah yang justru mencatat kinerja belanja yang relatif lebih baik. Kabupaten Morowali mencatat peningkatan paling tinggi dengan pertumbuhan realisasi belanja sebesar 18,95% (yoy), dengan total realisasi mencapai Rp1.849,08 miliar atau 64,55% dari pagu anggaran. Peningkatan ini mengindikasikan adanya akselerasi belanja yang lebih efektif, khususnya pada sektor-sektor yang terkait dengan aktivitas ekonomi utama daerah. Lebih lanjut, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu juga mencatat pertumbuhan realisasi belanja yang positif, masing-masing sebesar 14,11% (yoy) dan 6,20% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut menunjukkan adanya variasi kapasitas fiskal dan efektivitas pelaksanaan anggaran antar daerah, yang dapat menjadi referensi dalam mendorong perbaikan tata kelola dan percepatan belanja daerah secara lebih merata di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2. 8. Kinerja Belanja APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Rp Miliar)

Wilayah	2024-Q4			2025-Q4			Growth (%)	Rank
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi		
Poso	1.560,89	1.307,27	83,75	1.502,51	1.001,19	66,63	-23,41%	6
Donggala	1.413,08	1.559,10	110,33	1.524,02	1.074,45	70,50	-31,09%	12
Toli-Toli	1.198,12	1.178,65	98,38	1.209,56	887,49	73,37	-24,70%	8
Banggai	3.197,56	2.799,70	87,56	3.256,42	2.123,96	65,22	-24,14%	7
Buol	1.072,00	934,80	87,20	1.021,63	779,88	76,34	-16,57%	5
Morowali	2.512,36	1.574,70	62,68	2.864,60	1.849,08	64,55	17,42%	1
Banggai Kepulauan	998,86	971,76	97,29	1.040,72	679,89	65,33	-30,03%	11
Parigi Moutong	1.728,83	1.891,45	109,41	1.863,37	1.255,98	67,40	-33,60%	13
Tojo Una-Una	1.321,00	1.347,04	101,97	1.295,61	1.131,95	87,37	-15,97%	4
Sigi	1.414,26	1.361,79	96,29	1.371,69	987,38	71,98	-27,49%	10
Banggai Laut	724,28	453,69	62,64	775,64	517,70	66,74	14,11%	2
Morowali Utara	1.476,38	1.401,08	94,90	1.615,00	1.031,30	63,86	-26,39%	9
Palu	1.783,56	1.537,95	86,23	1.808,57	1.633,32	90,31	6,20%	3
Total	20.401,19	18.318,97	89,79	21.149,33	14.953,58	70,70	-18,37%	

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulteng



Bab III Inflasi Daerah

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar **3,31% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan Triwulan III 2025 yang sebesar **3,88% (yoy)**, terkendali pada kisaran sasarannya yang sebesar $2,5 \pm 1\%$. Penurunan inflasi pada triwulan IV 2025 tersebut terutama bersumber dari penurunan harga tomat, cabai rawit, dan bawang putih. Dari sisi permintaan, inflasi tersebut masih didominasi oleh **kelompok makanan, minuman, dan tembakau** dengan andil sebesar 1,74%, melandai jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,54%. Tekanan pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh komoditas pangan strategis seperti beras dan aneka ikan yang masih mengalami kenaikan harga secara tahunan. Lebih lanjut, **kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya** merupakan kontributor terbesar kedua dengan andil 0,88%, didorong oleh lonjakan harga emas perhiasan seiring tren kenaikan harga emas global. Sementara itu, kelompok pengeluaran lainnya relatif menunjukkan pergerakan yang lebih terkendali sejalan dengan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Inflasi Bulan Desember 2025

0,14%mtm

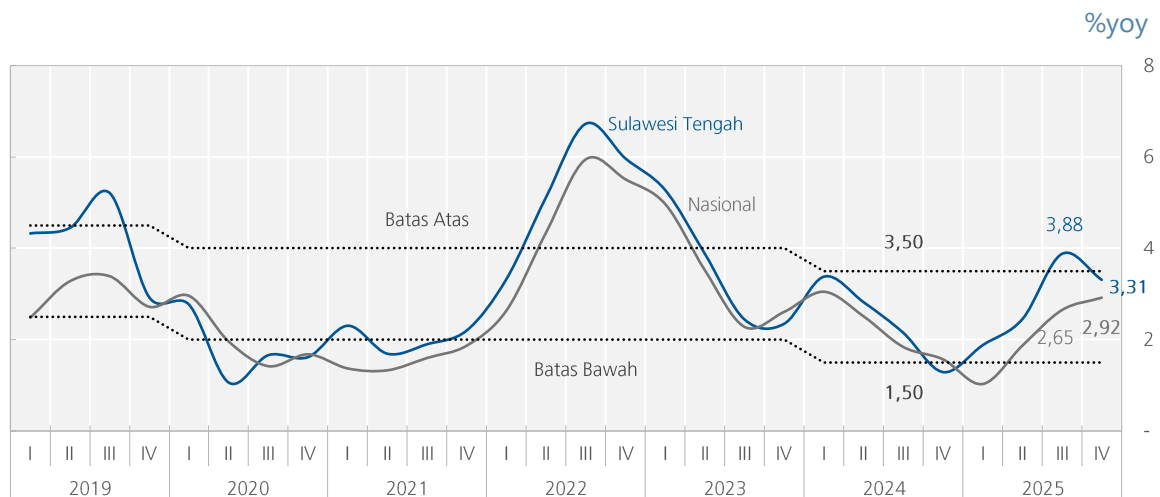
Inflasi Triwulan IV 2025

3,31%yoy

3.1. Perkembangan Umum Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,31% (yoy), berada di rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya melampaui target nasional sebesar 3,88% (yoy). Kebijakan moneter yang *pro-stability* serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah secara konsisten terus dilaksanakan demi tercapainya realisasi inflasi yang rendah dan stabil. Namun demikian, realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi inflasi nasional pada triwulan IV 2025 yaitu sebesar 2,92% (yoy), maupun rata-rata inflasi tiga tahun terakhir sebesar 2,32% (yoy).

Grafik 3. 1. Perkembangan Inflasi IHK Sulawesi Tengah dan Nasional (%yoy)



Sumber: BPS (diolah)

3.2. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Penurunan Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 utamanya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 5,68% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,74%, menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 8,26% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 2,54%. Penurunan inflasi pada kelompok tersebut didukung oleh deflasi pada sejumlah komoditas hortikultura di antaranya tomat, cabai rawit, dan bawang putih yang masing-masing sebesar 30,98% (yoy), 9,55% (yoy), dan 8,58% (yoy). Deflasi pada ketiga komoditas tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pasokan seiring masuknya masa panen dan membaiknya distribusi antarwilayah, sehingga tekanan harga di tingkat konsumen menurun secara signifikan. Penurunan inflasi lebih lanjut pada kelompok tersebut tertahan oleh inflasi beras, aneka ikan, dan cabai merah. Komoditas strategis dengan bobot besar khususnya beras dan aneka ikan tetap mempertahankan level harga yang relatif tinggi secara tahunan.

Tabel 3. 1. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

KELOMPOK PENGELUARAN	%PERUBAHAN HARGA (yoy)		%SUMBANGAN INFLASI (yoy)	
	TRIWULAN III 2025	TRIWULAN IV 2025	TRIWULAN III 2025	TRIWULAN IV 2025
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	8,26	5,68 ↓	2,54	1,74 ↓
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	0,22	-0,13 ↓	0,01	-0,01 ↓
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	1,39	0,92 ↓	0,22	0,15 ↓
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0,52	-0,06 ↓	0,03	-0,00 ↓
KESEHATAN	1,74	1,50 ↓	0,04	0,03 ↓
TRANSPORTASI	0,22	1,37 ↑	0,03	0,17 ↑
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	-0,10	-0,18 ↓	-0,01	-0,01 ↓
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	1,20	1,30 ↑	0,02	0,02 ↓
PENDIDIKAN	3,01	2,99 ↓	0,10	0,10 ↓
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	3,30	3,01 ↓	0,26	0,24 ↓
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	8,81	12,04 ↑	0,64	0,88 ↑

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 3. 2. Komoditas Penyumbang Inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode Triwulan IV 2025

KOMODITAS	Andil (%)
EMAS PERHIASAN	1,20
BERAS	0,50
IKAN LAYANG	0,45
IKAN KEMBUNG	0,12
CABAI MERAH	0,09
IKAN CAKALANG	0,09
BAHAN BAKAR RT	0,09
IKAN GORENG	0,08
IKAN SELAR	0,07
SIGARET KRETEK MESIN	0,07

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 3. 3. Komoditas Penyumbang Deflasi di Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode Triwulan IV 2025

KOMODITAS	Andil (%)
TOMAT	-0,08
CABAI RAWIT	-0,07
BAWANG PUTIH	-0,03
BAJU MUSLIM WANITA	-0,02
TELEPON SELULER	-0,01
TISSU	-0,01
SEPATU PRIA	-0,01
BLUS WANITA	-0,01
SEMEN	-0,01
CELANA PANJANG JEANS PRIA	-0,01

Sumber: BPS (diolah)

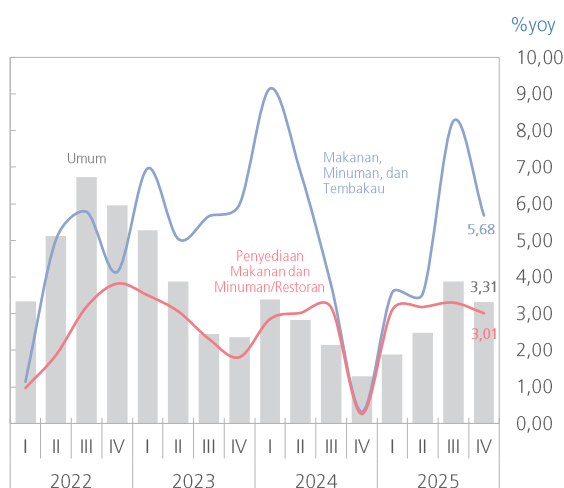
Tekanan pada komoditas perikanan mencerminkan adanya *supply-side constraint*, terutama akibat faktor cuaca dan meningkatnya biaya operasional nelayan, sehingga kenaikan biaya tersebut tertransmisi hingga di tingkat konsumen. Sementara itu, komoditas beras pada triwulan IV 2025 mencatat inflasi sebesar 8,88% (yoy), melandai dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 13,91% (yoy). Namun demikian, level harga yang telah meningkat signifikan pada periode sebelumnya masih mempertahankan tekanan inflasi tahunan pada tingkat yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses normalisasi harga berlangsung bertahap dan belum sepenuhnya kembali ke level sebelum lonjakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meredanya inflasi pangan pada triwulan IV 2025 lebih dipengaruhi oleh faktor *base effect* serta normalisasi harga, dibandingkan oleh penurunan harga yang bersifat menyeluruh.

Penurunan inflasi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 turut didukung oleh **kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran** yang mengalami inflasi 3,01% (yoy) dengan andil 0,24% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi triwulan III 2025 yang sebesar 3,30% (yoy) dengan andil sebesar 0,26%. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku usaha restoran melakukan *limited price adjustment*, seiring stabilisasi harga input. Dengan demikian, transmisi inflasi pangan ke sektor jasa makanan pada triwulan IV 2025 relatif terkendali dan tidak menunjukkan adanya *second-round effect* yang signifikan.

Inflasi pada aspek sandang, perumahan, dan rumah tangga tergolong moderat. Kelompok **perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga** pada triwulan IV 2025 mencatat inflasi sekitar 0,92–0,93% (yoy) dengan andil sekitar 0,14–0,15%, lebih rendah dibanding triwulan III 2025 sebesar 1,39% (yoy) dengan andil 0,22%, terutama dipengaruhi penurunan inflasi **bahan bakar rumah tangga** dan **sewa/kontrak rumah**. Selanjutnya, kelompok **perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga** mengalami deflasi 0,06% (yoy) dengan andil ~0,00%, melandai dari triwulan III 2025 sebesar 0,52% (yoy) dengan andil 0,03%, mencerminkan penurunan harga beberapa kebutuhan pemeliharaan rumah tangga, termasuk produk kebersihan dan sebagian peralatan rumah tangga.

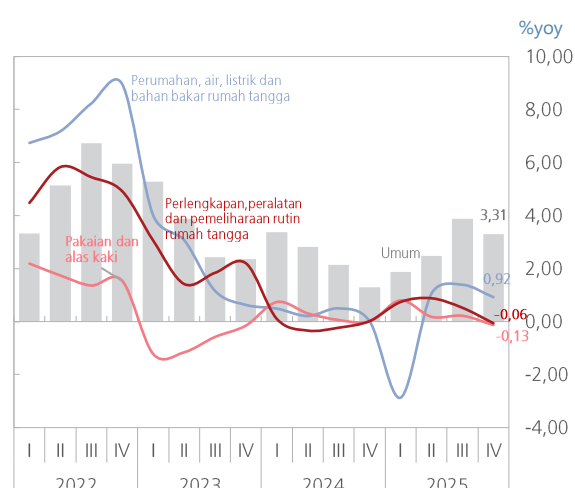
Adapun kelompok **pakaian dan alas kaki** turut mengalami deflasi 0,13% (yoy) dengan andil –0,01%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya 0,22% (yoy) dengan andil 0,01%, sejalan dengan pelemahan harga pada sejumlah komoditas sandang dan alas kaki antara lain pakaian muslim wanita celana jeans pria, serta alas kaki.

Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi (yoy) Pangan dan Restoran



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.3. Perkembangan Inflasi (yoy) Sandang, Perumahan, dan Rumah Tangga



Sumber: BPS (diolah)

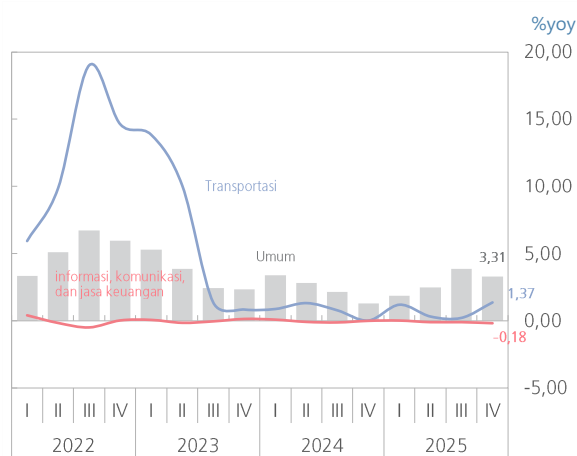
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya kembali mencatat inflasi tertinggi pada triwulan IV 2025 sebesar 12,04% (yoy) dengan andil 0,88%, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,81% (yoy) dengan andil 0,64%. Peningkatan inflasi pada kelompok tersebut terutama dipengaruhi oleh lonjakan indeks harga emas perhiasan yang pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 56,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 40,48% (yoy). Selain itu, subkelompok perawatan pribadi lainnya juga mencatat inflasi sebesar 33,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 23,37% (yoy). Dinamika ini mencerminkan kuatnya transmisi kenaikan harga emas global serta tingginya sensitivitas komoditas tersebut terhadap perkembangan eksternal.

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada triwulan IV 2025 mengalami deflasi sebesar 0,18% (yoy) dengan andil -0,01%, lebih dalam dibandingkan triwulan III 2025 yang mencatat deflasi 0,09% (yoy). Deflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga telepon seluler, yang secara tahunan mengalami deflasi 0,95% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi sebesar -1,04% (yoy), dengan andil -0,01%, serta pelemahan pada subkelompok peralatan informasi dan komunikasi yang mengalami deflasi sebesar 0,98% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang deflasi sebesar -0,65% (yoy). Pola ini mencerminkan tekanan harga yang didorong oleh intensitas persaingan pasar, serta siklus penyesuaian harga produk elektronik. Dengan demikian, kelompok ini tidak hanya menunjukkan tekanan inflasi yang minimal, tetapi juga berperan sebagai inflation dampener dalam struktur inflasi triwulan IV 2025, meskipun kontribusinya relatif terbatas secara agregat.

Kelompok pendidikan pada triwulan IV 2025 mencatat inflasi sebesar 2,99% (yoy) dengan andil 0,10%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 3,01% (yoy) dengan besaran andil yang sama. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyesuaian tarif pendidikan yang signifikan pada periode berjalan, sehingga tekanan harga relatif stabil, khususnya pada komoditas **akademi/ perguruan tinggi** dan layanan **bimbingan belajar** yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 3,45% (yoy) dan 29,11% (yoy).

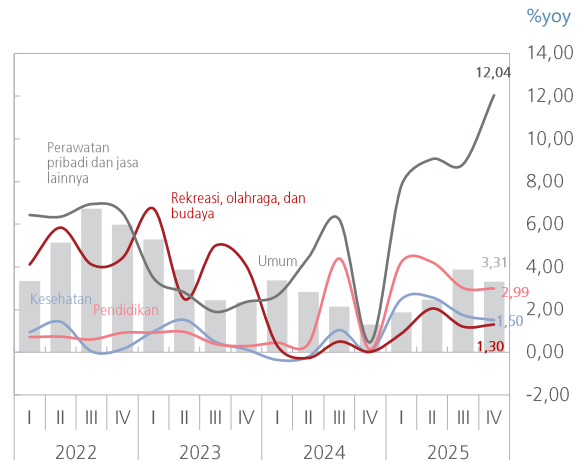
Kelompok kesehatan pada triwulan IV 2025 mencatat inflasi sebesar 1,50% (yoy) dengan andil 0,03%, lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan III 2025 yang sebesar 1,74% (yoy) dengan andil 0,04%. Penurunan inflasi pada kelompok ini mencerminkan relatif stabilnya harga pada komponen obat-obatan maupun jasa kesehatan. Sementara itu, **kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya** mencatat inflasi sebesar 1,30% (yoy) dengan andil 0,02% pada triwulan IV 2025, meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 1,20% (yoy) dengan besaran andil yang sama.

Grafik 3.4. Perkembangan Inflasi (yoy) Transportasi, Kominfo, dan Keuangan.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.5. Perkembangan Inflasi (yoy) Kesehatan, Pendidikan, Hiburan & Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

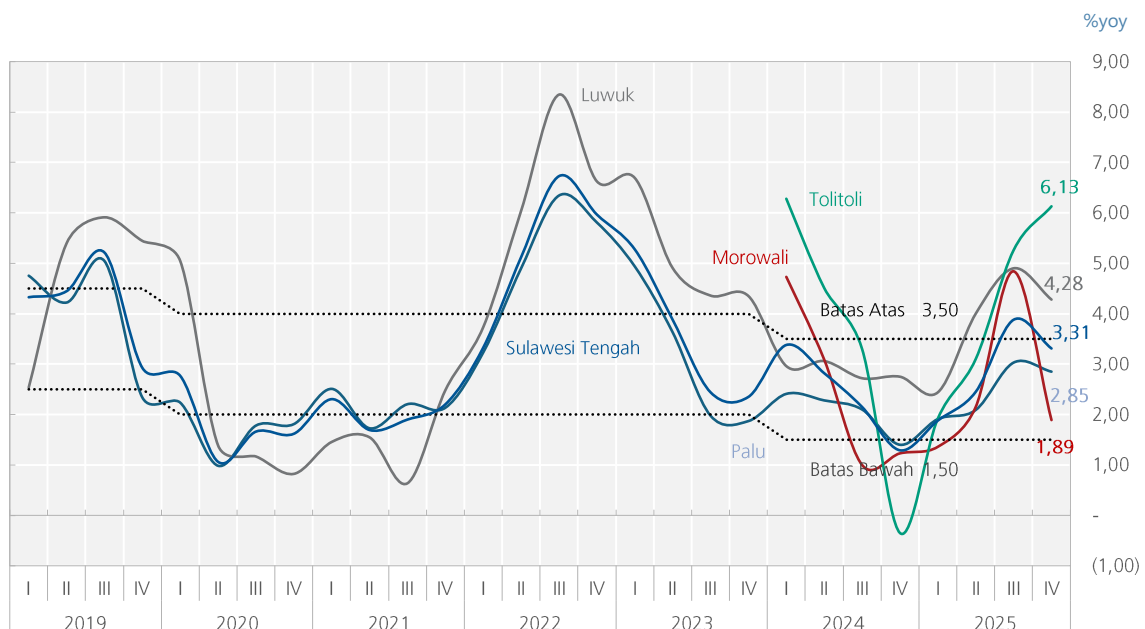


Sumber: BPS (diolah)

3.3. Perkembangan Inflasi Spasial

Secara spasial, inflasi pada empat wilayah penghitungan IHK di Sulawesi Tengah pada Triwulan IV 2025 menunjukkan dinamika yang divergen, sebagaimana tercermin pada pola pergerakan grafik dalam beberapa tahun terakhir (Grafik 3.6).

Grafik 3. 6. Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota IHK di Sulawesi Tengah (yoy)



Sumber: BPS (diolah)

Kota Palu mengalami inflasi sebesar 2,85% (yoy) pada Triwulan IV 2025, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang inflasi sebesar 3,03% (yoy), tetap berada dalam rentang sasaran

nasional $2,5\pm 1\%$ (yoy). Secara historis, Kota Palu memiliki pola inflasi yang relatif lebih stabil dibandingkan wilayah lainnya, dengan *magnitude* yang lebih moderat sejak 2019. Meskipun sempat mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 dan penurunan pada 2024 mendekati batas bawah target, pergerakan inflasi Kota Palu cenderung cepat kembali ke jalur stabil. Hal ini mengindikasikan struktur pasar yang lebih dalam, akses distribusi yang lebih baik, serta peran efektif TPID dalam menjaga stabilitas harga di pusat konsumsi utama provinsi.

Luwuk mengalami inflasi sebesar 4,29% (yoy) pada Triwulan IV 2025, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang inflasi sebesar 4,90% (yoy). Luwuk memiliki volatilitas yang relatif lebih tinggi, terutama saat puncak inflasi tahun 2022 yang melampaui wilayah lain. Setelah tren penurunan pada tahun 2023–2024, inflasi kembali meningkat pada tahun 2025 meskipun mulai melandai pada Triwulan IV 2025. Pola ini menunjukkan bahwa tekanan harga di Luwuk cenderung lebih persisten dan sensitif terhadap dinamika pasokan regional, sejalan dengan perannya sebagai simpul distribusi kawasan timur Sulawesi Tengah. Elastisitas harga terhadap gangguan pasokan relatif lebih tinggi.

Kabupaten Tolitoli mencatat inflasi tertinggi pada Triwulan IV 2025 yaitu sebesar 6,13% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang inflasi sebesar 5,26% (yoy). Kabupaten Tolitoli memiliki pola inflasi yang paling berfluktuasi dalam dua tahun terakhir. Setelah sempat turun tajam pada 2024 hingga di bawah batas bawah target, inflasi Tolitoli meningkat secara signifikan pada 2025, membentuk pola *V-shaped rebound*. Dinamika ini mengindikasikan tingginya kerentanan terhadap *supply-side shock*, terutama pada komoditas pangan dan perikanan yang sangat dipengaruhi faktor cuaca serta keterbatasan infrastruktur logistik. Tingginya volatilitas mencerminkan masih terbatasnya *buffer stock* dan sistem stabilisasi harga yang mampu meredam gejolak secara cepat.

Di sisi lain, Kabupaten Morowali mengalami inflasi sebesar 1,89% (yoy) pada Triwulan IV 2025, menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang inflasi sebesar 4,84% (yoy) dan berada dalam rentang target nasional. Kabupaten Morowali memperlihatkan pola inflasi yang cenderung *episodic*. Lonjakan yang terjadi pada pertengahan tahun 2025 tidak berlanjut secara persisten, dan pada triwulan IV 2025 inflasi kembali menurun tajam. Hal ini menunjukkan bahwa respons stabilisasi berjalan efektif dalam memulihkan keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran. Pergerakan tersebut menjadi sinyal positif bahwa transmisi kebijakan dan perbaikan pasokan mampu meredam tekanan harga.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan adanya disparitas antarwilayah yang relatif lebar pada Triwulan IV 2025. Kota Palu dan Kabupaten Morowali berada dalam zona inflasi terkendali, sementara Luwuk dan terutama Kabupaten Tolitoli masih menghadapi tekanan yang relatif tinggi. Pola ini menegaskan bahwa dinamika inflasi Sulawesi Tengah tidak bersifat homogen,

melainkan dipengaruhi oleh karakteristik struktur ekonomi, kedalaman pasar, serta kapasitas distribusi dan logistik masing-masing wilayah. Oleh karena itu, pendekatan pengendalian inflasi perlu semakin berbasis spasial (*region-specific intervention*) untuk mengurangi disparitas tekanan harga dan memperkuat stabilitas inflasi secara agregat provinsi.

3.4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Secara keseluruhan, dinamika inflasi Sulawesi Tengah pada Triwulan IV 2025 menunjukkan bahwa langkah-langkah penajaman **Framework 4K** perlu dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas harga di tengah tekanan sektoral dan disparitas spasial. Pada aspek **Keterjangkauan Harga**, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Tengah Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi tengah terus melaksanakan sidak pasar dan intervensi pasar murah/GPM berbasis prinsip 3T (**Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Lokasi**), terutama pada periode risiko inflasi tinggi dan wilayah dengan tekanan harga relatif kuat. Intervensi ini berkontribusi dalam meredam gejolak harga pangan serta menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap perluasan digitalisasi sistem pembayaran di pasar turut memperkuat transparansi transaksi dan efisiensi mekanisme harga di tingkat ritel.

Pada aspek **Ketersediaan Pasokan**, KPwBI Provinsi Sulawesi Tengah Bersama TPID se-Sulawesi Tengah terus mendorong penguatan sisi produksi melalui fasilitasi perluasan lahan pertanian (cetak sawah) dan perbaikan irigasi bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi domestik dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan, khususnya pada komoditas strategis yang selama ini menjadi kontributor utama inflasi. Dalam kerangka **Kelancaran Distribusi**, KPwBI mendukung kelancaran distribusi melalui subsidi ongkos angkut dari petani ke *offtaker*, serta pengembangan infrastruktur rantai dingin (*cold-chain infrastructure*) melalui Modular Cooling Systems (CoolLar) guna menjaga kualitas dan kesinambungan pasokan komoditas perikanan dan hortikultura. Koordinasi TPID juga terus diperkuat untuk mendorong perbaikan konektivitas distribusi dan menekan disparitas harga antarwilayah. Pada aspek **Komunikasi Efektif**, KPwBI Provinsi Sulawesi Tengah secara aktif mendorong penyajian data neraca pangan yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*) melalui pengembangan fitur Palu Pangan pada aplikasi Sangu Palu. Edukasi publik serta pengelolaan ekspektasi inflasi juga terus diperkuat melalui koordinasi rutin TPID tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Forum koordinasi tersebut menjadi wadah konsolidasi respons kebijakan, khususnya dalam menghadapi potensi tekanan musiman dan gangguan pasokan. Dengan implementasi penajaman 4K tersebut, pergerakan inflasi Triwulan IV 2025 yang menunjukkan moderasi di tingkat provinsi dan diharapkan dapat terus diperkuat demi menjaga stabilitas harga secara lebih terarah dan terkoordinasi.

Inovasi Program Unggulan TPID Kota Palu Dalam Rangka Penyajian Data Pangan Melalui Palu Pangan

Sebagai bagian dari penguatan pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kota Palu bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menginisiasi inovasi layanan digital *Palu Pangan* yang terintegrasi dalam aplikasi SanguPalu. Inisiatif ini wujud dari kolaborasi antar lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan selaras dengan arah kebijakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), khususnya pada aspek penguatan digitalisasi dan kualitas data pangan.

Pengembangan Palu Pangan tidak sekadar menghadirkan fitur informasi harga, tetapi membentuk satu ekosistem data pangan yang melibatkan lintas perangkat daerah dan mitra strategis. Melalui layanan ini, data harga pangan strategis, informasi pelaksanaan pasar murah, distribusi komoditas, serta kanal partisipasi masyarakat dihimpun dalam satu dashboard terpadu yang dapat dimanfaatkan baik oleh publik maupun pengambil kebijakan.

Layanan Palu Pangan memiliki beberapa fitur utama:

1. Pasar Murah

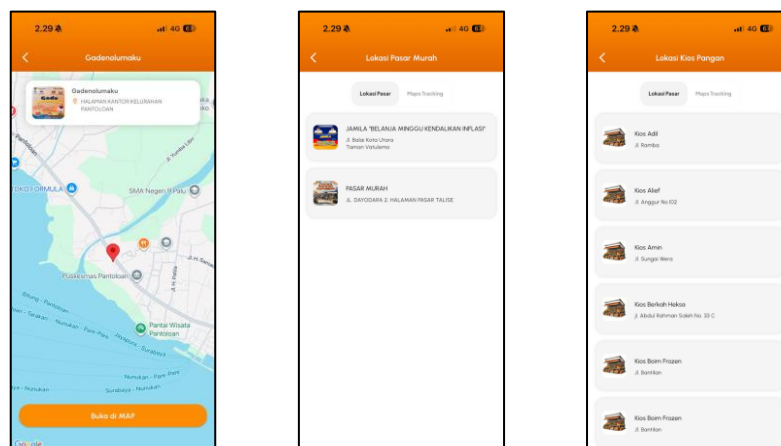
Memuat informasi lokasi pelaksanaan dan jadwal kegiatan pasar murah yang dilengkapi dengan fitur *Maps Tracking* untuk memudahkan masyarakat menemukan lokasi pelaksanaan pasar murah terdekat.

2. Kios Pangan

Direktori kios atau mitra distribusi pangan terjangkau yang terpetakan secara digital guna memperluas akses masyarakat terhadap komoditas strategis.

3. Gadenolumaku

Menampilkan rute dan jadwal mobil layanan pangan yang beroperasi secara bergerak, sehingga intervensi harga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas



4. Harga Pangan

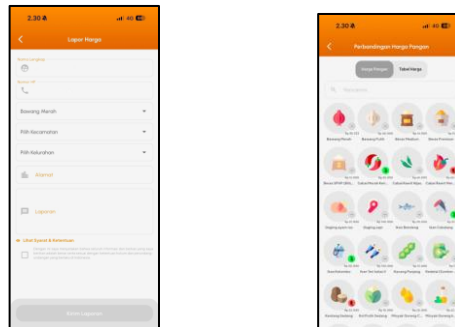
Fitur inti berupa penyajian harga komoditas strategis secara harian dengan indikator tren (naik, turun, stabil), serta visualisasi grafik untuk mendukung transparansi dan literasi data publik.

5. Lapor Harga

Kanal aduan khusus yang memungkinkan masyarakat melaporkan lonjakan harga atau kelangkaan komoditas. Laporan terhubung langsung dengan perangkat daerah dan TPID untuk diverifikasi serta ditindaklanjuti.

6. Data Statistik

Menyediakan ringkasan indikator pangan daerah dalam bentuk visualisasi ringkas yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya.



Melalui integrasi fitur tersebut, Palu Pangan tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai *early warning system* berbasis data yang memperkuat respons kebijakan dan akuntabilitas publik.

Dari perspektif kelembagaan, Pemerintah Kota Palu berperan sebagai pengelola operasional aplikasi dan penyedia data lapangan lintas OPD, sementara Bank Indonesia memberikan fasilitasi dalam kerangka penguatan koordinasi TPID, penyelarasan dengan kebijakan pengendalian inflasi nasional, serta dukungan konseptual dalam pengembangan sistem. Kolaborasi ini mendukung prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam interoperabilitas, konsolidasi data, dan efisiensi pengambilan keputusan.

Dengan integrasi data resmi dan partisipasi masyarakat dalam satu dashboard terpadu, Palu Pangan diharapkan menjadi fondasi tata kelola pangan daerah yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis data, sekaligus praktik baik sinergi kelembagaan dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kota Palu.



BAB IV Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM

- **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tetap terjaga,** meskipun pertumbuhan kredit melambat. Total kredit hanya tumbuh sekitar 0,61% (yoy), namun kondisi perbankan masih sehat dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 1,77% atau masih jauh di bawah batas aman 5%. Dana pihak ketiga (DPK) juga tetap tumbuh dan semakin didominasi tabungan, sehingga likuiditas bank tetap kuat. Secara sektoral, kredit konsumsi dan industri masih menopang pertumbuhan, sementara sektor pertambangan dan konstruksi menunjukkan tekanan. Dari sisi wilayah, kontraksi kredit di Kota Palu cukup memengaruhi kinerja agregat, meskipun beberapa daerah seperti Banggai masih tumbuh baik.
- **Sektor UMKM dan rumah tangga masih cukup tahan, namun perlu perhatian.** Kredit UMKM berkontraksi -9,44% (yoy), walaupun secara umum NPL UMKM masih terkendali di 1,70%. Beberapa daerah seperti Donggala, Banggai Kepulauan, dan Morowali Utara masih memiliki tingkat kredit bermasalah yang tinggi sehingga perlu pengawasan lebih ketat. Di sisi lain, optimisme masyarakat kembali meningkat, terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik ke level 135,19 dan berada di zona optimis. Perbankan syariah juga mencatat pertumbuhan yang kuat, baik dari sisi aset maupun pembiayaan. Secara keseluruhan, kondisi sistem keuangan Sulawesi Tengah tetap stabil, namun kewaspadaan tetap diperlukan terutama pada sektor dan wilayah dengan risiko kredit yang lebih tinggi.

4.1. Stabilitas Keuangan Daerah

4.1.1. Asesmen Sumber Kerentanan dan Potensi *Shock* Sektor Korporasi

a) Perkembangan Harga Komoditas Utama Sulawesi Tengah

Pada triwulan IV 2025, perkembangan harga komoditas global masih menunjukkan tekanan terhadap sektor korporasi Sulawesi Tengah, meskipun dengan dinamika yang sedikit berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi energi, harga LNG Jepang turun menjadi USD 11,19/mmbtu dari USD 11,73/mmbtu pada triwulan III 2025. Harga gas alam Eropa juga menurun menjadi USD 10,26/mmbtu dari USD 11,29/mmbtu, sementara harga gas alam Amerika Serikat meningkat menjadi USD 3,75/mmbtu dari USD 3,03/mmbtu. Secara umum, perkembangan ini mengindikasikan bahwa tekanan biaya energi relatif terkendali bagi industri pengolahan di Sulawesi Tengah, khususnya smelter dan industri hilir logam, sehingga risiko dari sisi kenaikan input energi cenderung menurun. Namun demikian, volatilitas harga energi global tetap perlu diwaspadai mengingat potensi shock geopolitik atau gangguan pasokan yang dapat mendorong kenaikan harga secara tiba-tiba.

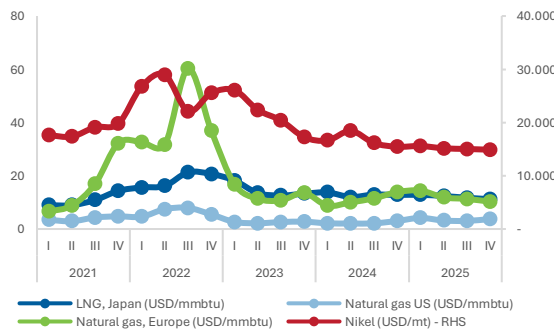
Di sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis nikel, harga nikel kembali melemah menjadi USD 14.882,29/mt pada triwulan IV 2025, turun tipis dibandingkan USD 15.029,64/mt pada triwulan sebelumnya. Tren pelemahan ini mencerminkan masih kuatnya kondisi oversupply global di tengah ekspansi kapasitas produksi, sementara pertumbuhan permintaan global, khususnya dari industri kendaraan listrik, belum sepenuhnya mampu menyerap tambahan pasokan tersebut. Kondisi ini berpotensi menekan pendapatan ekspor dan memperketat margin usaha industri pengolahan logam dasar di Sulawesi Tengah, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan struktur ekonomi yang terkonsentrasi pada industri berbasis nikel, koreksi harga lebih lanjut berpotensi menjadi sumber risiko sistemik terhadap kinerja korporasi dan kemampuan pembayaran kewajiban keuangan.

Pada sektor pertanian, tekanan harga juga masih terlihat. Harga kakao turun signifikan menjadi USD 2.639,23/mt dari USD 3.841,46/mt pada triwulan III 2025, mencerminkan normalisasi pasokan global dan koreksi harga setelah lonjakan pada periode sebelumnya. Penurunan ini berpotensi menekan pendapatan petani dan pelaku usaha pengolahan kakao di daerah. Harga jagung meningkat tipis menjadi USD 3,99/bushel dari USD 3,81/bushel, namun masih berada pada level yang relatif rendah sehingga belum mampu mendorong perbaikan pendapatan petani secara signifikan. Sementara itu, harga minyak kelapa sawit (CPO) turun menjadi USD 1.002,30/mt dari USD 1.011,73/mt, dan harga coconut oil juga terkoreksi menjadi USD 2.436,57/mt dari USD 2.726,65/mt. Meskipun level harga coconut oil masih relatif tinggi

secara historis, koreksi tersebut mengurangi dorongan positif yang sebelumnya menopang subsektor kelapa.

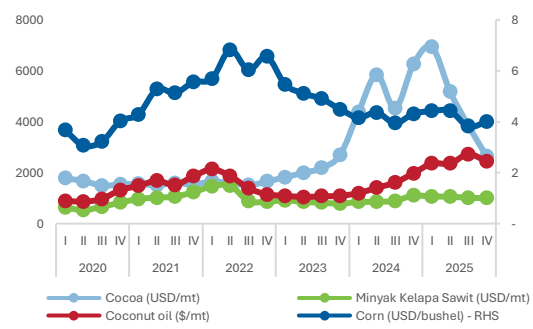
Secara keseluruhan, sumber kerentanan sektor korporasi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 masih didominasi oleh risiko harga komoditas global, terutama nikel dan kakao. Pelemahan harga berpotensi menekan profitabilitas, arus kas, dan kapasitas pembayaran kewajiban korporasi, khususnya pada sektor yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, tekanan dari biaya energi relatif mereda sehingga memberikan sedikit ruang stabilisasi bagi dunia usaha. Dengan mempertimbangkan tingginya konsentrasi ekonomi daerah pada industri pengolahan berbasis nikel, volatilitas harga komoditas global tetap menjadi potensi shock utama terhadap stabilitas keuangan daerah pada periode ini.

**Grafik 4. 1. Harga Komoditas Dunia LU
Pertambangan (Nikel dan LNG)**



Sumber: Bloomberg, METI, pink sheet, diolah

**Grafik 4. 2. Harga Komoditas Dunia LU
Pertanian**



Sumber: Bloomberg, METI, pink sheet, diolah

b) Perkembangan Kinerja Negara Mitra Dagang

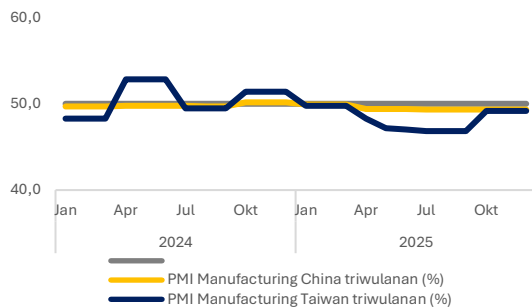
Kinerja negara mitra dagang utama Indonesia pada triwulan IV 2025 menunjukkan pelemahan aktivitas manufaktur yang relatif lebih jelas dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari mayoritas PMI yang berada di bawah level ekspansi (50). PMI Manufaktur Tiongkok secara triwulanan tercatat sebesar 49,33%, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 49,93%, mengindikasikan kontraksi tipis namun berkelanjutan pada sektor industri. Secara bulanan, PMI Tiongkok pada Oktober–Desember 2025 masing-masing sebesar 49,8; 49,0; dan 49,2, menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur masih tertahan di zona kontraksi. Kondisi ini mencerminkan permintaan domestik dan eksternal Tiongkok yang belum pulih kuat, sehingga berpotensi menahan permintaan terhadap komoditas mineral, termasuk nikel dan produk turunannya dari Sulawesi Tengah.

Taiwan sebagai salah satu pusat manufaktur global, khususnya pada rantai pasok elektronik dan semikonduktor, juga menunjukkan tekanan. PMI Manufaktur Taiwan secara triwulanan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 49,17%, membaik dibandingkan triwulan III 2025 (46,83%) namun masih berada di bawah ambang ekspansi. Secara bulanan, PMI Taiwan meningkat dari 47,9 pada Oktober menjadi 48,8 pada November dan 50,8 pada Desember, yang mengindikasikan adanya perbaikan di akhir tahun meskipun pemulihan belum merata. Perkembangan ini memberi sinyal bahwa permintaan industri global mulai menunjukkan tanda stabilisasi, namun belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan permintaan bahan baku secara signifikan.

Sementara itu, Jepang juga masih berada dalam fase kontraksi ringan. PMI Manufaktur Jepang secara triwulanan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 49,00%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 49,10%. Secara bulanan, PMI Jepang bergerak pada kisaran 48,5–49,8 selama Oktober–Desember 2025. Hal ini mencerminkan aktivitas industri yang masih tertahan akibat lemahnya permintaan global dan penyesuaian produksi. Dengan posisi Jepang sebagai mitra dagang penting untuk produk hilir dan komoditas energi, kondisi ini mengindikasikan permintaan impor yang cenderung moderat.

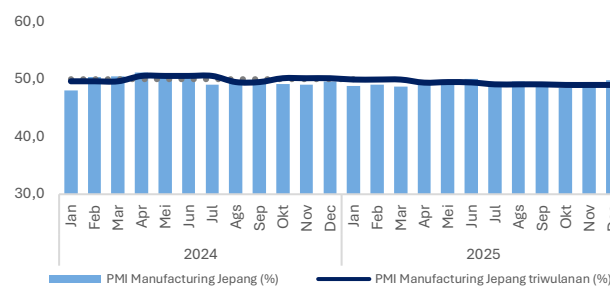
Secara keseluruhan, pada triwulan IV 2025 negara mitra dagang utama Indonesia—khususnya Tiongkok, Taiwan, dan Jepang—masih berada pada fase kontraksi ringan atau pemulihan yang belum solid di sektor manufaktur. Bagi Sulawesi Tengah yang sangat bergantung pada ekspor berbasis nikel dan komoditas pertanian, kondisi ini menandakan bahwa risiko pelemahan permintaan eksternal masih cukup tinggi. Walaupun terdapat indikasi stabilisasi di akhir tahun, momentum pemulihan global belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan signifikan pada volume dan harga ekspor daerah. Dengan demikian, perkembangan kinerja negara mitra dagang pada triwulan IV 2025 masih menjadi faktor eksternal yang perlu diwaspadai dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik 4. 3. Perkembangan PMI Tiongkok dan Taiwan



Sumber: National Bureau of Statistics of China, National Development Council Taiwan, diolah

Grafik 4. 4. Perkembangan PMI Jepang



Sumber : IHS Markitt

4.1.1.1. Kinerja Sektor Korporasi

Pada triwulan IV 2025, kinerja sektor korporasi di Sulawesi Tengah menunjukkan perbaikan yang lebih solid dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari peningkatan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) SKDU menjadi 18,48% dari 15,75% pada triwulan III 2025. Kenaikan ini mengindikasikan membaiknya persepsi pelaku usaha terhadap kondisi kegiatan usaha, terutama dari sisi produksi dan permintaan. Secara historis, level SBT tersebut masih berada di bawah capaian tinggi tahun 2023–2024, namun menunjukkan tren penguatan dibandingkan awal tahun 2025. Untuk triwulan I 2026, SBT diproyeksikan melambat menjadi 2,20%, yang mengindikasikan potensi normalisasi aktivitas usaha pasca periode akhir tahun.

Persepsi dunia usaha sektoral menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Sektor pertanian mencatat peningkatan signifikan menjadi 11,52% dari 5,62% pada triwulan III 2025. Perbaikan ini sejalan dengan mulai stabilnya harga beberapa komoditas serta peningkatan aktivitas panen pada akhir tahun, meskipun volatilitas harga kakao dan komoditas global masih menjadi faktor risiko. Kenaikan persepsi ini mengindikasikan membaiknya ekspektasi pendapatan dan produksi di subsektor perkebunan dan tanaman pangan.

Sektor pertambangan mencatat persepsi sebesar 2,30%, menurun dari 3,55% pada triwulan sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha di tengah tren pelemahan harga nikel global dan permintaan eksternal yang belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, sektor ini tetap berada di zona positif, menunjukkan bahwa aktivitas produksi di kawasan industri pengolahan nikel masih berjalan relatif stabil, meskipun margin usaha menghadapi tekanan.

Sektor industri mengalami koreksi lebih dalam dengan persepsi sebesar -0,46% setelah sebelumnya berada pada 0,45%. Masuknya sektor industri ke area kontraksi mengindikasikan

fase konsolidasi lanjutan, khususnya pada industri hilirisasi berbasis nikel yang terdampak oleh normalisasi harga dan permintaan global. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspansi industri tidak lagi sekuat periode 2022–2024 dan pelaku usaha cenderung menahan ekspansi kapasitas baru.

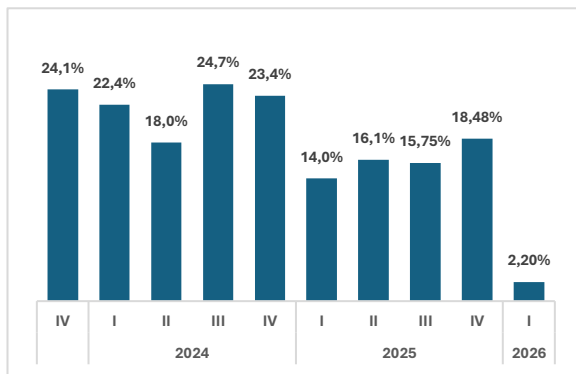
Sektor konstruksi menunjukkan perbaikan meskipun masih berada dalam zona negatif, dengan indeks -2,38% dari -3,57% pada triwulan III 2025. Perbaikan ini mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas proyek, baik pemerintah maupun swasta, meskipun belum cukup kuat untuk membawa sektor kembali ke area ekspansi. Realisasi proyek infrastruktur dan pembangunan kawasan industri tetap menjadi faktor penentu pemulihan sektor ini ke depan.

Sektor perdagangan mencatat perlambatan tipis menjadi 2,14% dari 2,62%. Meskipun menurun, sektor ini masih berada pada zona positif, mencerminkan stabilnya konsumsi rumah tangga dan distribusi barang menjelang akhir tahun. Aktivitas perdagangan tetap ditopang oleh kebutuhan rutin masyarakat dan aktivitas industri, meskipun tidak mengalami lonjakan signifikan.

Sektor transportasi menunjukkan perbaikan tipis menjadi 0,14% dari 0,00%, mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik yang mengikuti pergerakan produksi dan perdagangan. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan-minum tetap berada pada level 0,00%, menunjukkan bahwa permintaan jasa perhotelan dan MICE belum mengalami pemulihan berarti, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja dan terbatasnya agenda berskala besar.

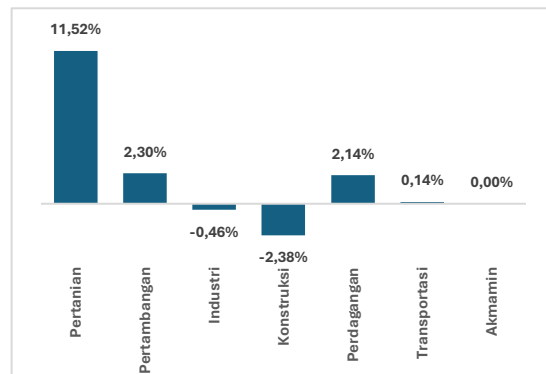
Secara keseluruhan, kinerja sektor korporasi pada triwulan IV 2025 menunjukkan penguatan yang lebih merata dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama ditopang oleh sektor pertanian dan perbaikan konstruksi. Namun demikian, tekanan pada sektor industri dan moderasi pertambangan mencerminkan bahwa risiko eksternal, khususnya terkait harga komoditas dan permintaan global, masih membayangi dunia usaha. Dengan proyeksi perlambatan SBT pada triwulan I 2026, pelaku usaha diperkirakan akan kembali bersikap lebih berhati-hati, sehingga upaya penguatan permintaan domestik, percepatan proyek strategis, dan peningkatan nilai tambah industri tetap menjadi kunci menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan sektor korporasi daerah.

Grafik 4. 5. Persepsi Dunia Usaha



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia

Grafik 4. 6. Perkembangan Dunia Usaha



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia

4.1.1.2. Perkembangan Eksposur Perbankan Kepada Korporasi

Pada triwulan IV 2025, eksposur perbankan kepada korporasi di Sulawesi Tengah menunjukkan pemulihan yang cukup kuat dari sisi pertumbuhan kredit, sejalan dengan membaiknya sentimen dunia usaha pada akhir tahun dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan modal kerja maupun investasi pada beberapa sektor utama. Secara agregat, pertumbuhan kredit daerah berbalik meningkat menjadi 12,64% (yoy) pada Desember 2025, jauh lebih tinggi dibandingkan posisi September 2025 yang nyaris stagnan (0,05% yoy). Akselerasi ini mengindikasikan pergeseran sikap perbankan yang mulai lebih ekspansif pada sektor-sektor tertentu, meskipun tetap disertai kehati-hatian mengingat kualitas kredit pada beberapa lapangan usaha masih menunjukkan risiko yang meningkat.

Pada sektor pertambangan, kredit mengalami pembalikan yang sangat tajam. Setelah berkontraksi -27,83% (yoy) pada triwulan III 2025, pertumbuhan kredit sektor pertambangan melonjak menjadi 25,89% (yoy) pada triwulan IV 2025. Kenaikan kredit ini mengindikasikan meningkatnya permintaan pembiayaan, baik untuk kebutuhan operasional maupun restrukturisasi modal kerja di tengah penyesuaian harga komoditas. Namun, akselerasi ini perlu dicermati secara hati-hati karena berpotensi mencerminkan konsolidasi pembiayaan pada debitur besar, termasuk refinancing, bukan semata ekspansi riil. Dari sisi kualitas, nilai NPL pertambangan pada Desember 2025 tercatat sekitar Rp84,15 miliar, relatif terkendali dibandingkan total portofolio sektor ini, sehingga risiko kredit secara umum masih terjaga meskipun volatilitas harga nikel tetap menjadi faktor kerentanan utama.

Sektor industri pengolahan juga kembali menjadi motor utama ekspansi kredit. Pertumbuhan kredit industri meningkat signifikan menjadi 38,73% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan 4,19% (yoy) pada triwulan III 2025. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan pembiayaan pada korporasi industri, terutama yang terkait aktivitas hilirisasi dan penguatan

kapasitas produksi/*working capital* pada akhir tahun. Dari sisi kualitas, NPL industri menurun tajam hingga sekitar Rp20,44 miliar, mengindikasikan perbaikan profil risiko dan tetap menunjukkan sektor ini sebagai salah satu portofolio yang paling sehat dalam kredit korporasi daerah.

Sektor pertanian mempertahankan tren pertumbuhan yang stabil dan cenderung menguat. Pertumbuhan kredit pertanian naik menjadi 6,53% (yoy) dari 6,47% (yoy) pada triwulan III 2025, menunjukkan kesinambungan penyaluran pembiayaan ke subsektor produksi dan perdagangan hasil pertanian/perkebunan. Meski demikian, kualitas kredit sektor ini masih perlu menjadi perhatian karena nominal NPL pertanian meningkat menjadi sekitar Rp368,94 miliar, yang menandakan risiko struktural pada segmen usaha kecil dan kerentanan terhadap fluktuasi harga serta faktor cuaca masih cukup kuat.

Sektor konstruksi masih berada dalam tekanan meskipun menunjukkan perbaikan bertahap. Pertumbuhan kredit konstruksi tetap berkontraksi -10,94% (yoy), membaik dibandingkan -13,81% (yoy) pada triwulan III 2025. Artinya, perbankan masih menahan ekspansi kredit di sektor ini seiring permintaan proyek yang belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, kualitas kredit konstruksi memburuk dengan NPL meningkat menjadi sekitar Rp158,81 miliar, mengindikasikan tekanan arus kas kontraktor yang masih tinggi dan menjadi salah satu sumber risiko utama bagi perbankan daerah.

Sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan pertumbuhan yang moderat namun membaik. Pertumbuhan kredit perdagangan meningkat menjadi 2,10% (yoy) dari 1,18% (yoy) pada triwulan III 2025, mencerminkan stabilnya kebutuhan modal kerja terutama menjelang periode akhir tahun. Namun, risiko kredit sektor ini masih perlu dicermati karena NPL perdagangan tetap tinggi, yakni sekitar Rp299,79 miliar pada Desember 2025, menandakan bahwa meskipun penyaluran kredit meningkat, kualitas pembayaran sebagian debitur belum sepenuhnya solid.

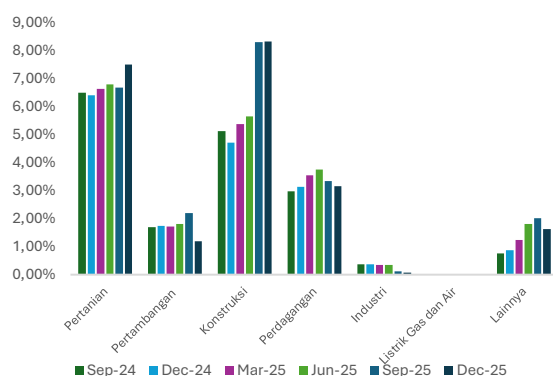
Sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum kembali menunjukkan penguatan kredit menjadi 13,16% (yoy), meningkat dari 9,25% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Ini mencerminkan adanya perbaikan aktivitas usaha dan pembiayaan di sektor jasa terkait pariwisata dan konsumsi. Meski demikian, NPL sektor ini masih tercatat sekitar Rp9,96 miliar, relatif kecil secara nominal namun tetap perlu diawasi mengingat sektor ini sensitif terhadap perubahan permintaan dan kebijakan belanja.

Sementara itu, beberapa sektor menunjukkan sinyal pelemahan atau kontraksi. Kredit perikanan semakin tertekan dengan kontraksi -11,59% (yoy), mengindikasikan melemahnya pembiayaan pada subsektor tersebut, sejalan dengan tantangan produksi dan pemasaran. Kredit

listrik, gas, dan air juga masih berkontraksi -14,61% (yoy), sementara transportasi kembali melemah -9,76% (yoy) setelah kontraksi tajam pada triwulan III. Selain itu, sektor perantara keuangan tetap berkontraksi -24,88% (yoy), mencerminkan berlanjutnya penurunan eksposur pada subsektor ini.

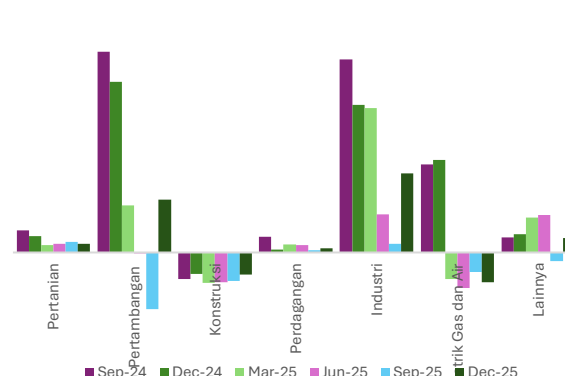
Secara keseluruhan, triwulan IV 2025 menunjukkan bahwa eksposur perbankan kepada korporasi di Sulawesi Tengah kembali ekspansif, terutama didorong oleh lonjakan kredit pada sektor industri pengolahan dan pembalikan kuat pada sektor pertambangan. Namun, penguatan tersebut masih disertai sumber kerentanan pada kualitas kredit di beberapa sektor, terutama konstruksi, perdagangan, serta pertanian. Ke depan, peningkatan kredit perlu diimbangi dengan penguatan manajemen risiko, pemantauan ketat pada debitur sektor yang volatil terhadap harga komoditas, serta mitigasi risiko kredit pada sektor-sektor yang masih mengalami tekanan arus kas agar stabilitas perbankan daerah tetap terjaga.

Grafik 4. 7. NPL Kredit Bank Sektor Korporasi (%)



Sumber : Laporan Bank Umum Bank Indonesia

Grafik 4.8. Pertumbuhan Kredit Sektor Korporasi (yoy)



Sumber : Laporan Bank Umum Bank Indonesia

4.1.2. Asesmen Sektor Rumah Tangga

4.1.2.1. Sumber Kerentanan Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2025, ketahanan sektor rumah tangga di Sulawesi Tengah menunjukkan penguatan yang lebih nyata dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini serta perbaikan ekspektasi ke depan. Meski demikian, sumber kerentanan rumah tangga tetap perlu dicermati, terutama terkait dinamika harga pangan yang masih berpotensi bergejolak, ketimpangan akses distribusi komoditas di wilayah terpencil, serta tekanan pada kelompok berpendapatan rendah yang ruang konsumsinya relatif sempit. Selain itu, stabilitas kemampuan bayar rumah tangga masih perlu dijaga mengingat sebagian segmen pekerjaan informal masih rentan terhadap fluktuasi pendapatan dan kenaikan biaya hidup.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan IV 2025 meningkat signifikan menjadi 135,19 dari 126,41 pada triwulan III 2025. Kenaikan ini mengindikasikan penguatan optimisme rumah tangga dan membaiknya keyakinan dalam melakukan konsumsi, khususnya menjelang periode akhir tahun yang umumnya diikuti peningkatan aktivitas ekonomi, perputaran perdagangan, dan kebutuhan konsumsi musiman. Peningkatan IKK juga menunjukkan bahwa rumah tangga merespons kondisi ekonomi yang lebih kondusif dengan sikap yang lebih percaya diri, tercermin dari perbaikan komponen kondisi saat ini maupun ekspektasi.

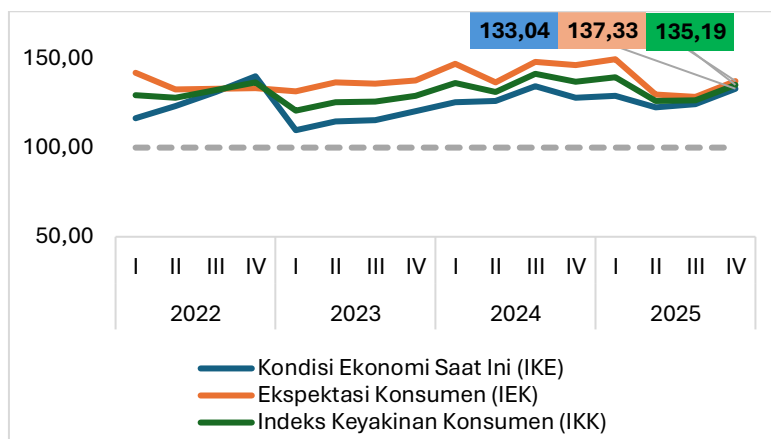
Komponen Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat naik tajam menjadi 133,04 dari 124,37 pada triwulan sebelumnya. Perbaikan IKE ini mencerminkan persepsi yang lebih baik terhadap pendapatan rumah tangga, ketersediaan lapangan kerja, serta daya beli. Kenaikan yang cukup kuat menandakan bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga pada triwulan sebelumnya mulai mereda, didorong oleh stabilisasi aktivitas usaha, peningkatan peluang pendapatan musiman, serta tetap terjaganya aktivitas konsumsi domestik di daerah.

Di sisi lain, **Ekspektasi Konsumen (IEK) juga meningkat menjadi 137,33 dari 128,44 pada triwulan III 2025,** menunjukkan berkurangnya kehati-hatian rumah tangga dalam memandang prospek ekonomi ke depan. Kenaikan IEK mengindikasikan bahwa rumah tangga menilai peluang perbaikan ekonomi dalam jangka pendek masih terbuka, termasuk prospek pendapatan dan lapangan kerja. Meskipun demikian, level IEK triwulan IV 2025 masih lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 (149,56), menandakan bahwa optimisme ke depan belum kembali sekuat awal tahun dan masih dipengaruhi ketidakpastian eksternal, terutama perlambatan permintaan global dan volatilitas harga komoditas yang dapat berdampak tidak langsung pada aktivitas ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, **asesmen sektor rumah tangga pada triwulan IV 2025 menunjukkan penguatan optimisme dan perbaikan kondisi ekonomi yang dirasakan, dengan seluruh indikator Survei Konsumen tetap berada jauh di atas ambang optimis (100).** Namun, ketahanan rumah tangga tetap perlu diperkuat melalui upaya menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat kelancaran distribusi ke wilayah terpencil, serta mendorong penciptaan peluang kerja dan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan daya beli dan mitigasi risiko biaya hidup tetap menjadi kunci agar perbaikan sentimen rumah tangga dapat terkonversi menjadi konsumsi yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

4.1.2.2. Asesmen Tingkat Optimisme Rumah Tangga

Grafik 4. 7. Hasil Survei Konsumen



Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

4.1.2.3. Eksposur Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2025, eksposur perbankan kepada sektor rumah tangga di Sulawesi Tengah terus menunjukkan ekspansi yang relatif solid, meskipun dengan dinamika kualitas kredit yang perlu dicermati. Total outstanding kredit rumah tangga meningkat menjadi Rp25,70 triliun pada Desember 2025, naik dari Rp25,13 triliun pada triwulan III 2025 dan Rp24,56 triliun pada triwulan II 2025. Secara tahunan, pertumbuhan kredit rumah tangga tercatat sebesar 6,46% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan 6,40% pada triwulan III 2025. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli dan kebutuhan pembiayaan rumah tangga masih terjaga, didukung oleh perbaikan persepsi konsumen pada akhir tahun.

Kredit rumah, ruko, dan apartemen tetap menjadi kontributor utama dengan outstanding mencapai Rp4,42 triliun, tumbuh 22,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 20,37% pada triwulan III 2025. Peningkatan ini mencerminkan permintaan properti residensial yang masih kuat serta dukungan kebijakan pembiayaan perumahan yang akomodatif. Dari sisi kualitas, rasio NPL segmen ini justru membaik menjadi 1,50% dari 1,67% pada triwulan sebelumnya, mengindikasikan bahwa meskipun ekspansi kredit cukup tinggi, kemampuan bayar debitur relatif terjaga.

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) kembali mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 69,60% (yoy) dengan outstanding mencapai Rp60,81 miliar. Meskipun laju pertumbuhan melambat dibandingkan 96,02% pada triwulan III 2025, ekspansi tetap tergolong sangat tinggi secara

historis. Kualitas kredit KKB semakin membaik dengan rasio NPL turun signifikan menjadi 0,35% dari 0,66%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan kendaraan masih berada dalam batas risiko yang terkendali, meskipun ekspansi cepat tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak memicu peningkatan risiko di masa mendatang apabila kondisi pendapatan rumah tangga melemah.

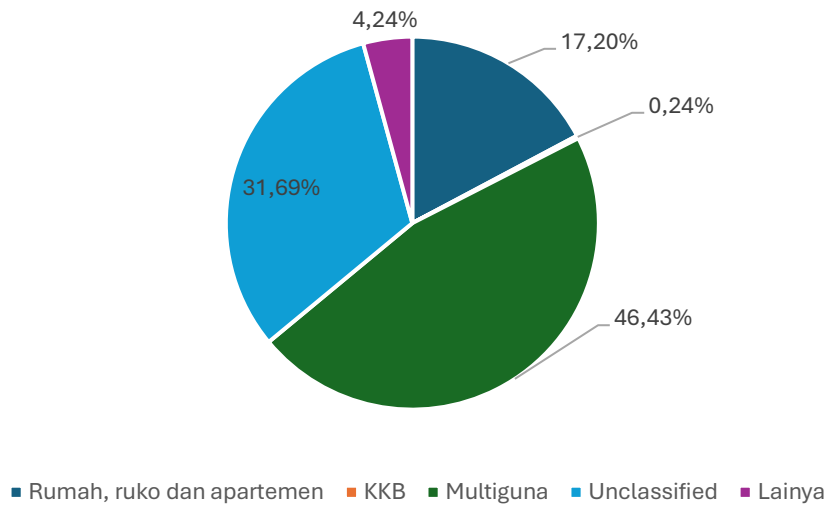
Kredit multiguna tumbuh moderat sebesar 1,91% (yoy) dengan outstanding Rp11,93 triliun. Pertumbuhan yang relatif stabil ini mencerminkan sikap rumah tangga yang tetap berhati-hati dalam mengambil pinjaman konsumtif tambahan. Rasio NPL multiguna menurun tipis menjadi 0,91% dari 0,93%, menunjukkan kualitas kredit yang tetap sehat dan relatif stabil di tengah tekanan biaya hidup yang masih dirasakan sebagian masyarakat.

Sementara itu, kredit pada kategori unclassified meningkat menjadi Rp8,14 triliun, namun pertumbuhan yoy melambat menjadi 5,04%. Rasio NPL pada kategori ini turun tipis menjadi 2,62% dari 2,70% pada triwulan sebelumnya, meskipun masih menjadi yang tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian segmen rumah tangga masih menghadapi tekanan kemampuan bayar, sehingga kategori ini tetap menjadi titik perhatian dalam pengelolaan risiko kredit.

Kategori lainnya juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 10,25% (yoy) dan outstanding Rp1,14 triliun, sementara rasio NPL relatif stabil di 1,27%. Secara agregat, rasio NPL kredit rumah tangga turun menjadi 1,57% pada triwulan IV 2025 dari 1,63% pada triwulan III 2025, mengindikasikan perbaikan kualitas kredit secara umum meskipun ekspansi tetap berlangsung.

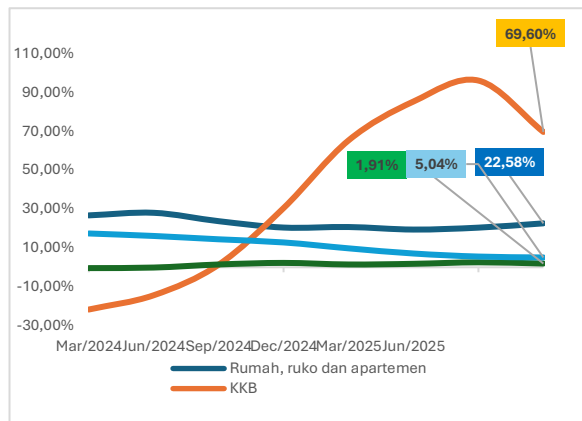
Secara keseluruhan, pada triwulan IV 2025 eksposur perbankan terhadap sektor rumah tangga tetap tumbuh positif dan relatif sehat. Pertumbuhan terutama ditopang oleh kredit properti dan KKB, dengan kualitas kredit yang secara umum membaik. Namun demikian, perbankan tetap perlu mewaspadai potensi tekanan daya beli apabila terjadi kenaikan harga pangan atau perlambatan pendapatan, terutama pada segmen kredit konsumtif yang sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Penguatan manajemen risiko dan pemantauan terhadap kategori unclassified tetap menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembiayaan rumah tangga ke depan.

Grafik 4. 8. Pangsa Kredit RT



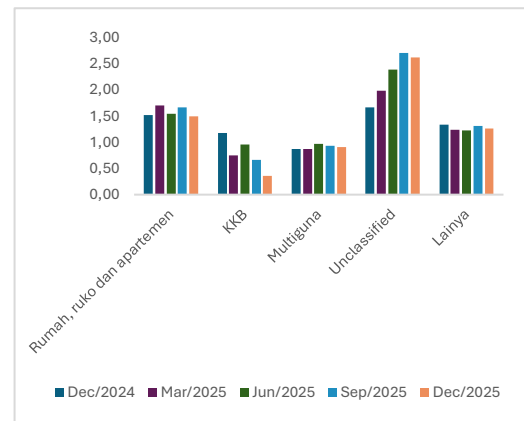
Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 4. 9. Pertumbuhan Kredit RT (yoy)



Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 4. 10. NPL Kredit RT (%)



Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

4.1.3. Asesmen Sektor Perbankan Sulawesi Tengah

4.1.3.1. Kinerja Bank Umum

Pada triwulan IV 2025, kinerja Bank Umum di Sulawesi Tengah menunjukkan perbaikan yang lebih solid dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun tantangan likuiditas masih menjadi isu utama. Total aset perbankan meningkat menjadi Rp69,36 triliun dari Rp67,84 triliun pada triwulan III 2025. Namun demikian, secara tahunan pertumbuhan aset masih melambat menjadi 1,19% (yoy), turun dari 3,72% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspansi perbankan masih berlangsung, tetapi dalam laju yang lebih moderat dibandingkan periode 2023–2024.

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp37,41 triliun, relatif stabil dibandingkan Rp37,51 triliun pada triwulan III 2025. Secara tahunan, pertumbuhan DPK sedikit membaik menjadi 4,99% (yoy) dari 4,97% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menempatkan dana di perbankan tetap terjaga, meskipun suku bunga DPK kembali turun menjadi 1,09% dari 1,33% pada triwulan sebelumnya. Penurunan suku bunga simpanan mencerminkan strategi bank untuk menekan cost of fund di tengah likuiditas yang masih ketat.

Penyaluran kredit mengalami penguatan pada akhir tahun. Kredit Bank Umum meningkat menjadi Rp59,08 triliun dari Rp56,51 triliun pada triwulan III 2025. Secara tahunan, pertumbuhan kredit kembali positif menjadi 0,61% (yoy), membaik dari kontraksi -0,66% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pemulihan ini mencerminkan peningkatan permintaan pembiayaan menjelang akhir tahun, baik dari sektor korporasi maupun rumah tangga. Meski demikian, laju pertumbuhan kredit masih jauh lebih rendah dibandingkan periode ekspansi tinggi pada 2023–2024, sehingga menunjukkan bahwa siklus kredit berada pada fase normalisasi.

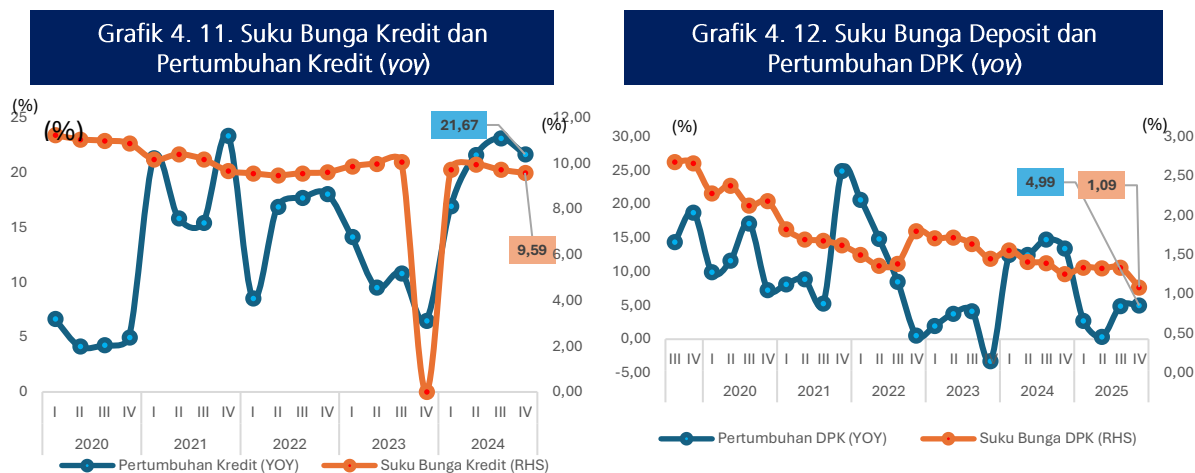
Loan to Deposit Ratio (LDR) kembali meningkat menjadi 157,93% dari 150,63% pada triwulan III 2025. Kenaikan ini menandakan likuiditas perbankan kembali mengetat, seiring akselerasi kredit yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan DPK. Level LDR yang berada jauh di atas 100% menunjukkan bahwa ekspansi kredit masih ditopang oleh sumber pendanaan non-DPK atau optimalisasi likuiditas internal. Kondisi ini menjadi perhatian karena ruang ekspansi kredit ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan bank meningkatkan dana murah.

Dari sisi kualitas aset, **NPL Gross membaik menjadi 1,77% dari 1,95% pada triwulan sebelumnya.** Penurunan ini menunjukkan perbaikan kemampuan bayar debitur serta efektivitas upaya restrukturisasi dan pengelolaan risiko kredit. Meskipun demikian, rasio NPL tetap perlu dicermati karena masih terdapat tekanan pada beberapa sektor usaha yang sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas dan perlambatan aktivitas ekonomi. Secara umum, level NPL masih berada di bawah ambang batas 5% dan tergolong sehat.

Suku bunga kredit kembali turun menjadi 9,43% dari 9,66% pada triwulan III 2025. Penurunan ini mencerminkan adanya ruang pelonggaran margin untuk mendorong permintaan pembiayaan dan menjaga kualitas portofolio kredit. Di sisi lain, turunnya suku bunga DPK mempersempit spread, namun membantu menjaga profitabilitas di tengah tekanan likuiditas.

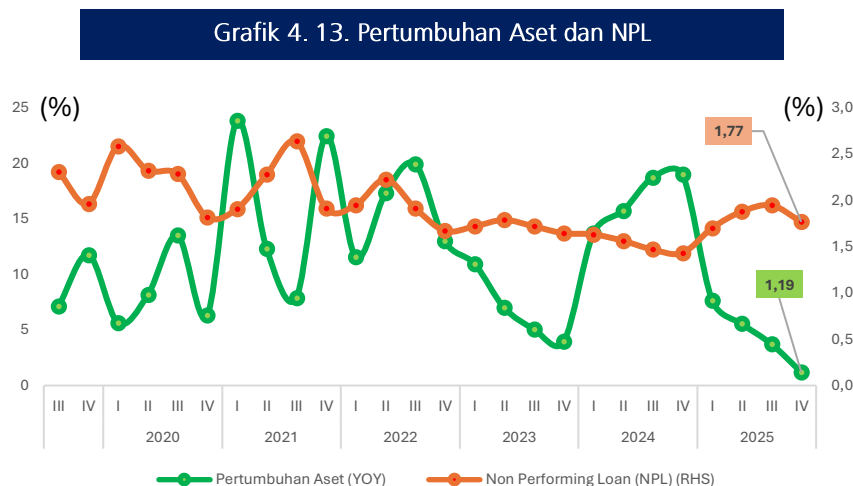
Secara keseluruhan, pada triwulan IV 2025 kinerja perbankan Sulawesi Tengah menunjukkan pemulihan pada sisi kredit dan perbaikan kualitas aset, meskipun pertumbuhan aset masih melambat dan likuiditas tetap ketat. Tantangan utama perbankan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan stabilitas pendanaan, terutama melalui penguatan

penghimpunan dana murah serta selektivitas pembiayaan pada sektor-sektor dengan profil risiko rendah. Dengan NPL yang membaik dan kredit kembali tumbuh positif, stabilitas sistem perbankan daerah secara umum tetap terjaga, namun ruang ekspansi yang sehat akan sangat ditentukan oleh dinamika DPK dan kondisi ekonomi regional pada awal 2026.



Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia



Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Tabel 4. 1. Perkembangan Indikator Kinerja Bank Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Aspek	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Aset	54.298	54.248	55.097	57.608	61.730	62.772	65.411	68.539	66.455	66.259	67.844	69.357
Dana Pihak Ketiga	30.860	32.072	31.137	31.411	34.721	36.087	35.736	35.632	35.677	36.217	37.514	37.411
Giro	7.573	7.290	7.295	6.966	10.482	11.197	11.041	9.596	9.529	9.561	10.834	9.528
Deposito	6.038	6.429	5.952	5.025	5.598	5.025	4.844	4.325	4.647	4.852	4.947	4.342
Tabungan	17.249	18.353	17.889	19.421	18.642	19.866	19.851	21.710	21.501	21.803	21.732	23.542
Kredit (Jenis Penggunaan)	44.985	44.338	46.190	48.266	52.601	53.922	56.884	58.725	56.780	56.363	56.505	59.082
Modal Kerja	18.527	18.348	19.471	20.067	23.535	23.444	24.364	24.605	21.342	16.918	16.939	17.200
Investasi	5.570	4.792	5.041	5.958	6.338	7.377	8.899	9.981	11.105	14.888	14.433	16.183
Konsumsi	20.889	21.198	21.678	22.241	22.728	23.101	23.621	24.139	24.332	24.558	25.134	25.699
LDR (%)	145,77	138,25	148,35	153,66	151,50	149,42	159,18	164,81	159,15	155,63	150,63	157,93
NPL	773	793	794	794	858	842	835	841	966	1.058	1.099	1.044
NPL Gross (%)	1,72	1,79	1,72	1,64	1,63	1,56	1,47	1,43	1,70	1,88	1,95	1,77
Suku Bunga DPK (%)	1,71	1,72	1,64	1,45	1,56	1,41	1,40	1,26	1,34	1,33	1,33	1,09
Suku Bunga Kredit (%)	9,88	10,00	10,08	10,05	9,74	9,97	9,73	9,59	9,68	9,72	9,66	9,43

Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Pada triwulan IV 2025, kinerja Bank Umum di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan penguatan terbatas di tengah tren perlambatan tahunan yang masih berlangsung. Total aset meningkat menjadi Rp69,36 triliun dari Rp67,84 triliun pada triwulan III 2025. Namun secara tahunan, pertumbuhan aset kembali melambat menjadi 1,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan 3,72% (yoy) pada triwulan sebelumnya dan jauh di bawah capaian dua digit pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspansi neraca perbankan masih berlangsung, tetapi dalam laju yang semakin moderat seiring fase normalisasi siklus kredit.

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp37,41 triliun, relatif stabil dibandingkan Rp37,51 triliun pada triwulan III 2025. Secara tahunan, DPK tumbuh 4,99% (yoy), sedikit meningkat dari 4,97% pada triwulan sebelumnya. Komposisi DPK menunjukkan pergeseran yang cukup jelas, di mana tabungan meningkat menjadi Rp23,54 triliun dengan pertumbuhan 8,44% (yoy), menjadi penopang utama stabilitas pendanaan. Sementara itu, giro kembali berkontraksi 0,72% (yoy) dan deposito tumbuh sangat terbatas 0,39% (yoy). Pola ini mencerminkan preferensi masyarakat terhadap instrumen simpanan yang lebih fleksibel di tengah suku bunga DPK yang turun menjadi 1,09% dari 1,33% pada triwulan III 2025.

Penyaluran kredit mengalami akselerasi pada akhir tahun. Total kredit meningkat menjadi Rp59,08 triliun dari Rp56,51 triliun pada triwulan III 2025. Secara tahunan, pertumbuhan kredit kembali positif sebesar 0,61% (yoy), membaik dari kontraksi -0,66% pada triwulan sebelumnya. Dari sisi jenis penggunaan, kredit investasi tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan tinggi 62,13% (yoy), mencerminkan masih kuatnya pembiayaan proyek dan ekspansi kapasitas usaha. Kredit konsumsi tumbuh stabil 6,46% (yoy), sejalan dengan terjaganya daya beli rumah tangga. Sebaliknya, kredit modal kerja masih berkontraksi dalam sebesar -30,10% (yoy), menunjukkan kehati-hatian pelaku usaha dalam meningkatkan aktivitas produksi jangka pendek di tengah ketidakpastian ekonomi.

Loan to Deposit Ratio (LDR) kembali meningkat menjadi 157,93% dari 150,63% pada triwulan III 2025. Kenaikan ini menunjukkan likuiditas perbankan yang kembali menegang akibat pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan DPK. Level LDR yang berada di atas 150% menandakan bahwa ruang ekspansi kredit masih bergantung pada optimalisasi sumber pendanaan non-DPK atau strategi penguatan dana murah, sehingga pengelolaan likuiditas tetap menjadi tantangan utama perbankan daerah.

Dari sisi kualitas aset, kinerja menunjukkan perbaikan. NPL Gross turun menjadi 1,77% dari 1,95% pada triwulan III 2025, dengan nominal NPL menurun menjadi Rp1,04 triliun dari Rp1,10 triliun. Penurunan ini mengindikasikan membaiknya kemampuan bayar debitur serta efektivitas

pengelolaan risiko kredit, terutama pada sektor-sektor yang sebelumnya mengalami tekanan. Secara umum, rasio NPL masih berada di bawah 2% dan dalam kategori sehat.

Suku bunga kredit kembali turun menjadi 9,43% dari 9,66% pada triwulan sebelumnya, menunjukkan adanya ruang penyesuaian suku bunga untuk menjaga daya tarik pembiayaan. Penurunan suku bunga kredit diikuti oleh turunnya suku bunga DPK, sehingga spread tetap terjaga meskipun tekanan likuiditas meningkat.

Secara keseluruhan, pada triwulan IV 2025 kinerja Bank Umum di Sulawesi Tengah menunjukkan perbaikan pada penyaluran kredit dan kualitas aset, namun pertumbuhan aset masih melambat dan likuiditas kembali menegang. Struktur kredit yang didominasi pertumbuhan investasi dan konsumsi, serta kontraksi berlanjut pada modal kerja, mencerminkan dinamika sektor riil yang belum sepenuhnya pulih merata. Ke depan, penguatan penghimpunan dana murah, pengelolaan likuiditas yang prudent, serta selektivitas penyaluran kredit akan menjadi kunci menjaga stabilitas perbankan daerah di tengah dinamika ekonomi 2026.

4.1.3.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum

Pada triwulan IV 2025, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum di Sulawesi Tengah relatif stabil dengan total DPK sebesar Rp37,41 triliun, sedikit menurun dibandingkan Rp37,51 triliun pada triwulan III 2025. Secara tahunan, pertumbuhan DPK tetap terjaga pada 4,99% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan 4,97% pada triwulan sebelumnya. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi normalisasi musiman pada akhir tahun, minat masyarakat untuk menyimpan dana di perbankan masih cukup baik.

Dari sisi komposisi, terjadi pergeseran struktur simpanan. Giro menurun cukup signifikan menjadi Rp9,53 triliun dari Rp10,83 triliun pada triwulan III. Secara tahunan, giro masih berkontraksi -0,72% (yoy), meskipun lebih baik dibanding kontraksi dua digit pada awal tahun. Penurunan ini turut menurunkan pangsa giro dari 28,88% menjadi 25,47% terhadap total DPK, mengindikasikan normalisasi likuiditas korporasi pasca puncak aktivitas transaksi pada triwulan sebelumnya.

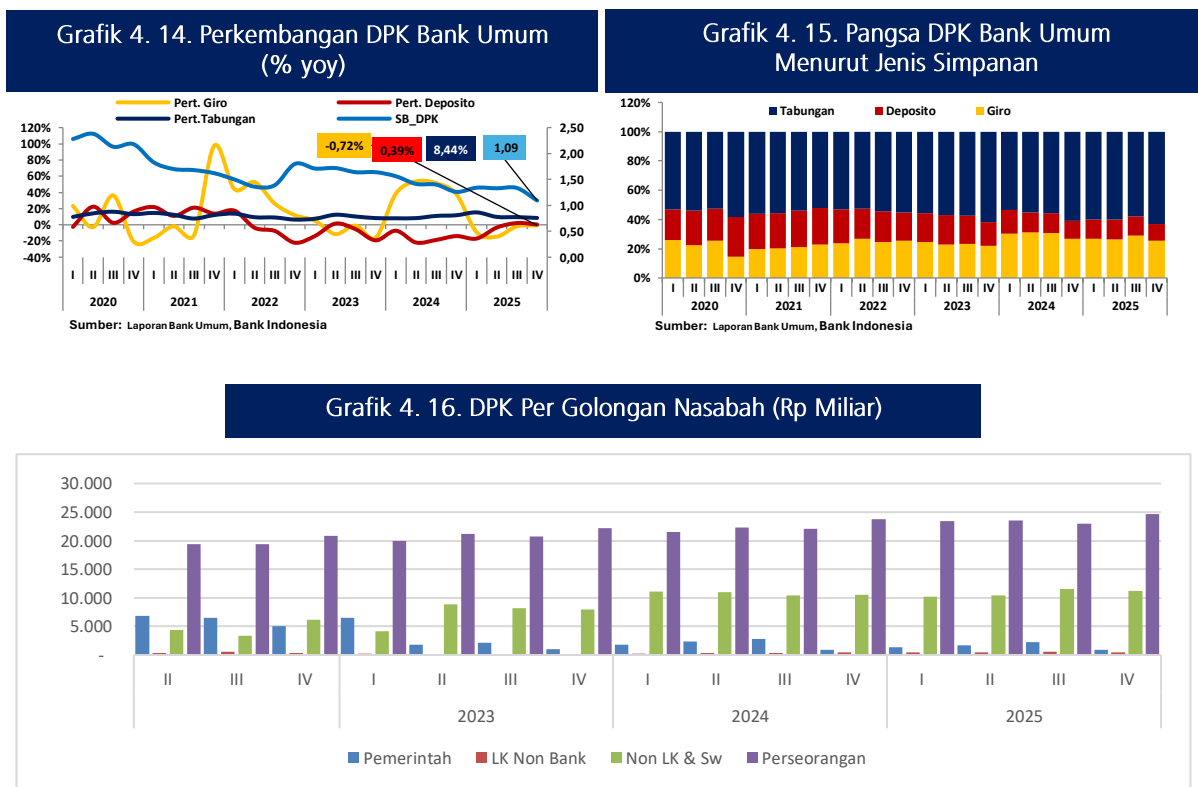
Deposito kembali melemah menjadi Rp4,34 triliun dari Rp4,95 triliun pada triwulan III 2025. Pertumbuhan deposito secara tahunan sangat terbatas sebesar 0,39% (yoy), mencerminkan masih rendahnya daya tarik instrumen berjangka di tengah tren suku bunga simpanan yang terus menurun. Pangsa deposito kembali menyusut menjadi 11,61% dari total DPK, mempertegas tren penurunan kontribusi deposito dalam beberapa tahun terakhir.

Sebaliknya, tabungan meningkat signifikan menjadi Rp23,54 triliun dari Rp21,73 triliun pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, tabungan tetap tumbuh solid 8,44% (yoy). Pangsa

tabungan melonjak menjadi 62,93%, tertinggi dalam lima tahun terakhir, menunjukkan preferensi masyarakat yang semakin kuat terhadap instrumen yang likuid dan fleksibel. Dominasi tabungan ini juga menguntungkan perbankan karena memperkuat struktur dana murah (CASA).

Dari sisi biaya dana, suku bunga DPK kembali turun menjadi 1,09% dari 1,33% pada triwulan III 2025. Penurunan ini sejalan dengan turunnya suku bunga giro menjadi 0,87%, deposito menjadi 3,41%, serta tabungan ke 0,64%. Tren penurunan suku bunga simpanan ini memperkuat efisiensi biaya dana bank, meskipun di sisi lain membatasi pertumbuhan deposito.

Secara keseluruhan, penghimpunan DPK triwulan IV 2025 menunjukkan stabilitas dengan pergeseran struktur yang semakin didominasi dana murah, khususnya tabungan. Meskipun giro dan deposito mengalami penyesuaian, pertumbuhan tahunan tetap positif dan biaya dana semakin rendah. Ke depan, struktur DPK yang lebih berbasis tabungan memberikan ruang bagi perbankan untuk menjaga margin, namun tetap memerlukan strategi penghimpunan dana yang adaptif guna mengantisipasi potensi pengetatan likuiditas akibat akselerasi kredit di awal 2026.



4.1.3.3. Penyaluran Kredit Bank Umum

Pada triwulan IV 2025, dinamika penyaluran kredit Bank Umum di Sulawesi Tengah menunjukkan perubahan arah yang lebih konstruktif dibandingkan triwulan sebelumnya. Setelah mengalami stagnasi pada triwulan III, total kredit tumbuh cukup kuat menjadi Rp59,08

triliun, meningkat dari Rp56,51 triliun. Secara tahunan, kinerja kredit kembali masuk ke zona positif dengan pertumbuhan 0,61% (yoy), membaik dari kontraksi -0,66% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Walaupun pertumbuhannya masih relatif tipis, pergeseran ini mencerminkan mulai pulihnya dorongan intermediasi menjelang akhir tahun.

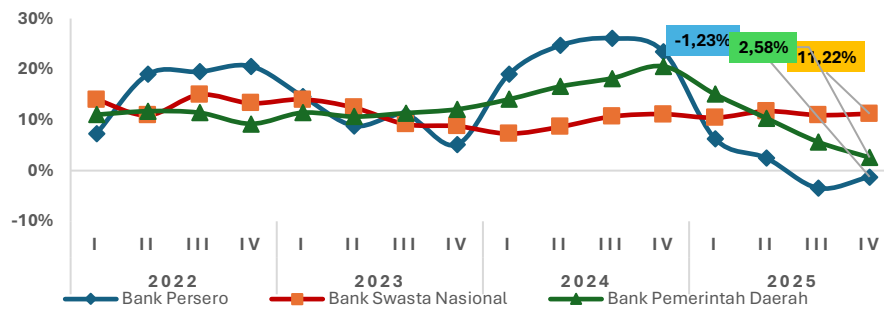
Dilihat dari struktur perbankan, akselerasi terutama bersumber dari Bank Persero yang mencatat peningkatan kredit menjadi Rp43,74 triliun dari Rp41,50 triliun pada triwulan III. Perbaikan ini mengindikasikan kembali aktifnya pembiayaan pada debitur besar dan segmen konsumsi. Bank Swasta Nasional juga mempertahankan tren ekspansif dengan kredit naik menjadi Rp6,82 triliun, memperlihatkan konsistensi dalam memperluas pangsa pasar. Sementara itu, Bank Pemerintah Daerah turut mencatat kenaikan menjadi Rp8,52 triliun, meskipun pertumbuhannya lebih moderat dan masih dipengaruhi kapasitas fiskal serta proyek daerah.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terlihat adanya normalisasi yang cukup dalam. Pada triwulan IV 2024, kredit tumbuh tinggi di atas 21% (yoy), sehingga basis pertumbuhan yang tinggi tersebut membuat laju 2025 tampak lebih landai. Dengan demikian, kinerja saat ini lebih mencerminkan fase konsolidasi ketimbang ekspansi agresif.

Secara musiman, peningkatan kredit pada akhir tahun lazim terjadi, terutama didorong kebutuhan konsumsi rumah tangga serta realisasi pembiayaan proyek investasi. Namun demikian, sinyal kehati-hatian masih terasa, khususnya pada pembiayaan modal kerja yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih menimbang kondisi permintaan dan prospek ekonomi sebelum meningkatkan aktivitas produksi secara signifikan.

Secara umum, triwulan IV 2025 memberikan indikasi bahwa fungsi intermediasi perbankan mulai kembali menguat setelah periode perlambatan. Meskipun pertumbuhan tahunan belum tinggi, arah pergerakan sudah lebih positif. Tantangan ke depan tetap berada pada upaya menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan kualitas aset, serta memastikan bahwa pemulihan kredit produktif berjalan seiring dengan perbaikan aktivitas sektor riil pada awal 2026.

Grafik 4. 17. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Bank (yoy)

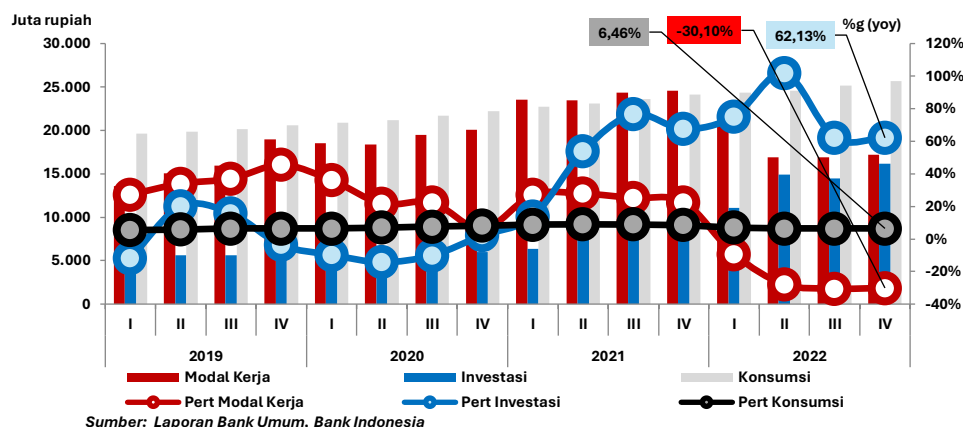


Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Pada triwulan IV 2025, total kredit meningkat menjadi Rp59,08 triliun dan secara tahunan kembali tumbuh positif 0,61% (yoy) setelah sempat berkontraksi pada triwulan III. Namun, perbaikan ini terutama ditopang oleh kredit investasi dan konsumsi, sementara kredit modal kerja masih berkontraksi dalam sebesar -30,10% (yoy). Outstanding kredit modal kerja hanya mencapai Rp17,20 triliun dengan pangsa turun menjadi 29,11%, jauh lebih rendah dibandingkan periode ekspansi tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa pembiayaan operasional jangka pendek dunia usaha masih tertahan dan aktivitas produksi belum pulih sepenuhnya.

Sebaliknya, kredit investasi tetap menjadi motor pertumbuhan dengan kenaikan 62,13% (yoy) dan outstanding mencapai Rp16,18 triliun, sehingga pangsa naik menjadi 27,39%. Kredit konsumsi juga tumbuh stabil 6,46% (yoy) menjadi Rp25,70 triliun dan tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi 43,50%. Struktur ini menunjukkan bahwa ekspansi kredit lebih didorong oleh pembiayaan proyek jangka panjang dan permintaan rumah tangga, sementara sektor produktif jangka pendek masih berada dalam fase konsolidasi.

Grafik 4. 18. Perkembangan Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

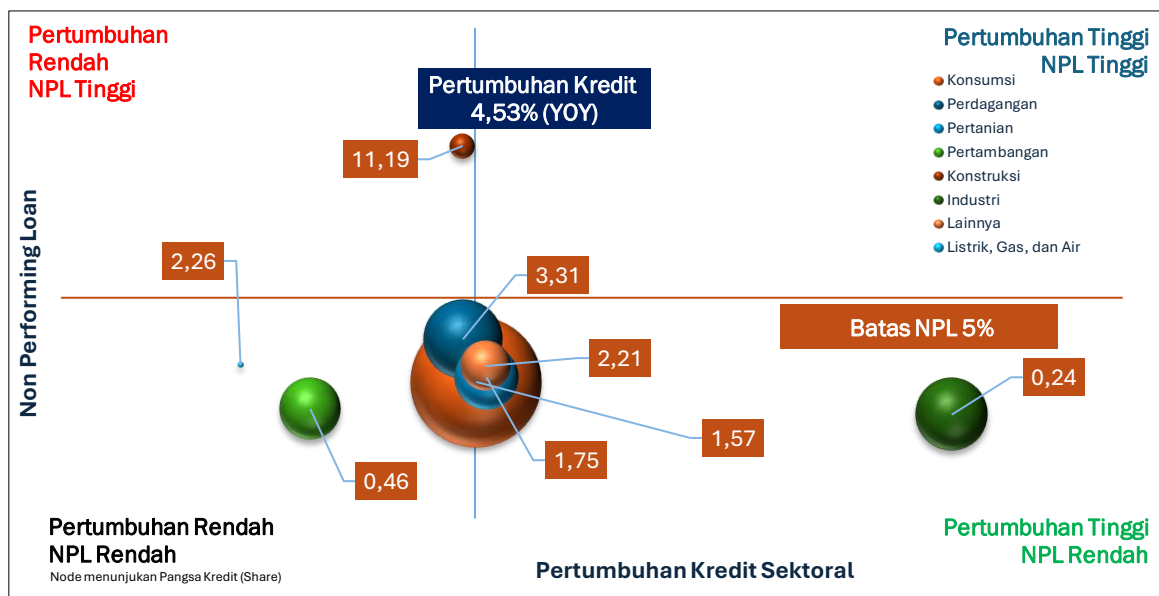
Pada triwulan IV 2025, struktur kredit berdasarkan sektor ekonomi menunjukkan pergeseran yang cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sektor konsumsi tetap menjadi kontributor terbesar dengan outstanding mencapai Rp25,70 triliun dan pertumbuhan 6,46% (yoy). Pangsa kredit konsumsi meningkat menjadi 45,26% dari 44,27% pada triwulan III, menegaskan peran rumah tangga sebagai penopang utama intermediasi perbankan. Namun demikian, rasio NPL konsumsi masih berada di level relatif tinggi 1,57%, meskipun sedikit membaik dari 1,63% pada triwulan sebelumnya.

Sektor pertanian mencatat pertumbuhan yang cukup solid sebesar 10,35% (yoy) dengan pangsa naik menjadi 10,59%. Rasio NPL pertanian menurun menjadi 1,75%, menunjukkan kualitas kredit yang tetap terjaga. Sebaliknya, sektor pertambangan mengalami kontraksi tajam sebesar -56,02% (yoy), dengan outstanding turun menjadi Rp5,61 triliun dan pangsa menyusut signifikan menjadi 9,89% dari 14,76%. Meskipun demikian, kualitas kredit pertambangan masih sangat baik dengan NPL rendah di 0,46%, mencerminkan profil risiko debitur yang relatif kuat.

Sektor industri menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 185,59% (yoy), dengan outstanding meningkat menjadi Rp7,83 triliun dan pangsa melonjak ke 13,79%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya realisasi pembiayaan proyek besar pada akhir tahun. NPL industri tetap rendah di 0,24%, menandakan ekspansi tersebut masih dalam batas risiko yang terkendali. Sementara itu, sektor perdagangan tumbuh terbatas 1,48% (yoy) dengan pangsa relatif stabil di 16,39%, dan NPL menurun menjadi 3,31%, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Sektor konstruksi tumbuh melambat menjadi 1,39% (yoy) dengan pangsa 1,59%, sementara rasio NPL meningkat ke 11,19%, tertinggi di antara seluruh sektor dan jauh di atas threshold 5%, sehingga tetap menjadi titik risiko utama. Adapun sektor listrik, gas, dan air masih berkontraksi dalam sebesar -82,32% (yoy) dengan pangsa sangat kecil 0,07%, disertai kenaikan NPL menjadi 2,26%. Secara keseluruhan, komposisi kredit triwulan IV 2025 semakin didominasi sektor konsumsi dan industri, sementara pertambangan dan konstruksi menunjukkan pelemahan. Risiko kredit secara agregat masih terkendali, namun tekanan pada sektor konstruksi dan sebagian sektor utilitas perlu terus diwaspadai.

Grafik 4. 19. Heatmap Pertumbuhan Kredit dan NPL Per LU



Sumber : Laporan Bank Umum Bank Indonesia

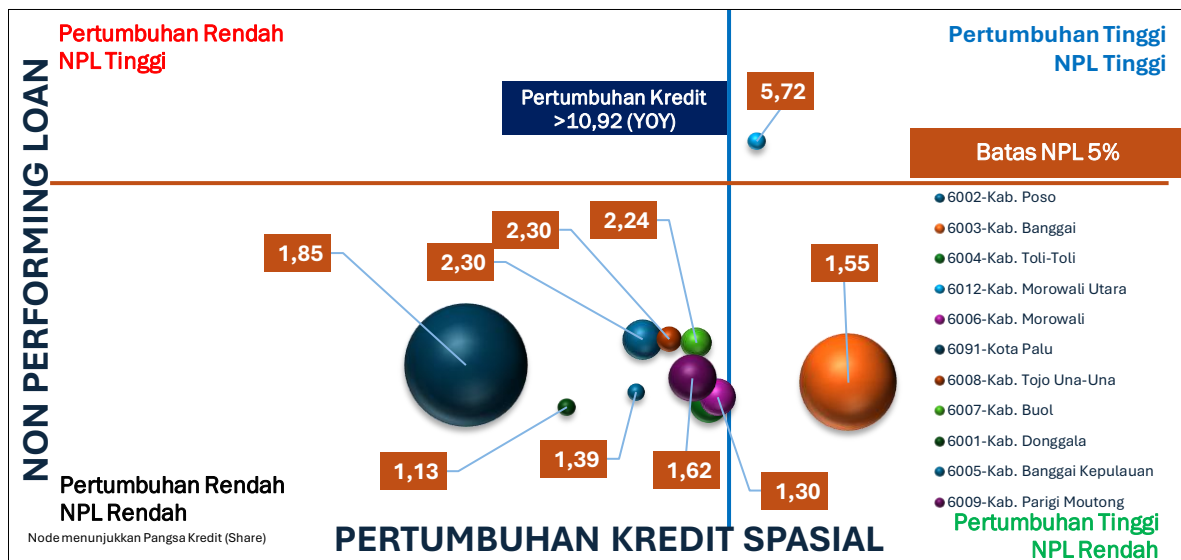
Dari sisi spasial, penyaluran kredit pada triwulan IV 2025 tumbuh terbatas sebesar 0,61% (yoy) menjadi Rp59,08 triliun, dengan rasio NPL provinsi sebesar 1,77% yang masih berada di bawah ambang batas 5%. Kota Palu tetap menjadi kontributor terbesar dengan pangsa 45,30% dari total kredit, meskipun secara tahunan mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -10,26% (yoy). Penurunan ini menjadi faktor utama tertahannya pertumbuhan kredit agregat provinsi. Rasio NPL Kota Palu tercatat 1,85%, sedikit di atas rata-rata provinsi namun masih dalam kategori terkendali.

Kabupaten Banggai menjadi motor pertumbuhan utama dengan ekspansi 17,10% (yoy) dan pangsa kredit 27,70%, memperkuat posisinya sebagai pusat aktivitas ekonomi kedua terbesar setelah Palu. Kualitas kredit Banggai tetap terjaga dengan NPL 1,55%. Kabupaten Morowali Utara juga mencatat pertumbuhan dua digit 10,54% (yoy), namun memiliki NPL tertinggi di provinsi sebesar 5,72%, melampaui threshold 5% sehingga menjadi wilayah dengan risiko kredit paling perlu diwaspadai. Sementara itu, Morowali (7,76% yoy), Toli-Toli (7,11% yoy), Buol (6,23% yoy), dan Parigi Moutong (5,94% yoy) menunjukkan pertumbuhan yang relatif solid dengan rasio NPL yang masih moderat.

Di sisi lain, beberapa wilayah mencatat perlambatan atau kontraksi. Kabupaten Donggala mengalami penurunan kredit -3,04% (yoy) meskipun NPL relatif rendah 1,13%. Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una tumbuh terbatas masing-masing 2,38% dan 4,28% (yoy), dengan NPL 2,30% yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Kabupaten Banggai Kepulauan tumbuh tipis 1,91% (yoy) dengan kualitas kredit yang masih terjaga. Secara keseluruhan, struktur spasial kredit Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 menunjukkan konsentrasi yang masih tinggi di

Kota Palu dan Banggai, dengan dinamika pertumbuhan yang mulai bergeser ke wilayah berbasis pertambangan dan industri. Risiko kredit secara umum terkendali, namun pengawasan lebih ketat diperlukan di Morowali Utara serta beberapa kabupaten dengan NPL di atas rata-rata provinsi.

Grafik 4. 20. Heatmap Kredit Per Kab / Kota di Sulawesi Tengah

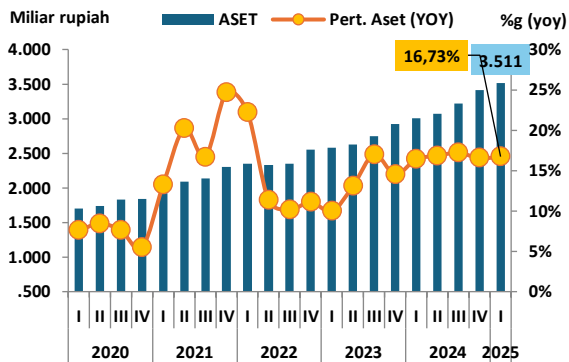


Sumber : Laporan Bank Umum Bank Indonesia

4.1.3.4. Kinerja Bank Umum Syariah

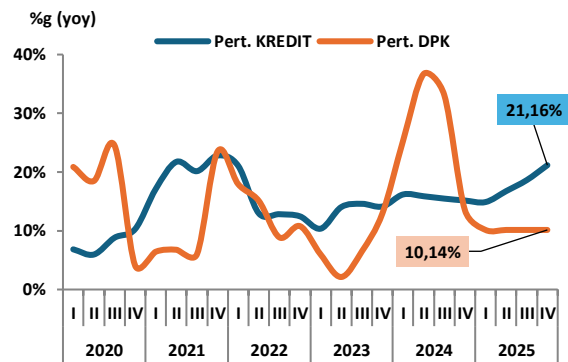
Pada triwulan IV 2025, kinerja Bank Umum Syariah (BUS) di Sulawesi Tengah semakin menguat. Total aset tercatat sebesar Rp4,07 triliun, meningkat dari Rp3,82 triliun pada triwulan sebelumnya, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 19,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 18,40% (yoy) pada triwulan III. Akselerasi ini menunjukkan ekspansi yang semakin solid, didorong oleh pertumbuhan pembiayaan dan penghimpunan dana yang tetap kuat. Dengan tren tersebut, perbankan syariah terus memperluas perannya dalam mendukung intermediasi dan pendalaman pasar keuangan daerah berbasis prinsip syariah.

Grafik 4. 21. Perkembangan Aset Perbankan Syariah



Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

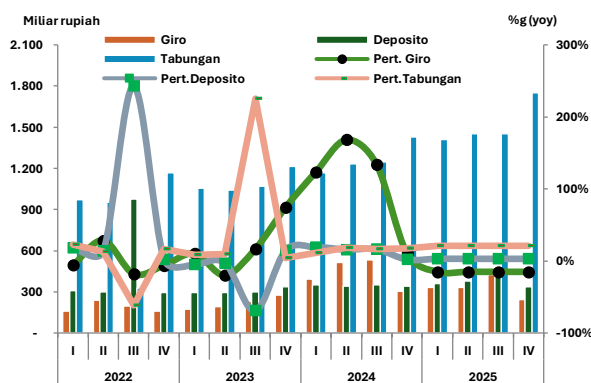
Grafik 4. 22. Pertumbuhan Pembiayaan dan DPK Syariah



Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

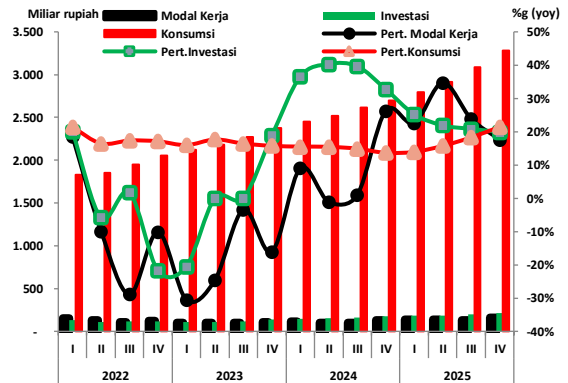
Dari sisi penghimpunan dana, DPK meningkat menjadi Rp2,33 triliun dengan pertumbuhan 10,14% (yoy), relatif stabil dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan terutama ditopang oleh tabungan yang tumbuh tinggi 20,77% (yoy) menjadi Rp1,75 triliun, mencerminkan preferensi nasabah terhadap instrumen likuid berbasis syariah. Sementara itu, giro dan deposito masing-masing mencatat pertumbuhan -15,08% (yoy) dan 2,93% (yoy), menunjukkan adanya penyesuaian komposisi dana. Struktur DPK yang didominasi tabungan memberikan keunggulan biaya dana yang relatif lebih efisien bagi BUS.

Grafik 4. 23. Perkembangan Aset Perbankan Syariah Menurut Jenis Simpanan



Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 4. 24. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Menurut Jenis Penggunaan



Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Di sisi pembiayaan, kredit/pembiayaan syariah meningkat signifikan menjadi Rp3,65 triliun atau tumbuh 21,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 18,63% pada triwulan III. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pembiayaan konsumsi yang naik 21,42% (yoy) menjadi Rp3,28 triliun, seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan rumah tangga berbasis akad syariah. Pembiayaan investasi juga tetap ekspansif dengan pertumbuhan 19,93% (yoy), sementara pembiayaan modal

kerja tumbuh 17,63% (yoy), mencerminkan dukungan BUS terhadap aktivitas usaha produktif, termasuk UMKM dan sektor perdagangan.

Pada triwulan IV 2025, struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di Sulawesi Tengah masih didominasi oleh tabungan. Dari total DPK sebesar Rp2,33 triliun, tabungan syariah mencapai Rp1,75 triliun atau sekitar 75,2% dari total DPK. Sementara itu, giro tercatat Rp243 miliar atau sekitar 10,4%, dan deposito sebesar Rp337 miliar atau sekitar 14,5% dari total DPK. Struktur ini menunjukkan karakteristik penghimpunan dana perbankan syariah yang sangat bertumpu pada dana ritel berbasis tabungan. Sebagai perbandingan, pada perbankan Sulawesi Tengah secara keseluruhan, struktur DPK relatif lebih seimbang dengan pangsa tabungan sekitar 57%, giro sekitar 23%, dan deposito sekitar 20%, sehingga menunjukkan bahwa porsi tabungan pada perbankan syariah jauh lebih dominan.

Dari sisi skala industri, total aset perbankan syariah pada triwulan IV 2025 tercatat Rp4,07 triliun, meningkat dari Rp3,82 triliun pada triwulan III 2025 atau tumbuh sekitar 6,7% (qto). Secara tahunan, aset perbankan syariah juga mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 19,47% (yoy). Dengan nilai tersebut, pangsa aset perbankan syariah diperkirakan mencapai sekitar 5,3% dari total aset perbankan di Sulawesi Tengah, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sekitar 5,0%, sehingga menunjukkan peran perbankan syariah yang masih relatif kecil namun terus mengalami peningkatan dalam sistem perbankan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja perbankan syariah pada triwulan IV 2025 menunjukkan akselerasi yang lebih kuat dibanding triwulan sebelumnya, baik dari sisi aset yang tumbuh 19,47% (yoy) menjadi Rp4,07 triliun, maupun dari sisi pembiayaan yang meningkat signifikan. Struktur DPK yang semakin didominasi tabungan serta ekspansi pembiayaan yang seimbang antara konsumsi dan sektor produktif menegaskan peran strategis BUS dalam memperkuat inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan berbasis prinsip syariah.

4.2. Perkembangan Akses Keuangan

4.2.1. Penyaluran Kredit Kepada UMKM

Pada triwulan IV 2025, perkembangan akses keuangan melalui penyaluran kredit UMKM di Sulawesi Tengah masih menunjukkan tekanan. Total kredit UMKM tercatat sebesar Rp17,14 triliun dengan kontraksi -9,42% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan III yang terkontraksi -7,44% (yoy). Pelemahan ini mengindikasikan masih terbatasnya ekspansi usaha skala mikro dan kecil di tengah perlambatan permintaan domestik serta sikap kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit.

Dari sisi sektoral, sektor perdagangan tetap menjadi kontributor terbesar dengan nominal Rp7,49 triliun dan pangsa 43,68% dari total kredit UMKM. Namun, sektor ini mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -11,61% (yoy), lebih buruk dibandingkan triwulan sebelumnya (-9,33%), sejalan dengan melemahnya aktivitas perdagangan eceran dan distribusi. Rasio NPL sektor perdagangan tercatat 4,05%, relatif tinggi meskipun masih di bawah ambang batas 5%, sehingga tetap memerlukan perhatian dalam pengelolaan risiko kredit.

Sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor utama yang masih mencatat pertumbuhan positif, yakni 8,37% (yoy) dengan nominal Rp5,34 triliun dan pangsa 31,18%. Kinerja ini mencerminkan masih kuatnya kebutuhan pembiayaan pada subsektor tanaman pangan dan perkebunan. Selain itu, kualitas kredit sektor pertanian relatif terjaga dengan NPL sebesar 1,58%, lebih rendah dibandingkan sektor lainnya.

Tabel 4. 2. Perkembangan Kredit UMKM per LU Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan Periode	Nominal (Rp Miliar)	Share (%)	Pertumbuhan (yoy, %)		NPL (%)
	Q4-25	Q4-25	Q3-25	Q4-25	Q4-25
Perdagangan	7.485,18	43,68	(9,33)	(11,61)	4,05
Pertanian	5.343,14	31,18	7,12	8,37	1,58
Lainya	4.308,63	25,14	(17,93)	(22,27)	4,98
Total	17.136,95	100,00	(7,44)	(9,42)	3,50

Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Sementara itu, sektor lainnya mengalami kontraksi terdalam sebesar -22,27% (yoy) dengan pangsa 25,14% dan NPL mencapai 4,98%, mendekati threshold 5%. Tekanan ini mencerminkan masih lemahnya sektor jasa, manufaktur kecil, dan kegiatan usaha informal. Secara keseluruhan, meskipun akses pembiayaan UMKM masih terjaga dari sisi nominal, tren kontraksi dan peningkatan risiko pada beberapa sektor menunjukkan perlunya penguatan dukungan pembiayaan produktif serta mitigasi risiko kredit agar peran UMKM sebagai penopang ekonomi daerah tetap berkelanjutan.

Tabel 4. 3. Perkembangan Kredit UMKM per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan Periode	Nominal Kredit UMKM (Rp Miliar)	Nominal Total Kredit (Rp Miliar)	Share Kredit UMKM (thd Total Kredit - %)	Pertumbuhan (yoy, %)		NPL (%)
	Q4-25	Q4-25	Q4-25	Q3-25	Q4-25	Q4-25
Poso	1.358,82	2.767,14	49,11	4,19	0,08	3,65
Banggai	2.882,85	16.364,24	17,62	-1,58	-1,74	4,42
Toli-Toli	1.022,96	2.573,71	39,75	-10,59	-7,38	1,90
Banggai Kep.	1,98	517,96	0,38	1,48	1,08	100,00
Morowali	1.126,13	2.265,44	49,71	5,72	5,26	1,10
Buol	617,19	1.560,91	39,54	10,05	8,18	3,90
Touna	307,79	1.075,36	28,62	3,47	-1,02	4,60
Parimou	2.250,67	3.952,77	56,94	-6,38	-5,18	2,14
Palu	7.678,16	26.765,58	28,69	-13,82	-17,63	3,83
Donggala	0,09	484,94	0,02	-1,98	-2,16	100,00
Morowali Utara	12,52	526,44	2,38	-8,03	-7,36	83,74
Total	17.259,14	58.854,50	29,33	-7,47	-9,44	1,70

Sumber : Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

Pada triwulan IV 2025, penyaluran kredit UMKM di Sulawesi Tengah tercatat sebesar Rp17,26 triliun atau terkontraksi -9,44% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya (-7,47%). Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 29,33%, menunjukkan peran UMKM yang tetap signifikan dalam struktur intermediasi daerah meskipun sedang mengalami tekanan pertumbuhan. Secara umum, pelemahan ini terutama bersumber dari kontraksi di beberapa wilayah utama, khususnya Kota Palu dan Kabupaten Banggai.

Kota Palu tetap menjadi wilayah dengan nominal kredit UMKM terbesar sebesar Rp7,68 triliun, dengan pangsa UMKM terhadap total kredit di Palu sebesar 28,69%. Namun, kredit UMKM di Palu mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -17,63% (yoy), lebih buruk dibandingkan triwulan III (-13,82%). Rasio NPL tercatat 3,83%, relatif moderat namun tetap perlu diwaspadai mengingat besarnya eksposur kredit di wilayah ini. Kabupaten Banggai menjadi kontributor terbesar kedua dengan nominal Rp2,88 triliun, namun juga mengalami kontraksi -1,74% (yoy) dan mencatat NPL cukup tinggi 4,42%.

Di sisi lain, beberapa wilayah masih mencatat pertumbuhan positif. Kabupaten Morowali tumbuh 5,26% (yoy) dengan pangsa UMKM terhadap total kredit mencapai 49,71% serta NPL rendah 1,10%, menunjukkan kualitas kredit yang terjaga. Kabupaten Buol juga mencatat pertumbuhan 8,18% (yoy) dengan NPL 3,90%. Kabupaten Poso relatif stabil dengan pertumbuhan tipis 0,08% (yoy) dan pangsa UMKM tinggi 49,11%, meskipun NPL mencapai 3,65%. Sementara itu, Kabupaten Toli-Toli dan Parigi Moutong (Parimou) mengalami kontraksi masing-masing -7,38% dan -5,18% (yoy), namun kualitas kredit masih dalam batas aman.

Beberapa wilayah menunjukkan risiko yang sangat tinggi. Kabupaten Donggala dan Banggai Kepulauan kembali mencatat NPL ekstrem sebesar 100%, meskipun nominal kredit relatif sangat kecil. Kabupaten Morowali Utara juga memiliki NPL sangat tinggi 83,74% dengan pertumbuhan kredit masih negatif (-7,36% yoy), sehingga menjadi titik risiko utama dalam portofolio UMKM. Secara keseluruhan, kinerja kredit UMKM triwulan IV 2025 menunjukkan tekanan yang cukup merata secara spasial, dengan risiko kredit agregat masih terkendali di level 1,70%, namun konsentrasi risiko tinggi di beberapa kabupaten perlu menjadi perhatian dalam penguatan manajemen risiko dan pembinaan UMKM ke depan.

4.2.2. Pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia

Dalam rangka mendorong pengembangan UMKM di Sulawesi Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia menerapkan strategi utama yang berfokus pada peningkatan kapasitas usaha serta perluasan akses pasar dan pembiayaan. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui berbagai program, mulai dari pelatihan kelembagaan dan sertifikasi seperti Sertifikasi Halal (bekerja sama dengan BPJPH dan Kementerian Agama). Upaya ini diprioritaskan pada sektor pangan strategis,

UMKM subsisten, pariwisata berbasis budaya, pondok pesantren, dan penguatan rantai nilai halal (Halal Value Chain). Selain itu, pelatihan manajemen usaha seperti pencatatan keuangan digital (contoh: aplikasi SIAPIK) turut diberikan guna meningkatkan tata kelola keuangan UMKM. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pasokan komoditas dalam rangka menjaga stabilitas Rupiah dari sisi daya beli masyarakat.

Untuk memperluas akses pasar UMKM dan Ekonomi Syariah, Bank Indonesia aktif memfasilitasi kegiatan business matching di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, Bank Indonesia menginisiasi dengan menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) bersama pemangku kepentingan lain, yang menjadi instrumen alternatif dalam rangka pemerataan kesejahteraan, industri ekonomi dan keuangan syariah telah bertransformasi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di daerah, Bank Indonesia bersama Pemprov Sulawesi Tengah rutin menggelar Karya Kreatif Sulawesi Tengah (KKST), sebagai wadah promosi produk unggulan daerah sekaligus mempertemukan UMKM dengan calon investor. Di samping itu, Bank Indonesia juga mendorong pelatihan ekspor, promosi perdagangan, dan showcase produk UMKM melalui berbagai platform baik daring, luring, maupun hybrid.

Sebagai bagian dari upaya inovasi, Bank Indonesia Sulawesi Tengah juga mendukung pengembangan teknologi CoolLar, sebuah produk coolbox inovatif hasil karya ilmuwan lokal untuk pengangkutan ikan di laut, yang diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan ikan dan membantu pengendalian inflasi pangan. Selain itu, untuk memperkuat basis data UMKM dan mempermudah akses pembiayaan, Bank Indonesia mengembangkan aplikasi SIKEPANG, yang menjadi sumber informasi bagi investor dan lembaga keuangan. Keberhasilan pengembangan UMKM ini sangat bergantung pada kolaborasi pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media. Melalui sinergi ini, Bank Indonesia berkomitmen menjadikan UMKM sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.



BAB V

Sistem Pembayaran dan Digitalisasi Keuangan

BAB V Sistem Pembayaran

- Sistem Pembayaran di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami net outflow di triwulan laporan sesuai dengan siklus tahunannya. Total uang kartal yang diedarkan mencapai Rp 2,59 triliun, seiring dengan tetap tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 secara *year-on-year*.
- Di sisi QRIS, jumlah merchant yang mengadopsi QRIS juga mengalami peningkatan signifikan hingga 37,38% (yoy). Dari sisi jumlah pengguna QRIS, juga memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 367.697 pengguna atau meningkat sebesar 10,05% (yoy). Total volume transaksi QRIS di akhir 2025 mencapai 37.830.398 transaksi.
- Di sisi pembayaran non-tunai, terjadi peningkatan yang pesat pada pembayaran menggunakan APMK baik dari sisi volume maupun transaksi, khususnya yang terjadi pada kartu kredit. Volume transaksi kartu kredit pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan sebesar 35,22% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya

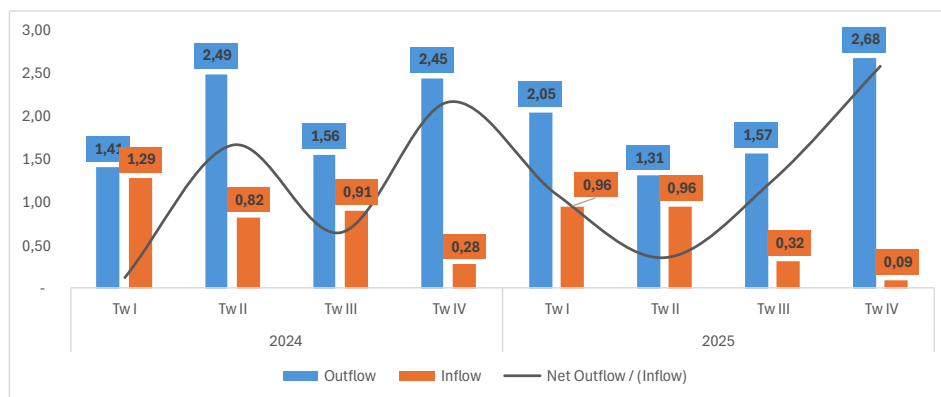
5.1. Sistem Pembayaran Tunai

5.1.1. Perkembangan Uang Kartal (*Inflow – Outflow*)

Sepanjang triwulan IV 2025, perkembangan aliran transaksi uang tunai perkasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan mengalami *net outflow* sebesar Rp 2,588 triliun. Adapun realisasi transaksi *inflow* tercatat sebesar Rp 93,56 miliar atau menurun sebesar 64,11% (yoy) yang terdiri atas *inflow* bulan Oktober mencapai Rp58,63 miliar, bulan November Rp26,50 miliar, dan bulan Desember Rp 8,4 miliar. Transaksi *outflow* pada triwulan berjalan dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah tercatat mencapai Rp2,68 triliun atau menaik sebesar 2,30% (yoy) yang terdiri atas *outflow* bulan Oktober mencapai Rp577,36 miliar, bulan November Rp818,20 miliar, dan bulan Desember Rp1,29 triliun.

Tingkat *outflow* yang tinggi tersebut mencerminkan perputaran uang kartal yang tinggi pada saat Natal dan Tahun Baru tahun 2025 dan permintaan masyarakat yang tinggi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap barang dan jasa pada periode pelaporan. Di sisi lain, tren *inflow* pada triwulan laporan mengalami penurunan, yang mencerminkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang masif dapat dirasakan oleh para pelaku ekonomi di sekitar Sulawesi Tengah.

Grafik 5.1. Perkembangan Inflow-Outflow (miliar Rupiah)



Sumber: Bank Indonesia

5.1.2. Pemusnahan Uang Rupiah

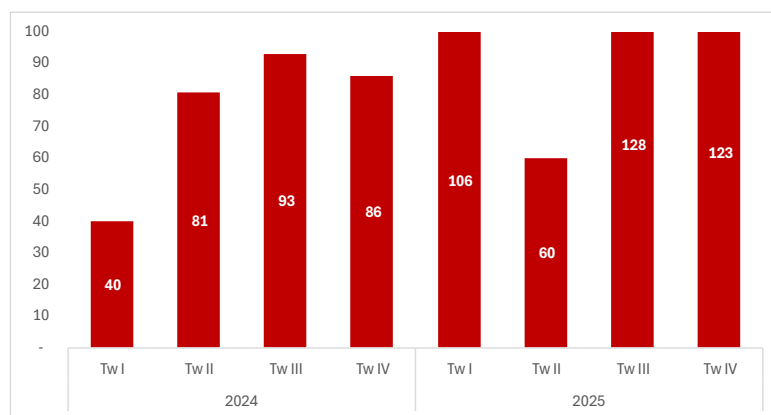
Pemusnahan Uang Rupiah Tidak Layak Edar (UTLE) pada triwulan III 2025 mengalami kenaikan sebesar 69,09% (yoy) dan mencapai 18,00% dari total *inflow* pada periode laporan. Penurunan pemusnahan UTLE secara triwulan konsisten dengan penurunan *inflow* yang diterima oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan tetap optimalnya upaya pemilahan dan penarikan uang tidak layak edar oleh Bank Indonesia maupun perbankan, sehingga kualitas uang Rupiah yang beredar di masyarakat dapat terus terjaga. Bank Indonesia

berkomitmen untuk menyediakan Uang Rupiah dengan kondisi baik (*clean money policy*), sehingga penurunan pemusnahan UTLE juga sejalan dengan komitmen Bank Indonesia tersebut. Upaya ini juga selaras dengan program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang diinisiasi oleh Bank Indonesia.

5.1.3. Kegiatan Kas Keliling dan Uang Palsu

Kegiatan kas keliling pada triwulan ke IV-2025 telah dilakukan di sebanyak 9 (sembilan) kali baik di dalam maupun luar kota Palu. Kegiatan kas keliling ini dilaksanakan sebagai perwujudan tugas Bank Indonesia dalam mengedarkan uang layak edar bagi masyarakat di seluruh nusantara khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Di samping pelaksanaan kas keliling, unit PUR KPw Bank Indonesia Sulawesi Tengah juga melaksanakan program sosialisasi dan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP) ke masyarakat terkait pentingnya masyarakat mencintai dan bangga akan Rupiah serta dapat memahami penggunaan Uang Rupiah dalam kegiatan sehari-hari.

Grafik 5. 2. Perkembangan Temuan Uang Yang Diragukan Keasliannya



Sumber: Bank Indonesia

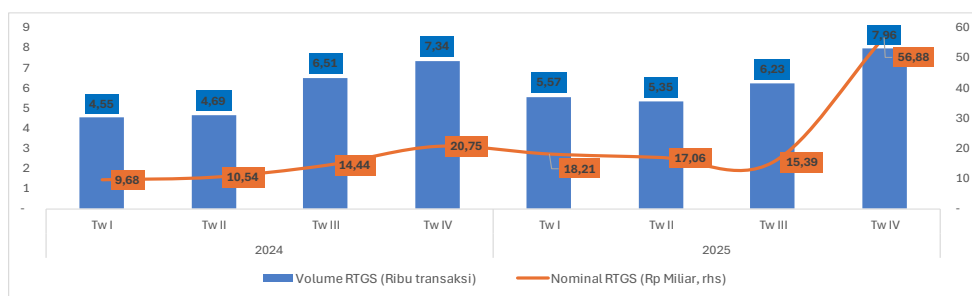
Sepanjang triwulan IV 2025, secara akumulasi ditemukan 123 (seratus dua puluh tiga) lembar uang Rupiah pecahan besar yang diragukan keasliannya. Seluruh temuan uang palsu (UPAL) terdiri dari pecahan 100.000 dan 50.000. Tren yang tetap tinggi pada penemuan uang palsu tersebut mengindikasikan bahwa tingginya kesadaran masyarakat akan ciri-ciri keaslian Uang Rupiah, sejalan dengan upaya dari Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan Uang Rupiah di wilayah kerja baik sisi kuantitas maupun dari kualitas uang beredar. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi juga terus digencarkan oleh Bank Indonesia. Kegiatan sosialisasi melalui program CBP Rupiah juga terus digencarkan oleh Bank Indonesia guna memberikan pemahaman terkait Rupiah kepada masyarakat.

5.2. Sistem Pembayaran Nontunai

5.2.1. Real Time Gross Settlement (RTGS) & Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada triwulan IV 2025, transaksi keuangan nontunai yang menggunakan BI RTGS secara nominal mengalami peningkatan sebesar 174,12% (yoy). Nominal transaksi melalui RTGS pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp 56,88 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp 36,13 triliun dari periode yang sama dari tahun sebelumnya. Di satu sisi, volume transaksi RTGS mengalami kenaikan sebesar 8,43% (yoy) atau tercatat sebanyak 36.128 transaksi pada periode laporan.

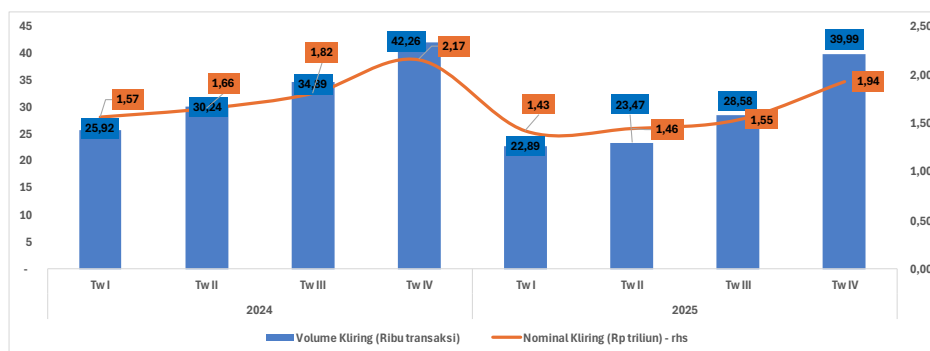
Grafik 5. 3. Perkembangan Nominal dan volume RTGS



Sumber: Bank Indonesia

Berbeda dengan BI RTGS, transaksi keuangan nontunai yang menggunakan SKNBI mengalami penurunan volume transaksi sebesar 5,36% (yoy). Penurunan tersebut mencerminkan preferensi masyarakat yang bergeser ke layanan Bank Indonesia *Fast Payment System* (BI-FAST) yang telah diluncurkan pada Desember 2021. Dengan biaya transfer yang lebih murah serta *settlement* yang lebih *real-time*, opsi penggunaan BI-FAST, yang merupakan modernisasi SKNBI, menjadi lebih diminati. Nominal transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp 1,94 triliun. Volume transaksi SKNBI juga mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,36% atau tercatat sebanyak 39993 transaksi pada periode pelaporan.

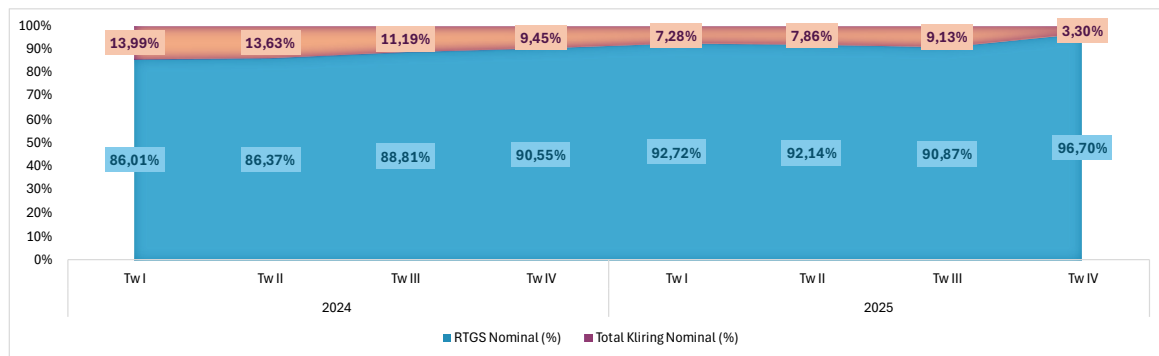
Grafik 5. 4. Perkembangan Nominal dan Jumlah Warkat Kliring Sulawesi Tengah



Sumber: Bank Indonesia

Pola penurunan pada nominal maupun volume transaksi yang terjadi pada RTGS di triwulan IV, sesuai dengan pola yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Berkaitan dengan pangsa *outgoing* melalui kanal RTGS dan Kliring (grafik 5.6), kanal RTGS yang diperuntukkan untuk transaksi dengan nominal besar mendominasi rata-rata sekitar 96,70% dari keseluruhan transaksi, sedangkan untuk kanal kliring memiliki komposisi sebesar 3,30% dari keseluruhan transaksi.

Grafik 5. 5. Pangsa Kliring dan RTGS (Outgoing) Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Bank Indonesia

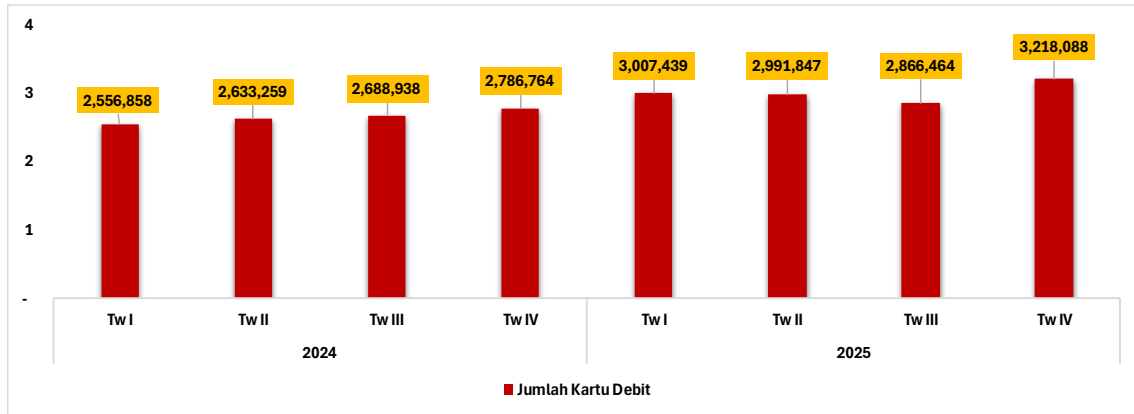
5.2.2. APMK – Kartu Debit

Pada triwulan IV 2025, jumlah kartu debit mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 6,6% (yoy). Jumlah kartu debit di Tw-III 2025 tercatat sebanyak 3.218.088 kartu atau mengalami peningkatan sebesar 15,48% atau 177.526 kartu dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah kartu ATM tercatat mengalami penurunan drastis sebesar 92,62% (yoy) atau dari 162.155 kartu pada triwulan IV 2024 menjadi 11.383 kartu pada triwulan IV 2025.

Dari sisi volume dan nominal transaksi, pembayaran non-tunai menggunakan kartu debit dan kartu ATM mengalami peningkatan volume transaksi. Total volume transaksi di Sulawesi Tengah pada triwulan laporan berjumlah 14.615.336 atau naik sebesar 7,24% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

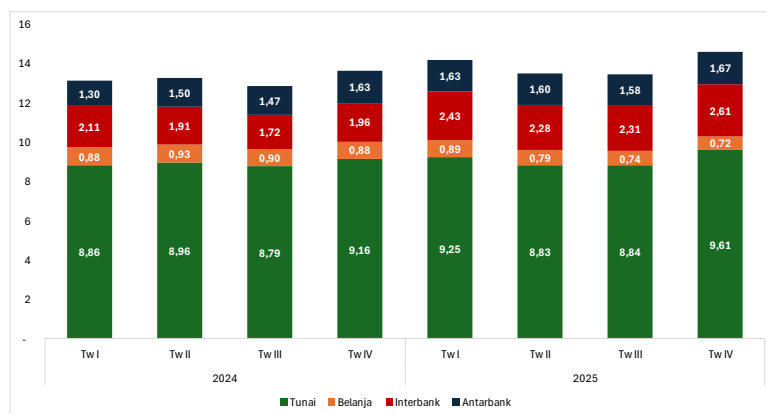
Pada triwulan IV 2025, total nominal transaksi menggunakan kartu debit dan ATM di Sulawesi Tengah mencapai Rp18,55 triliun, mengalami peningkatan sebesar 28,93% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis utilisasi transaksinya, penggunaan kartu pada transaksi belanja mencapai sebesar Rp 525,10 miliar atau turun sebesar dibandingkan triwulan sebelumnya. Dilihat dari trennya, Penggunaan transaksi kartu debit dan ATM untuk menunjang aktivitas perekonomian terus meningkat dari tahun ke tahun mengingat adanya perubahan perilaku masyarakat di era digitalisasi seperti saat ini.

Grafik 5. 6. Perkembangan Jumlah Kartu Debit (dalam juta)



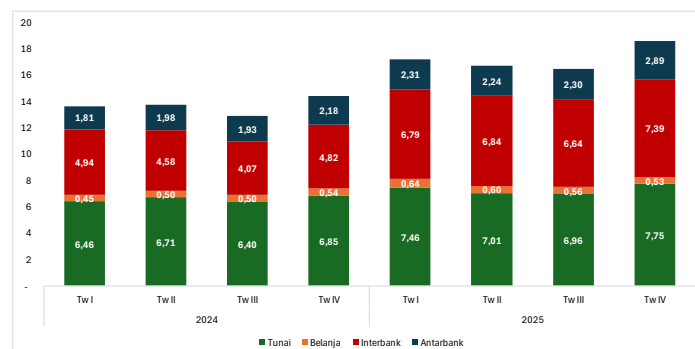
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5. 7. Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/debit (dalam juta)



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5. 8. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit (dalam triliun)



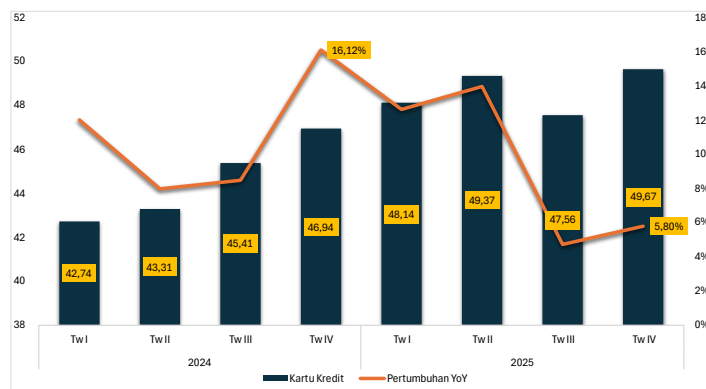
Sumber: Bank Indonesia

5.2.3. APMK – Kartu Kredit

Seiring dengan perkembangan jumlah kartu ATM dan debit, jumlah kartu kredit di Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 49.665 kartu. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 5,80% (yoy), setara dengan 2.722 kartu atau secara tahunan. Jumlah kartu kredit di Sulawesi Tengah mengalami tren peningkatan dalam dua tahun terakhir ditengah pertumbuhan ekonomi yang selalu positif dan cukup tinggi.

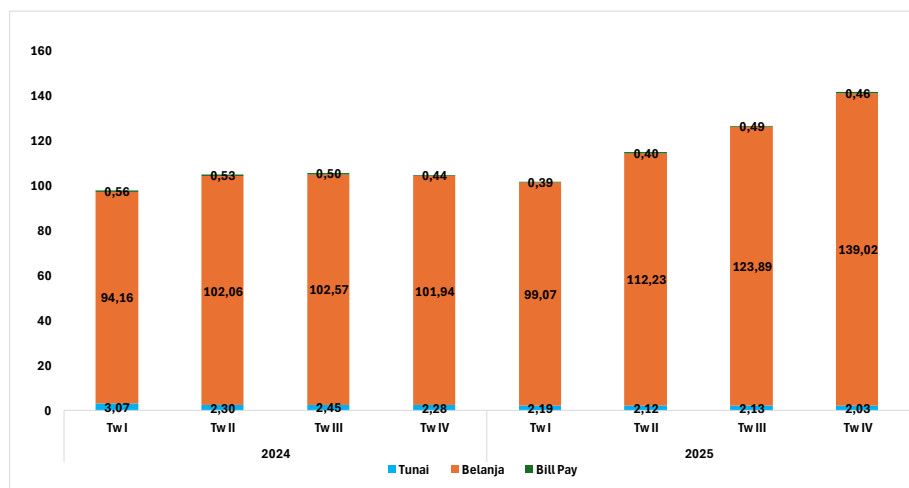
Pada triwulan IV 2025, total transaksi menggunakan kartu kredit di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sebesar 35,60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total nominal transaksi menggunakan kartu kredit di Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp137.930 miliar atau meningkat 35,60% (yoy). Sejalan dengan nominal transaksi, volume transaksi kartu kredit juga mengalami seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Total volume transaksi kartu kredit di Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 berjumlah 141.513 transaksi atau meningkat sebesar 35,22% (yoy).

Grafik 5. 9. Perkembangan Jumlah Kartu Kredit (dalam ribuan)



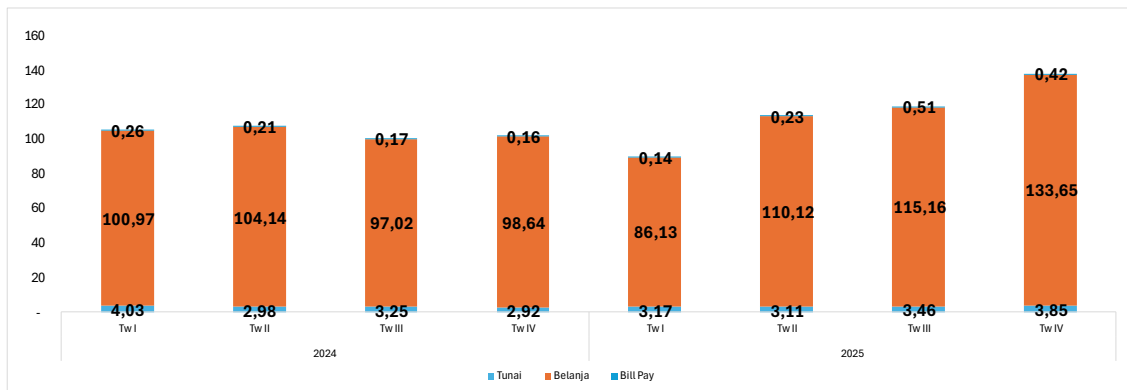
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5. 10. Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit (dalam ribuan)



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5. 11. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit (dalam miliar)



Sumber: Bank Indonesia

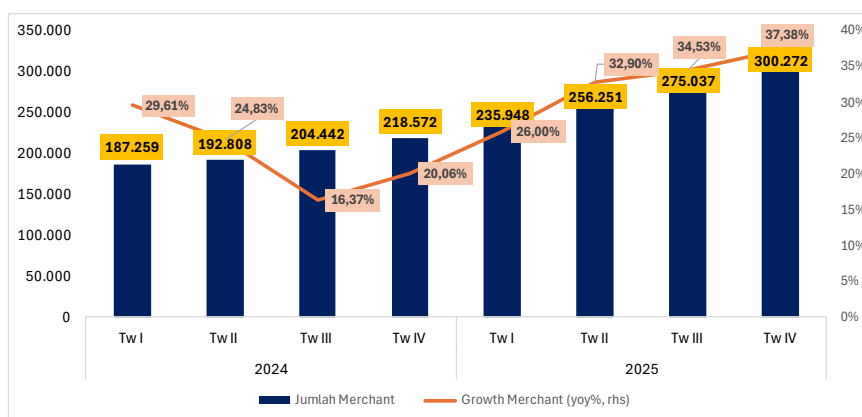
5.2.5. Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

Perkembangan transaksi nontunai menggunakan QR semakin meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa semakin luasnya akseptansi pembayaran nontunai dari sisi pelaku usaha (*merchant*) maupun pengguna (*user*) di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan data internal Bank Indonesia dan PT Penyelesaian Transaksi Ekonomi Nasional (PTEN), jumlah *merchant* pengguna QRIS tercatat mencapai 300.372 *merchant* pada triwulan IV 2025, tumbuh signifikan sebesar 37,38% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di daerah regional Sulampua (Sulawesi – Maluku – Papua), posisi jumlah *merchant* implementasi QRIS Sulawesi Tengah berada di posisi ke-3 dengan pangsa sekitar 12,60% dari total keseluruhan Sulampua. Dari sisi jumlah pengguna QRIS, saat ini memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada triwulan IV 2025, jumlah pengguna QRIS mencapai 367.687 pengguna atau mengalami peningkatan hingga 13,35% (yoy). Selain itu, volume transaksi QRIS di Sulawesi Tengah hingga bulan triwulan IV 2025 mencapai 37.830.398 transaksi, meningkat 133% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Akseptasi implementasi QRIS meningkat, sejalan dengan kampanye penggunaan QRIS di Indonesia. Secara spasial, implementasi QRIS tersebar di Kota maupun Kabupaten di Sulawesi Tengah dengan Kota Palu masih mendominasi sebesar 98.133 *merchant* (32,68%) diikuti oleh Kabupaten Banggai sebesar 36.332 *merchant* (12,10%), dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 36.063 *merchant* (12,01%). Dengan semakin meningkatnya *merchant* yang menggunakan QRIS serta edukasi yang tepat kepada masyarakat terkait QRIS maka diharapkan terjadi perubahan perilaku masyarakat menuju *cashless society*.

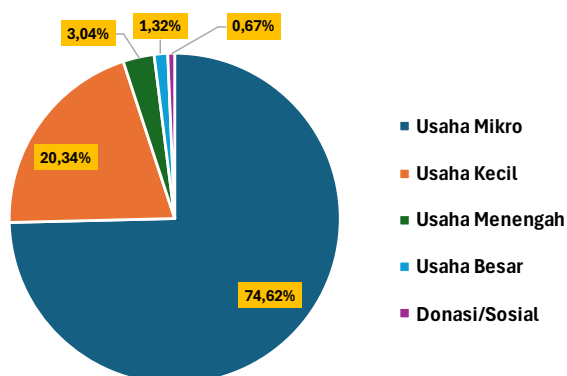
Berdasarkan kategori jenis usaha, peningkatan implementasi QRIS masih didorong oleh pelaku usaha mikro yang mencapai 224.060 *merchant* atau 74,62% dari total *merchant*. Sedangkan pada jenis usaha lain, usaha kecil sebanyak 61.086 *merchant* (20,34%), usaha menengah sebanyak 9.136 *merchant* (3,04%), usaha besar sebanyak 3.967 *merchant* (1,32%), serta kategori usaha sosial – rumah ibadah yang mencapai 2.023 *merchant* (0,67%).

Grafik 5. 12 Jumlah Merchant QRIS di Sulawesi Tengah



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5. 13. QRIS Berdasarkan Kategori Jenis Usaha



Sumber: Bank Indonesia

5.2.6. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

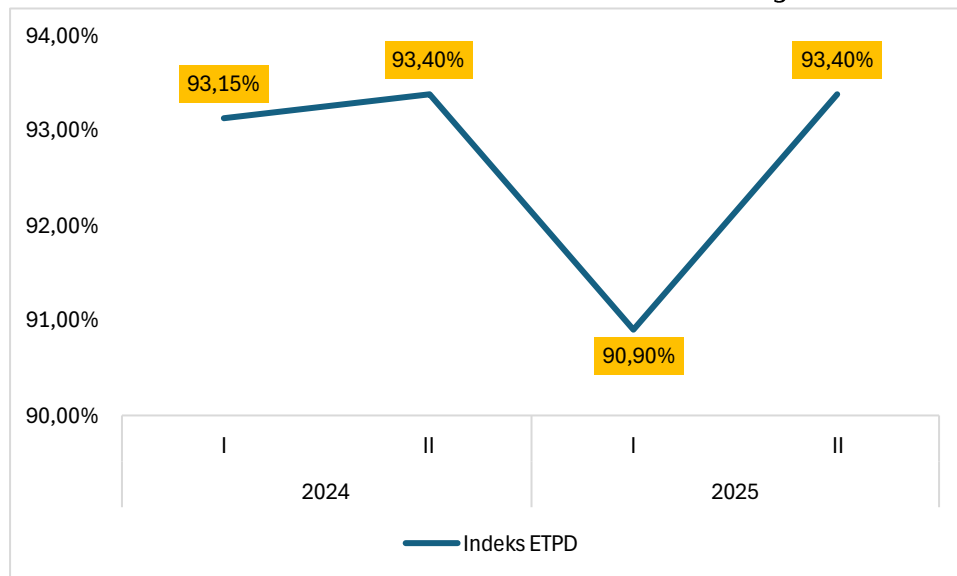
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan upaya terpadu dan terintegrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan mengubah pembayaran tunai menjadi nontunai. Pada Semester II 2025, Indeks ETPD Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sehingga mencapai angka 93%. Untuk mendorong implementasi ETPD, pada tahun 2021 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pada Desember 2021, telah diterbitkan

Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 970/444/BAPENDA-GST/2021 tentang Pembentukan TP2DD Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus mengukuhkan telah terbentuknya seluruh SK TP2DD Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah.

Tahapan setelah terbentuknya SK TP2DD adalah pembentukan SK Roadmap dari masing-masing daerah. Hingga triwulan IV 2025, telah terbentuk SK *Roadmap* dari seluruh TP2DD di setiap daerah di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan semangat digitalisasi dan kolaborasi yang baik dari masing-masing pemda dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pencapaian yang didapat oleh Pemda pada pertengahan tahun 2025 yaitu seluruh Pemda di Sulawesi Tengah berhasil mencapai status Pemda Digital di seluruh Kabupaten/Kota/Provinsi di Sulawesi Tengah setelah dilakukan penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester II 2025.

Dalam implementasiannya, Pemerintah juga aktif menjalankan berbagai program untuk memperluas transaksi digital di daerah, beberapa diantaranya adalah melalui samsat digital oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Penggunaan Aplikasi Digital Online SmartGov Retribusi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, serta penyediaan pembayaran kanal non tunai seperti QRIS Tap pada moda transportasi umum dalam hal ini Bus Rapid Trans (BRT) oleh Kabupaten Donggala.

Grafik 5.18. Indeks ETPD Provinsi Sulawesi Tengah

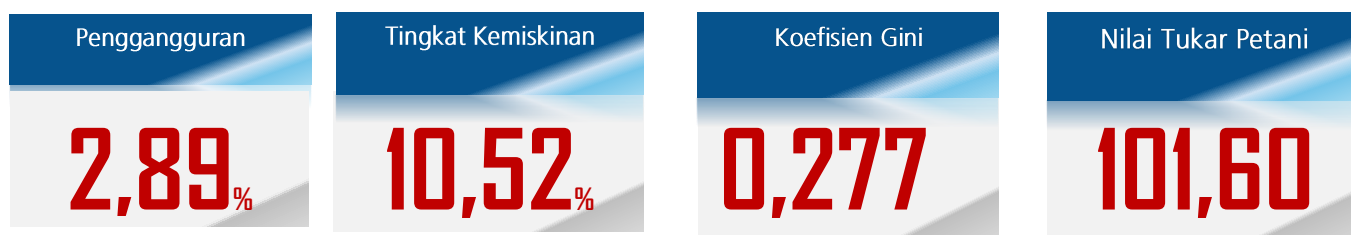


Sumber: Kemenko Perekonomian



Bab VI Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Sulawesi Tengah pada **November 2025** tercatat sebesar **2,89%**, menurun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 2,92%. Penurunan sebesar 0,03 poin persentase ini menunjukkan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja pada akhir tahun.
- **Persentase penduduk miskin** pada **September 2025** tercatat sebesar **10,52%** atau sekitar **345,38 ribu jiwa**, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,04% atau 358,33 ribu jiwa. Secara tahunan, terjadi penurunan 0,52 poin persentase yang mencerminkan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- **Rasio Gini** Sulawesi Tengah pada **September 2025** sebesar **0,277**, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,309. Penurunan ini mengindikasikan distribusi pengeluaran yang semakin merata secara tahunan.
- **Nilai Tukar Petani (NTP)** pada **triwulan IV 2025** berada pada level **101,6**, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 109,8. Meskipun mengalami penurunan, NTP masih berada di atas 100 yang menunjukkan daya beli petani secara agregat tetap berada pada zona positif, meski dengan margin yang semakin tipis dibandingkan triwulan sebelumnya.



6.1. Ketenagakerjaan

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah pada November 2025 menunjukkan perkembangan yang relatif terjaga. Jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 1.708,49 ribu orang, meningkat 5,94 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Sejalan dengan peningkatan tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan tipis sebesar 0,01 persen poin dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 2,89%, menurun 0,03 persen poin dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 2,92%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penambahan angkatan kerja masih mampu diimbangi oleh peningkatan kesempatan kerja,

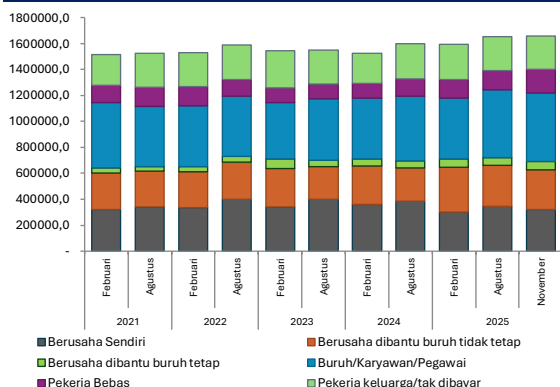
Tabel 6. 1. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

Jenis Kegiatan Utama	2022		2023		2024		2025		
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	November
1. Angkatan Kerja	1.585.680	1.635.470	1.598.280	1.594.250	1.575.280	1.647.090	1.645.120	1.702.550	1.708.490
Bekerja	1.527.430	1.586.320	1.542.480	1.547.170	1.525.660	1.598.660	1.595.510	1.652.850	1.659.110
Pengangguran	58.260	49.150	55.800	47.080	49.620	48.430	49.610	49.700	49.380
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,86	69,99	70,19	69,85	68,53	71,10	70,51	72,40	72,41
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,67	3,00	3,49	2,95	3,15	2,94	3,02	2,92	2,89
4. Pekerja Tidak Penuh	568.430	547.810	552.000	524.720	538.980	514.500	552.940	608.460	611.410
Setengah Penganggur	143.350	120.810	118.620	118.780	134.140	142.240	121.950	475.830	160.630
Paruh Waktu	425.080	427.000	433.380	405.930	404.840	372.260	430.990	475.630	450.780

Sumber : BPS

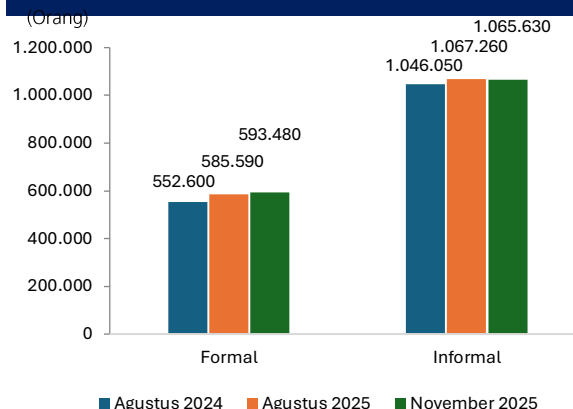
Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tengah pada November 2025 masih didominasi oleh sektor informal dengan jumlah 1.065.630 orang atau sekitar 64,23% dari total penduduk bekerja. Namun demikian, dibandingkan Agustus 2025, jumlah pekerja informal tercatat sedikit menurun. Sebaliknya, jumlah pekerja formal meningkat menjadi 593.480 orang atau tumbuh sekitar 1,35% dibandingkan Agustus 2025. Peningkatan tersebut turut mendorong kenaikan pangsa pekerja formal dalam struktur ketenagakerjaan daerah. Perkembangan ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas struktur pasar kerja, meskipun dominasi sektor informal masih relatif tinggi.

Grafik 6. 1. Ketenagakerjaan Menurut Status Pekerjaan Utama



Sumber : BPS

Grafik 6. 2. Ketenagakerjaan Formal dan Informal



Sumber : BPS

Berdasarkan tingkat pendidikan, struktur tenaga kerja Sulawesi Tengah pada November 2025 masih didominasi oleh pekerja berpendidikan dasar dan menengah. Jumlah pekerja berpendidikan SD ke bawah tercatat sebanyak 561.580 orang, turun 590 orang atau sekitar 0,10% dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, kelompok pendidikan menengah menunjukkan peningkatan. Pekerja berpendidikan SMP naik 9.870 orang (3,55%) menjadi 287.720 orang, SMA naik 11.800 orang (2,70%) menjadi 448.720 orang, dan SMK meningkat paling tinggi sebesar 14.400 orang (12,33%) menjadi 131.160 orang.

Di sisi lain, tenaga kerja berpendidikan tinggi mengalami penurunan. Pekerja berpendidikan Diploma turun 12.030 orang (-32,84%) menjadi 24.600 orang, sedangkan lulusan Universitas turun 17.190 orang (-7,73%) menjadi 205.330 orang. Secara keseluruhan, total penduduk bekerja meningkat 6.260 orang (0,38%) dibandingkan Agustus 2025, dengan tambahan tenaga kerja lebih banyak terserap pada kelompok pendidikan menengah. Dinamika ini mengindikasikan bahwa pergeseran struktur ketenagakerjaan pada periode Agustus hingga November 2025 cenderung menguat pada kelompok pendidikan menengah, sementara kelompok pendidikan tinggi mengalami penurunan.

Tabel 6. 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (orang)

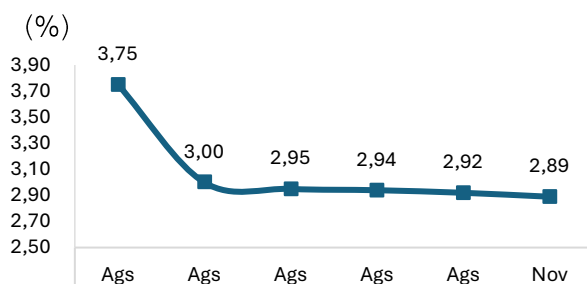
Jenis Kegiatan Utama	2022		2023		2024		2025		
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	November
1. SD Ke Bawah	619.500	662.790	614.530	585.640	611.200	587.720	596.180	562.170	561.580
2. SMP	264.350	262.880	282.750	258.280	269.600	274.400	257.270	277.850	287.720
3. SMA	332.190	350.540	361.290	397.390	347.080	417.330	435.480	436.920	448.720
4. SMK	106.200	99.850	90.430	97.400	96.470	99.390	94.180	116.760	131.160
5. Diploma I/II/III	32.360	30.610	27.090	31.550	27.500	29.630	30.570	36.630	24.600
6. Universitas	172.830	179.660	166.390	176.910	173.819	190.200	181.830	222.520	205.330
Jumlah	1.527.430	1.586.330	1.542.480	1.547.170	1.525.669	1.598.670	1.595.510	1.652.850	1.659.110

Sumber : BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah pada November 2025 tercatat sebesar 2,89%, menurun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 2,92%. Penurunan sebesar 0,03 persen poin tersebut menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif lebih baik dalam periode Agustus hingga November 2025.

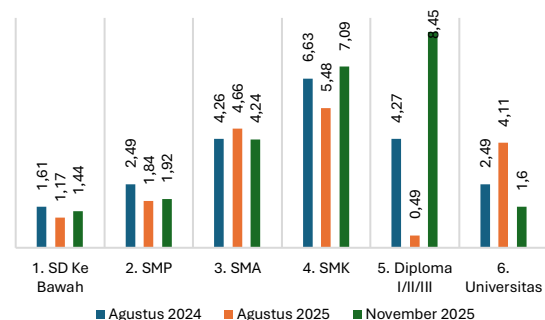
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada November 2025 TPT di perkotaan tercatat sebesar 5,01%, sedangkan di perdesaan sebesar 1,67%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan.

Grafik 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber : BPS

Grafik 6. 2. TPT menurut Tingkat Pendidikan



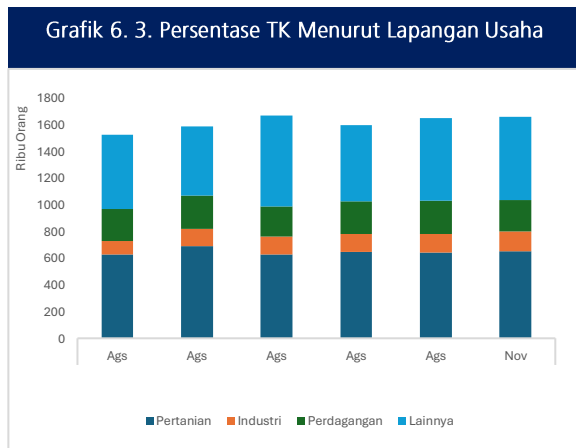
Sumber : BPS

Berdasarkan tingkat pendidikan, pada November 2025 TPT tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah masih berasal dari kelompok pendidikan menengah, khususnya SMK sebesar 7,09%, diikuti oleh SMA sebesar 4,24%. Dibandingkan Agustus 2025, TPT pada jenjang SMK meningkat cukup signifikan dari 5,48% menjadi 7,09%, sedangkan TPT SMA justru menurun dari 4,66% menjadi 4,24%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tekanan pengangguran pada lulusan pendidikan menengah lebih terkonsentrasi pada lulusan vokasi (SMK) pada periode terbaru.

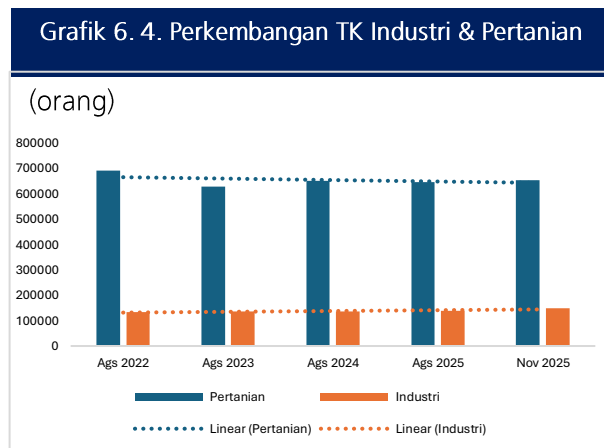
Di sisi lain, dinamika juga terlihat pada kelompok pendidikan tinggi. TPT Diploma meningkat tajam dari 0,49% pada Agustus 2025 menjadi 8,45% pada November 2025, sementara TPT Universitas menurun dari 4,11% menjadi 1,60%. Untuk kelompok pendidikan dasar, TPT SD ke bawah naik dari 1,17% menjadi 1,44%, dan SMP meningkat tipis dari 1,84% menjadi 1,92%. Secara umum, struktur pengangguran pada November 2025 menunjukkan variasi antar-jenjang pendidikan, dengan lonjakan paling nyata terjadi pada lulusan SMK dan Diploma.

Berdasarkan lapangan kerja utama, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Tengah. Pada November 2025, sektor pertanian menyerap 652.620 orang, meningkat dibandingkan Agustus 2025 sebesar 645.000 orang atau bertambah 7.620 orang (sekitar 1,18%). Pangsa sektor pertanian terhadap total tenaga kerja juga meningkat dari sekitar 39,02% pada Agustus 2025 menjadi 39,34% pada November 2025, menunjukkan peran sektor ini yang tetap dominan dalam struktur ketenagakerjaan daerah. Di sisi lain, sektor industri

pengolahan mencatat peningkatan jumlah tenaga kerja dari 137.860 orang pada Agustus 2025 menjadi 147.480 orang pada November 2025, atau naik 9.620 orang (sekitar 6,98%). Sementara itu, sektor perdagangan mengalami penurunan dari 249.660 orang menjadi 236.790 orang, sedangkan kategori lainnya relatif meningkat dari 620.330 orang menjadi 622.220 orang. Secara umum, penambahan tenaga kerja pada periode Agustus hingga November 2025 terutama ditopang oleh sektor pertanian dan industri, sementara sektor perdagangan mengalami penyesuaian.



Sumber : BPS



Sumber : BPS

6.2. Kemiskinan

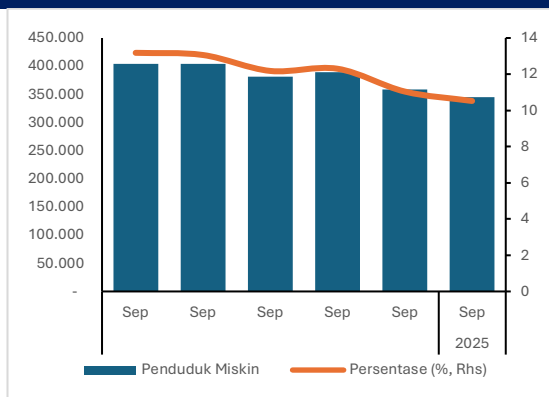
Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada September 2025 tercatat sebesar 10,52% atau sebanyak 345,38 ribu orang, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 10,92% (356,19 ribu orang). Penurunan sebesar 0,40 persen poin tersebut menunjukkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat dalam periode Maret hingga September 2025. Secara tren, tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah juga melanjutkan penurunan dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,04%.

Meskipun demikian, persentase kemiskinan Sulawesi Tengah masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 8,25%. Secara peringkat, Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-15 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional, sehingga upaya pengurangan kemiskinan tetap perlu diperkuat agar kesenjangan dengan capaian nasional dapat semakin dipersempit.

Mempertimbangkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah dalam empat tahun terakhir, perlu disusun langkah terobosan utamanya oleh Pemerintah Daerah. Sejumlah program telah dilakukan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mengurangi kemiskinan antara lain peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan akses

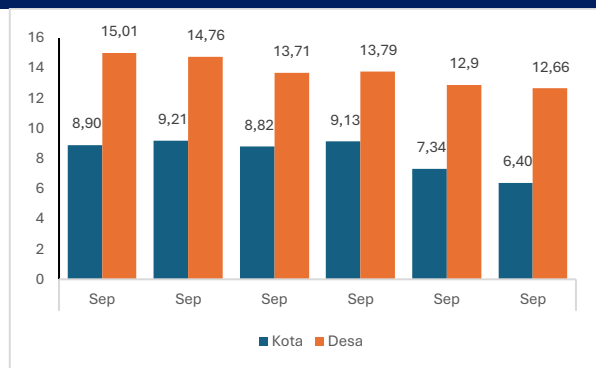
kesehatan kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, serta penyelenggaraan *job fair* yang diikuti oleh beberapa perusahaan BUMN maupun swasta dengan sasaran para lulusan sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Di samping itu, pemerintah daerah juga memberikan beberapa bantuan stimulus untuk kelompok subsisten dengan tujuan agar masyarakat kelompok ini dapat memulai usaha untuk meningkatkan kapasitas ekonominya serta memberikan bantuan modal dan peralatan kepada masyarakat yang mempunyai usaha eksisting untuk pengembangan usaha.

Grafik 6. 5. Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tengah



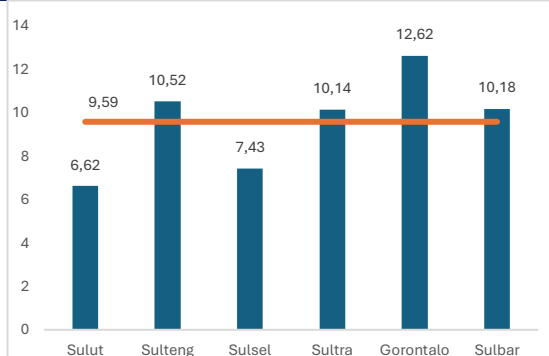
Sumber: BPS data September 2023 tidak tersedia

Grafik 6. 8. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kota & Desa Sulawesi Tengah



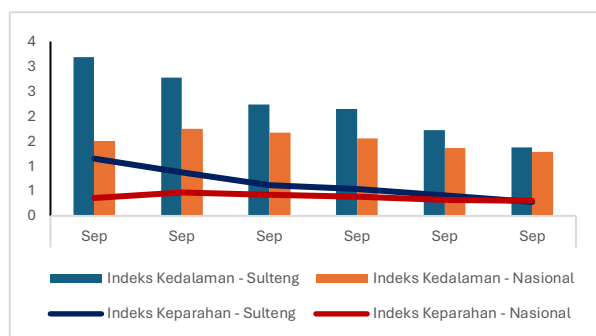
Sumber: BPS, data September 2023 tidak tersedia

Grafik 6. 9. Tingkat Kemiskinan Lintas Sulawesi



Sumber : BPS, data September 2023

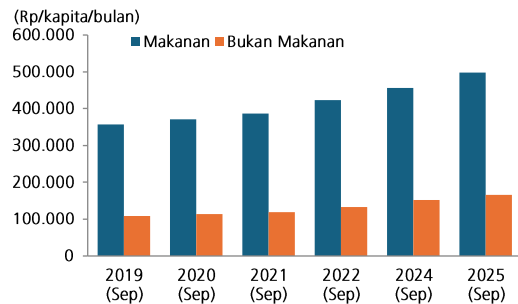
Grafik 6. 6. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sulawesi Tengah & Nasional



Sumber : BPS, data September 2023 tidak tersedia

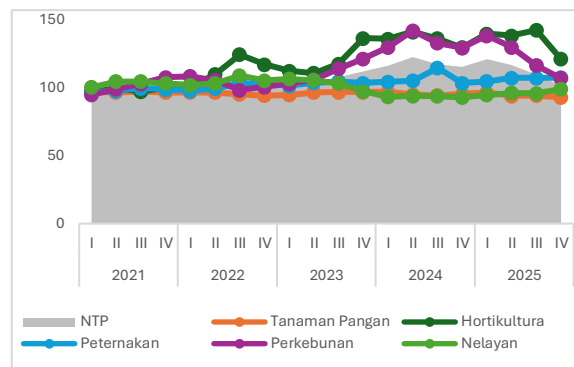
Berdasarkan lokasi tempat tinggal, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada September 2025 tercatat mengalami penurunan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan dibandingkan Maret 2025. Di wilayah perkotaan, tingkat kemiskinan turun dari 6,98% pada Maret 2025 menjadi 6,40% pada September 2025, atau menurun sebesar 0,58 persen poin. Sementara itu, di wilayah perdesaan, tingkat kemiskinan juga menurun dari 12,93% menjadi 12,66%, atau turun 0,27 persen poin.

Grafik 6. 7. Garis Kemiskinan Per Komoditas



Sumber : BPS

Grafik 6. 8. NTP Per Sektor



Sumber : BPS

Indeks kedalaman kemiskinan Sulawesi Tengah pada September 2025 tercatat sebesar 1,38, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 1,72. Penurunan sebesar 0,34 poin ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, indeks keparahan kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,28, juga menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,41. Penurunan sebesar 0,13 poin tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif berkurang secara tahunan. Meskipun demikian, dibandingkan nasional pada September 2025, indeks kedalaman kemiskinan Sulawesi Tengah (1,38) masih sedikit lebih tinggi dari nasional (1,29), sedangkan indeks keparahan kemiskinan Sulawesi Tengah (0,28) telah berada di bawah nasional (0,303).

6.3. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Tengah

Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 101,6, kembali menurun dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 109,8. Penurunan ini menunjukkan adanya pelemahan lanjutan pada daya beli petani di akhir tahun, meskipun secara level NTP masih berada sedikit di atas 100. Dengan demikian, secara agregat harga yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayarkan, namun margin kesejahteraannya semakin menyempit.

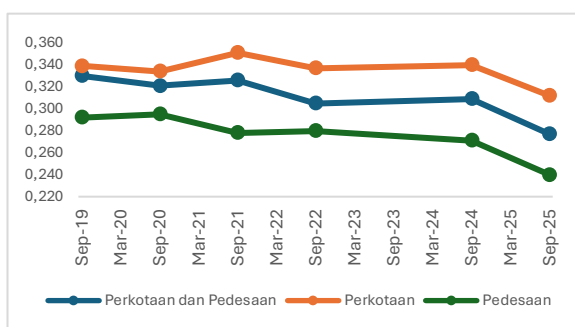
Secara subsektor, penurunan NTP triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh koreksi tajam pada hortikultura dari 142,46 menjadi 121,10, serta penurunan pada perkebunan dari 116,46 menjadi 107,06. Subsektor tanaman pangan juga turun dari 94,35 menjadi 93,02, tetap berada di bawah 100. Di sisi lain, peternakan relatif stabil dan sedikit meningkat dari 107,27 menjadi 107,45, sementara nelayan membaik dari 95,85 menjadi 99,13, meskipun masih di bawah ambang 100. Secara keseluruhan, dinamika triwulan IV mencerminkan tekanan harga komoditas tertentu yang berdampak pada perlambatan peningkatan kesejahteraan petani.

6.4. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sulawesi Tengah

Ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah pada September 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio Gini tercatat sebesar 0,277, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,309. Penurunan sebesar 0,032 poin tersebut mengindikasikan distribusi pengeluaran masyarakat yang semakin merata secara tahunan. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan menurun dari 0,340 pada September 2024 menjadi 0,312 pada September 2025. Sementara itu, di pedesaan, rasio gini juga turun dari 0,271 menjadi 0,240. Dengan demikian, perbaikan ketimpangan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dengan penurunan yang relatif lebih dalam di wilayah pedesaan.

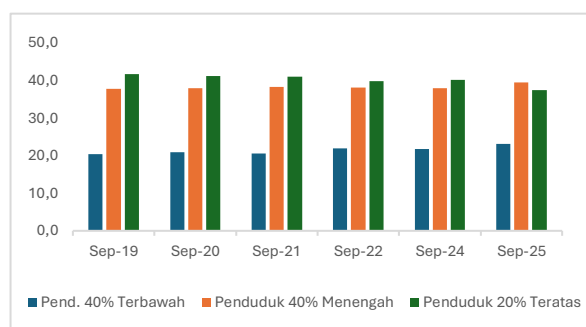
Pada September 2025, distribusi pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah menunjukkan pergeseran yang semakin merata dibandingkan September 2024. Persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah meningkat dari 21,8% pada September 2024 menjadi 23,2% pada September 2025. Kenaikan sebesar 1,4 poin persentase ini menunjukkan peningkatan porsi pengeluaran yang dinikmati kelompok bawah. Pada saat yang sama, kelompok 40 persen menengah juga meningkat dari 38,0% menjadi 39,4%. Sebaliknya, porsi pengeluaran kelompok 20 persen teratas menurun dari 40,2% pada September 2024 menjadi 37,4% pada September 2025, atau turun 2,8 poin persentase. Pergeseran ini konsisten dengan penurunan rasio gini pada periode yang sama, yang mengindikasikan distribusi pengeluaran yang lebih merata secara tahunan serta perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik 6. 9. Perkembangan Rasio Gini Sulawesi Tengah



Sumber : BPS data september 2023 tidak tersedia

Grafik 6. 10. Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Tengah



Sumber : BPS data september 2023 tidak tersedia



Bab VII Prospek Perekonomian

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah diperkirakan berada pada kisaran 7,45–9,05% (yoy). Kinerja tersebut masih ditopang oleh dominannya peran LU Industri Pengolahan berbasis nikel dan LU Pertambangan dan Penggalian dalam struktur ekonomi daerah. Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, terutama perlambatan ekonomi Tiongkok sesuai proyeksi IMF yang berpotensi memengaruhi permintaan global terhadap produk berbasis nikel.

Inflasi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2026 diperkirakan berada pada kisaran 2,46–3,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi Triwulan IV 2025 sebesar 3,31% (yoy). Secara triwulanan, tekanan harga meningkat dibandingkan akhir 2025 seiring faktor musiman dan peningkatan aktivitas ekonomi awal tahun. Pada komponen *Volatile Food* (VF), tekanan inflasi diperkirakan meningkat terutama pada bulan Maret 2026 sejalan dengan kenaikan permintaan menjelang Ramadhan dan HBKN Idulfitri. *Administered Prices* (AP), inflasi Triwulan I 2026 diperkirakan meningkat secara tahunan terutama akibat faktor *low base effect* kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025. Sementara itu, *Core Inflation* (CI) diperkirakan meningkat secara moderat dan relatif stabil.

7.1. Prospek Perekonomian

7.1.1. Prospek Perekonomian Global & Nasional

Prospek perekonomian global berada dalam tren melambat di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan melambat dari 3,3% pada 2025 menjadi 3,2%, dengan divergensi pertumbuhan antarnegara yang masih terlihat. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta berlanjutnya tensi geopolitik. Di sisi lain, ekonomi AS diperkirakan tetap meningkat ditopang besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi berbasis *artificial intelligence* (AI). Sementara itu, ekonomi Eropa dan Jepang diproyeksikan melambat seiring penurunan kinerja ekspor akibat moderasi permintaan global, meskipun sebagian tertopang oleh peningkatan investasi teknologi. Dalam konteks Asia, ekonomi Tiongkok masih berada dalam tren melambat, dipengaruhi oleh lemahnya konsumsi domestik dan belum kuatnya permintaan internal.

Tabel 7. 1. Proyeksi PDB Dunia

Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	WEO Oct 2025		WEO Jan 2025	
	2026	2027	2026	2027
PDB Dunia	3,1	4,1	5,1	6,1
Negara Maju	1,6	1,7	1,8	1,7
Amerika Serikat	2,1	2,1	2,4	2
Uni Eropa	1,4	1,6	1,5	1,6
Jepang	0,6	0,6	0,7	0,6
Inggris	1,3	1,5	1,3	1,5
Emerging Market	4	4,2	4,2	4,1
Kawasan Asia	4,7	4,8	5	4,8
Tiongkok	4,2	4,2	4,5	4
India	6,2	6,4	6,4	6,4
ASEAN	4,1	4,3	4,2	4,4
Lainnya				
Rusia	1	1,1	0,8	1
Brazil	1,9	2,2	1,6	2,3
Arab Saudi	4	3,2	4,5	3,6
Afrika Selatan	1,2	1,5	1,4	1,5

Sumber: IMF, World Economic Outlook Jan 2026

Sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan Asia, ekonomi Tiongkok diperkirakan mengalami moderasi secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan mencapai 5,0% pada 2025, kemudian melambat menjadi 4,5% pada 2026 dan 4,0% pada 2027. Perlambatan tersebut mencerminkan lemahnya konsumsi domestik serta belum kuatnya

permintaan internal, meskipun masih terdapat dukungan kebijakan yang menjaga stabilitas pertumbuhan dalam jangka pendek. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, termasuk bagi Sulawesi Tengah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor komoditas berbasis nikel dan logam, dinamika perlambatan Tiongkok menjadi faktor penting dalam menentukan prospek permintaan eksternal. Moderasi pertumbuhan tersebut perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi kinerja perdagangan dan ekspor daerah, khususnya pada sektor industri pengolahan yang berorientasi pasar global.

Di tengah tren perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi, perekonomian domestik menunjukkan ketahanan yang relatif baik. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 5,03% (yoy). Kinerja tersebut mencerminkan efektivitas sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berlanjut pada triwulan I 2026 dengan kinerja yang tetap solid. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat didorong oleh keberlanjutan berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, serta ekspektasi konsumen yang terus membaik. Peningkatan aktivitas ekonomi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di triwulan I 2026, seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, dan Idulfitri 1447 H, turut memberikan dorongan terhadap permintaan domestik. Investasi juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi, didukung oleh investasi Pemerintah termasuk pada program hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta keyakinan pelaku usaha yang masih terjaga. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy), sejalan dengan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

7.1.2. Prospek Perekonomian Regional

Sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Sulawesi Tengah pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh tinggi meskipun berpotensi tidak setinggi capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut masih akan ditopang oleh LU Industri Pengolahan yang menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian daerah, seiring keberlanjutan aktivitas hilirisasi dan operasional fasilitas produksi yang telah berjalan. Namun demikian, ruang akselerasi pertumbuhan diperkirakan lebih terbatas, sejalan dengan risiko pembatasan kapasitas penggalian bijih nikel serta terbatasnya penambahan kapasitas industri sebagai dampak kebijakan moratorium pembangunan smelter baru, yang berpotensi menahan peningkatan output pada sektor-sektor utama tersebut.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2026 diperkirakan tetap ditopang oleh kinerja ekspor barang dan jasa, sejalan dengan dominannya peran LU Industri Pengolahan berbasis nikel dalam struktur ekonomi daerah. Kinerja ekspor masih menjadi pendorong utama pertumbuhan mengingat tingginya orientasi pasar global pada produk olahan nikel. Namun demikian, ruang pertumbuhan diperkirakan lebih terbatas seiring dinamika kapasitas produksi industri, sehingga laju pertumbuhan ekonomi ke depan berpotensi lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sisi Lapangan Usaha

Ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2026 diperkirakan tetap ditopang oleh lapangan usaha utama, khususnya LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalian. Dari sisi LU Industri Pengolahan, kinerja diperkirakan tetap tumbuh seiring tambahan kapasitas produksi yang mulai beroperasi dan keberlanjutan aktivitas hilirisasi berbasis nikel. Meski demikian, ruang pertumbuhan diperkirakan lebih terbatas seiring kondisi *oversupply* nikel global dan perlambatan permintaan eksternal, khususnya dari Tiongkok. Sejalan dengan itu, sektor pertambangan diperkirakan tetap tumbuh positif sebagai penyedia bahan baku industri pengolahan, meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, sektor pertanian diperkirakan tetap tumbuh didorong oleh keberlanjutan program cetak sawah dan dukungan swasembada pangan, dengan tetap mencermati dinamika kondisi iklim. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh seiring kenaikan UMP tahun 2026 yang meningkatkan daya beli masyarakat, sementara sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh didukung keberlanjutan proyek-proyek *multiyear* yang masih berjalan di Sulawesi Tengah.

LU Industri Pengolahan pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025, meski diperkirakan masih menjadi penopang utama perekonomian Sulawesi Tengah. Kinerja tersebut diperkirakan didukung oleh mulai beroperasinya lini produksi baru serta penyelesaian beberapa fasilitas pengolahan yang mendekati tahap akhir, sehingga berpotensi menambah kapasitas produksi industri berbasis nikel. Namun demikian, laju pertumbuhan diperkirakan lebih moderat seiring masih adanya ketidakseimbangan supply–demand nikel global serta perlambatan permintaan dari Tiongkok sebagai pasar utama. Selain itu, kebijakan moratorium pembangunan smelter baru juga diduga membatasi penambahan kapasitas industri dalam jangka pendek, sehingga berpotensi menjadi faktor penahan pertumbuhan LU Industri Pengolahan ke depan.

LU Pertambangan dan Penggalian pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh, melandai dibandingkan realisasi 2025. Pertumbuhan tersebut diduga masih ditopang oleh kebutuhan bahan baku industri pengolahan nikel serta adanya relaksasi kuota sementara pada awal tahun

yang berpotensi menjaga kesinambungan produksi. Namun demikian, laju pertumbuhan diperkirakan lebih terbatas seiring penurunan kuota penambangan bijih nikel tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, penyesuaian kebijakan tarif dan royalty yang memperhitungkan kandungan di luar nikel berpotensi meningkatkan biaya bahan baku juga menjadi risiko pertumbuhan yang perlu menjadi perhatian.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada 2026 diperkirakan tumbuh positif, melandai dibandingkan realisasi 2025. Pertumbuhan tersebut diduga didukung oleh keberlanjutan program cetak sawah serta optimalisasi lahan untuk mendukung swasembada pangan. Namun demikian, laju pertumbuhan diperkirakan lebih moderat seiring normalisasi produksi setelah peningkatan pada tahun sebelumnya serta dinamika kondisi iklim yang masih perlu dicermati. Proyeksi menunjukkan kondisi ENSO cenderung netral hingga pertengahan tahun 2026, dengan peluang El Nino lemah pada akhir tahun yang berpotensi memengaruhi pola tanam dan produksi.

LU Konstruksi pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi 2025. Pertumbuhan tersebut diduga didukung oleh keberlanjutan sejumlah proyek konstruksi yang bersifat *multiyear* di Sulawesi Tengah, termasuk proyek-proyek yang terkait dengan pengembangan industri berbasis nikel. Namun demikian, laju pertumbuhan diperkirakan belum optimal seiring adanya penyesuaian alokasi anggaran, khususnya pada belanja infrastruktur dan pekerjaan umum, serta penyesuaian transfer ke daerah yang tercermin dalam koreksi alokasi tematik dan proyek-proyek tertentu.

LU Perdagangan pada 2026 diperkirakan tumbuh positif, melandai dari realisasi 2025. Pertumbuhan tersebut diperkirakan didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat, antara lain seiring kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang berpotensi meningkatkan *disposable income* dan daya beli. Namun demikian, laju pertumbuhan diperkirakan lebih moderat seiring normalisasi setelah pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun sebelumnya. Selain itu, potensi perlambatan pada LU Pertanian sebagai mata pencaharian dominan masyarakat Sulawesi Tengah juga berisiko menahan peningkatan konsumsi dan aktivitas perdagangan pada tahun 2026.

Sisi Pengeluaran

Seluruh komponen pengeluaran PDRB Sulawesi Tengah pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, dengan ekspor sebagai pendorong utama pertumbuhan. Ekspor diperkirakan meningkat seiring keberlanjutan produksi industri pengolahan berbasis nikel, meskipun pada laju yang lebih moderat sejalan dinamika permintaan global dan kondisi *oversupply* nikel. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap meningkat didukung kenaikan UMP dan terjaganya daya beli masyarakat. Sementara itu, impor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diperkirakan tumbuh seiring kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung aktivitas industri

dan proyek konstruksi yang berlanjut. Namun demikian, konsumsi pemerintah berpotensi tumbuh lebih terbatas seiring dinamika ruang fiskal dan penyesuaian alokasi anggaran, sehingga laju pertumbuhan secara keseluruhan diperkirakan tetap kuat namun lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekspor pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025. Kinerja tersebut diperkirakan didukung oleh tambahan kapasitas produksi industri berbasis nikel serta keberlanjutan operasional industri yang telah berjalan. Namun demikian, laju pertumbuhan ekspor diperkirakan lebih terbatas seiring kondisi *oversupply* nikel global yang masih berlangsung dan dinamika permintaan eksternal, sehingga pertumbuhan ekspor diperkirakan tetap positif namun moderat.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025. Pertumbuhan tersebut diperkirakan didukung oleh keberlanjutan proyek konstruksi serta pengembangan kawasan industri yang masih berlangsung. Namun demikian, laju pertumbuhan investasi diperkirakan tetap dipengaruhi oleh dinamika alokasi anggaran pemerintah daerah, khususnya untuk proyek-proyek pemerintah.

Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025. Peningkatan tersebut diperkirakan didorong oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang berpotensi meningkatkan *disposable income* dan daya beli masyarakat didukung oleh laju inflasi yang ditargetkan terjaga hingga akhir tahun pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah yaitu $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Namun demikian, laju pertumbuhan konsumsi diperkirakan tetap terbatas seiring potensi perlambatan sektor pertanian sebagai mata pencaharian dominan masyarakat Sulawesi Tengah, sehingga penguatan konsumsi diperkirakan belum sepenuhnya merata.

Konsumsi Pemerintah pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025. Pertumbuhan tersebut diperkirakan didorong oleh intensifikasi pelaksanaan program prioritas Pemerintah serta normalisasi belanja setelah kontraksi pada tahun sebelumnya. Namun demikian, ruang pertumbuhan tetap dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah dan dinamika transfer ke daerah yang berpotensi membatasi peningkatan belanja secara lebih kuat.

Impor pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025. Peningkatan tersebut diperkirakan didorong oleh kenaikan impor barang modal seiring keberlanjutan proyek konstruksi yang bersifat *multiyear* di kawasan industri, serta meningkatnya impor bahan baku yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas industri pengolahan berbasis nikel.

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah diperkirakan berada pada kisaran 7,45–9,05% (yoy). Kinerja tersebut masih ditopang oleh dominannya peran LU Industri Pengolahan berbasis nikel dan LU Pertambangan dan Penggalan dalam struktur ekonomi daerah. Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, terutama perlambatan ekonomi Tiongkok sesuai proyeksi IMF yang berpotensi memengaruhi permintaan global terhadap produk berbasis nikel. Selain itu, dinamika permintaan komoditas hilirisasi nikel serta fluktuasi harga nikel global dapat menekan margin produsen dan mendorong penyesuaian tingkat produksi. Risiko tersebut berpotensi memengaruhi kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalan yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

Tabel 7. 2. Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

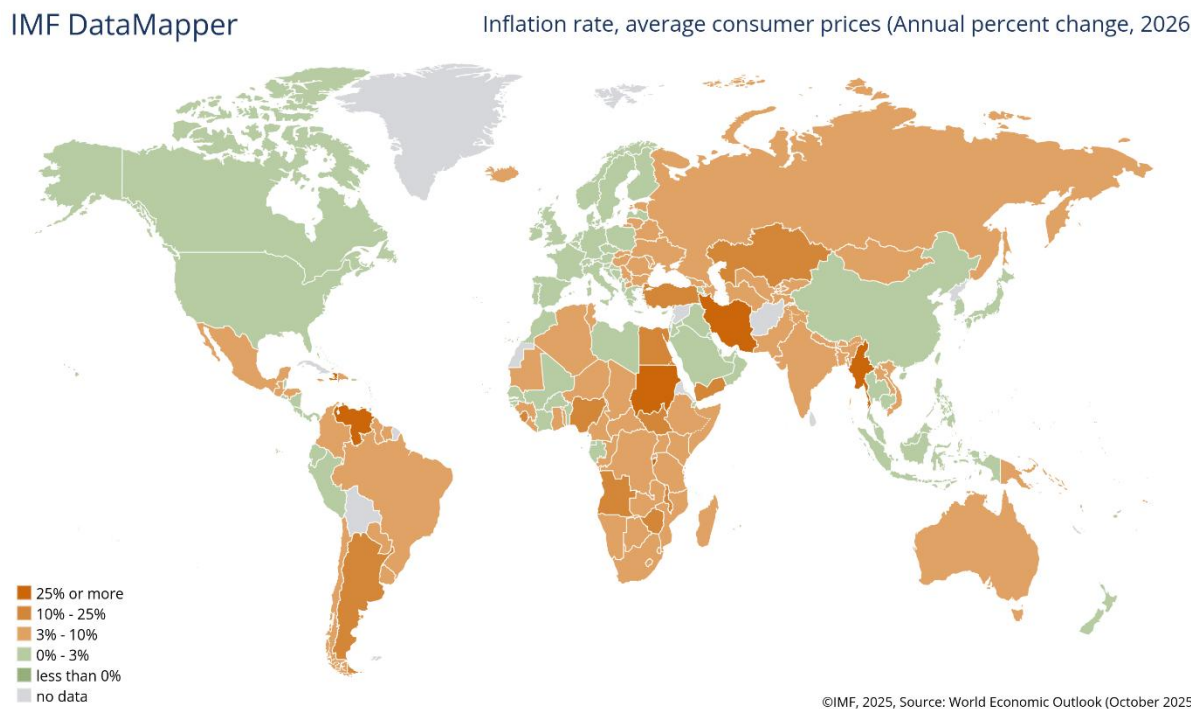
Tahun	2022	2023	2024	2025	2026p (Bank Indonesia)
Pertumbuhan (% , yoy)	15.17	11.91	9,89	8,47	7,45 – 9,05%

Sumber : BPS , Proyeksi Bank Indonesia

7.2. Prospek Inflasi

7.2.1. Prospek Inflasi Global dan Nasional 2025

Gambar 7.1. Peta Inflasi Global

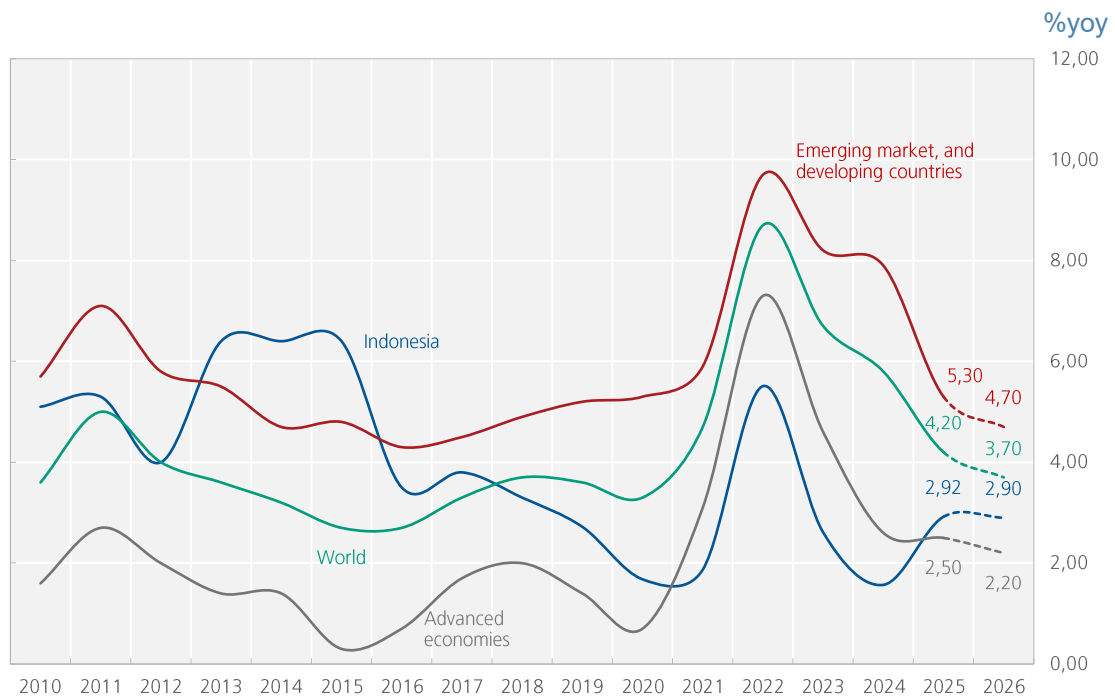


Sumber: IMF

Inflasi global berada dalam fase tekanan inflasi yang melambat dan semakin terfragmentasi antarnegara. *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan inflasi global turun dari level pascapandemi dari 4,2% (yoy) pada 2025 menjadi 3,7% (yoy) pada 2026, namun dengan pola yang divergen. Di Amerika Serikat (AS), tekanan inflasi relatif lebih tinggi dan cenderung berada di atas target akibat dampak kebijakan tarif, pasar tenaga kerja yang masih ketat, serta stimulus fiskal dan lonjakan investasi berbasis *artificial intelligence* (AI). Sebaliknya, di banyak negara lain termasuk kawasan Eropa dan sebagian Asia, tekanan inflasi lebih moderat, mencerminkan lemahnya permintaan domestik dan efek perlambatan global.

IMF menekankan bahwa kebijakan tarif AS dan meningkatnya fragmentasi perdagangan global berpotensi menimbulkan *supply shock* pada negara pengimpor, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga secara bertahap. Perlambatan pertumbuhan global dari 3,3% (yoy) pada 2025 menjadi sekitar 3,2% (yoy) pada 2026 berlangsung bersamaan dengan ketidakpastian kebijakan yang masih tinggi, sehingga menciptakan kombinasi pertumbuhan melambat namun inflasi belum sepenuhnya mereda.

Grafik 7.1. Perkembangan dan Prospek Inflasi Global



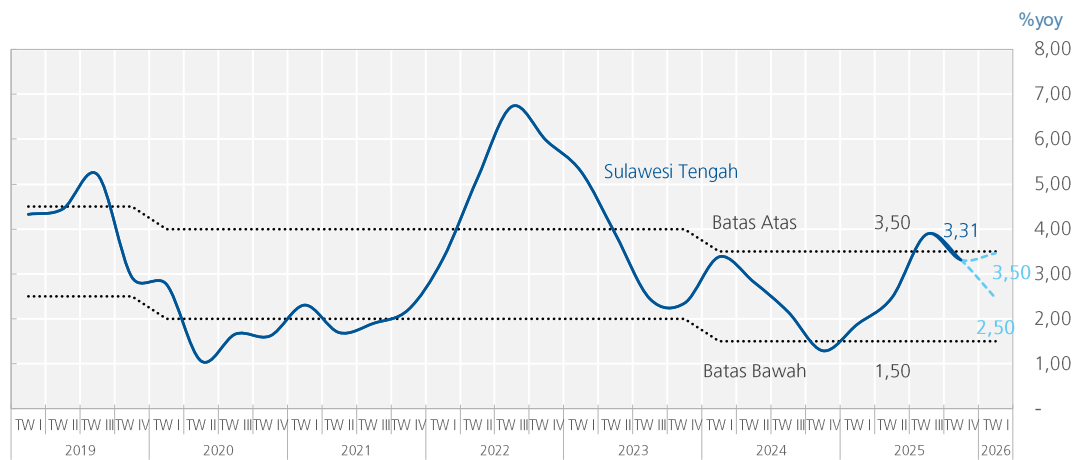
Sumber: IMF, BPS (diolah)

Bagi Indonesia, dinamika global tersebut tercermin dalam perkembangan inflasi domestik awal 2026 yang secara tahunan meningkat terutama karena faktor *low base effect*, namun secara fundamental tekanan permintaan masih terbatas. Inflasi IHK Januari 2026 tercatat 3,55% (yoy), meningkat dibandingkan Desember 2025, terutama dipengaruhi kelompok *administered prices* akibat rendahnya basis pada Januari 2025 seiring penerapan diskon tarif listrik, sementara secara bulanan justru terjadi deflasi -0,15% (mtm). Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi saat ini belum bersifat *demand-driven*, melainkan lebih dipengaruhi faktor teknis.

Indeks Harga Impor (IHIM) pangan 2026 menunjukkan penurunan, terutama didorong kenaikan pasokan gula, gandum, kedelai, dan beras. Kondisi ini mendukung *imported food inflation* yang lebih terkendali bagi Indonesia, sejalan dengan perbaikan ketahanan pasokan domestik dan cuaca yang relatif lebih kondusif dibanding prakiraan awal. Namun demikian, tekanan eksternal masih perlu diwaspadai, khususnya dari harga emas global yang meningkat signifikan dan telah ditransmisikan ke inflasi inti, terutama emas perhiasan, dengan harga emas domestik lebih yang dominan dipengaruhi faktor harga emas global dan nilai tukar dibandingkan faktor permintaan domestik, yang artinya, risiko *imported inflation* melalui dinamika harga emas global dan nilai tukar tetap menjadi perhatian di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Ke depan, prospek inflasi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali pada sasaran target $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

7.2.1. Prospek Inflasi Sulawesi Tengah 2025

Grafik 7.2. Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: BPS, Bank Indonesia (diolah)

Inflasi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2026 diperkirakan tetap terjaga pada batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,50%–3,50% (yoy). Secara triwulanan, tekanan harga meningkat dibandingkan akhir 2025 seiring faktor musiman dan peningkatan aktivitas ekonomi awal tahun.

Pada komponen *Volatile Food* (VF), tekanan inflasi diperkirakan meningkat terutama pada bulan Maret 2026 sejalan dengan kenaikan permintaan menjelang Ramadhan dan HBKN Idulfitri. Produksi beras yang diperkirakan menurun akibat penurunan luas panen serta gangguan pasokan aneka cabai dan komoditas hortikultura turut mendorong tekanan harga. Meskipun kondisi ENSO tergolong basah namun masih tergolong dalam kategori La Niña dengan intensitas lemah yang masih mendukung produksi sebagian komoditas. Namun, risiko gangguan distribusi dan pola musiman tetap menjadi sumber tekanan pada kelompok pangan. Pada komponen *Administered Prices* (AP), inflasi Triwulan I 2026 diperkirakan meningkat secara tahunan terutama akibat faktor *low base effect* kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025. Selain itu, kenaikan tarif angkutan udara memasuki periode *high season* serta peningkatan mobilitas masyarakat menjelang HBKN turut mendorong tekanan AP. Namun demikian, tidak terdapat penyesuaian signifikan pada harga energi utama, sehingga tekanan AP diperkirakan bersifat temporer dan tidak berlanjut secara struktural.

Sementara itu, *Core Inflation* (CI) diperkirakan meningkat secara moderat dan relatif stabil. Tekanan terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren harga emas global, serta peningkatan bertahap biaya tenaga kerja akibat penyesuaian UMP. Di sisi lain, permintaan domestik masih tumbuh gradual dan tidak menunjukkan indikasi overheating, sehingga akselerasi inflasi inti diperkirakan tetap terkendali.

Secara keseluruhan, prospek inflasi Sulawesi Tengah pada Triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan tekanan jangka pendek akibat faktor musiman dan *low base effect*, namun secara fundamental masih berada dalam kategori yang terkendali. Risiko utama bersumber dari volatilitas harga pangan dan dinamika harga komoditas global, sementara sisi permintaan domestik relatif stabil.

Fax : 0451 - 421180
Website : www.bi.go.id

Dewan Redaksi

Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah Februari 2026

Penanggung Jawab : Muhamad Irfan Sukarna
(Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah)

Koordinator Tim Penulis : Miftachul Choiri
(Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah)

Editor : M. Yafi Satryatama

Tim Penulis : Lelaki Indy Shidqy
Pinehas Danu Arvito
Habibi Saifuddin
M. Pasha Ilyasa Gamal
Alfonso Sandri Hontong
Fernando Hendrik Rompas